RENCANA INDUK PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DI DAERAH

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan maka diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 354).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Invensi dan Inovasi.
5. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
8. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
12. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati.
15. Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

(1) RIPJPID Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

(2) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. program prioritas Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
   b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
   c. isu strategis;
   d. permasalahan umum daerah dan produk unggulan daerah;
   e. kebijakan nasional; dan
   f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Maksud dari penyusunan RIPJPID Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi pedoman pada kegiatan Riset dan Inovasi dan menjadi peta jalan untuk mengharmoniskan agenda-agenda Riset dan Inovasi Daerah agar tercipta keterpaduan, keberlanjutan, dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari penyusunan penyusunan RIPJPID Tahun 2025 – 2029 untuk:

a. menganalisis gambaran umum dan kondisi riset Daerah;
b. menganalisis tema prioritas riset dan inovasi Daerah;
c. menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi Daerah;
d. menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
e. menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah; dan
f. menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
   c. BAB III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
   d. BAB IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
   e. BAB V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
   f. BAB VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
   g. BAB VII : Penutup.

(2) Uraian RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi daerah.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling edikit memuat :

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*); dan

b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 45

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Pembangunan berbasis pengetahuan di era disrupsi menjadi alat strategis yang penting bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan riset dan inovasi sebagai dasar untuk memperkuat kebijakan. Perubahan yang dibawa oleh era digital menjadikan pengetahuan sebagai pilar utama pembangunan daerah, sehingga pengembangan pengetahuan dan kebijakan menjadi syarat yang esensial dalam mendukung transformasi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, menerapkan berbagai praktik inovatif sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, reformasi tata kelola pemerintahan, restrukturisasi sistem organisasi, dan efisiensi anggaran. Strategi ini difokuskan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor eksternal meliputi sumber daya alam yang tersedia, teknologi, serta pasar tenaga kerja, baik yang bersifat operasional maupun profesional. Sedangkan faktor internal mencakup kapasitas inovasi aparatur, struktur organisasi, sistem kerja, kreativitas dalam pengembangan program, dan manajemen pengetahuan.

Praktik pemanfaatan pengetahuan dalam riset dan inovasi pada administrasi pemerintahan daerah dimulai dari tahap perencanaan. Program-program yang dirumuskan dalam perencanaan tersebut mengintegrasikan domain pengetahuan dengan kebijakan pembangunan daerah untuk mengatasi beragam tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, salah satu tugas BRIDA atau BAPPERIDA adalah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah di semua sektor kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif, dan partisipatif, yang mencakup peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset, dan inovasi dalam mengatasi permasalahan utama pembangunan daerah serta memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk kemajuan daerah.

Dokumen RIPJPID Kabupaten Pasuruan menyusun rencana penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD) dan untuk menyelesaikan permasalahan utama yang ada. Dokumen ini adalah hasil dari proses teknokratik/ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029, serta memberikan panduan dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 melalui usulan program-program indikatif.

Daftar Isi

Kata Pengantar 3
Daftar Isi 5
Daftar Tabel 7
Daftar Gambar 8
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Dasar Hukum 3
I.3 Maksud dan Tujuan 6
I.4 Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7
I.5 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 9
II.1 Gambaran Umum Daerah 9
II.1.1 Aspek Geografis 9
II.1.2 Aspek Kependudukan 11
II.1.3 Aspek Ketenagakerjaan 13
II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 19
II.1.5 Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD) 25
II.1.6 Usulan Permasalahan Utama Daerah 35
II.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah 45
II.2.1 Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*) 45
II.2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap PUD yang diusulkan 55
II.2.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap Permasalahan Utama Daerah Yang diusulkan 81
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH 90
III.1 Tantangan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang 92
III.2 Peluang dalam pemanfaatan riset dan Inovasi di Masa Datang 94
III.3 Kondisi yang Diharapkan: *Evidence Based Policy* dan Ekosistem RID 96
III.3.1 Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*Evidence based policy*) 97
III.3.2 Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan (PUD) 98
III.3.3 Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tematik Permasalahan Utama Daerah 126
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH 148
IV.1 Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti 150
IV.2 Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Tematik Produk Unggulan Daerah 152

IV.2.1 Usaha Bordir 153
IV.2.2 Usaha Pertanian Padi 160
IV.2.3 Usaha Peternakan Daging 168
IV.2.4 Usaha Perikanan Lele 175
IV.2.5 Usaha Pariwisata Kuliner 184
IV.3 Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Tematik Permasalahan Utama Daerah 191
IV.3.1 Kemiskinan 191
IV.3.2 Tenaga Kerja 202
BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 214
V.1 Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) 214
V.2 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan 214
V.3 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah 216
BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH 219
VI.1 Peta Jalan 219
VI.1.1 Peta Jalan Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based-policy)* 219
VI.1.2 Peta Jalan Riset dan Inovasi Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD) 221
VI.1.3 Peta Jalan Riset dan Inovasi Tematik Permasalahan Utama Daerah 278
VI.2 Indikasi Program 298
VI.2.1 Indikasi Program Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) 298
VI.2.2 Indikasi Program Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD) 299
VI.2.3 Indikasi Program Permasalahan Utama Daerah 325
BAB VII PENUTUP 332
VII.1 Kesimpulan 332
VII.2 Rekomendasi Kebijakan 332

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah di Kabupaten Pasuruan 9
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 13
Tabel 2.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024 14
Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 (Jiwa) 14
Tabel 2.5 Penduduk Miskin 2019 - 2023 18
Tabel 2.6 Bidang Lapangan Usaha 19
Tabel 2.7 Program Prioritas Bupati Pasuruan 25
Tabel 2.8 Rekapitulasi Program Super Prioritas Bupati Pasuruan 28
Tabel 2.9 Program Prioritas Bupati Pasuruan 33
Tabel 2.10 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan 37
Tabel 2.11 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 39
Tabel 2.12 Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Jumlahnya 44
Tabel 2.13 Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2023 45
Tabel 2. 14 Pendanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan 48

Tabel 5.1 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan 213
Tabel 5.2 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah 215

Tabel 6.1 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Bordir Tahun 2026-2030 219
Tabel 6.2 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Pertanian Padi Tahun 2025-2029 229
Tabel 6.3 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Peternakan Daging Tahun 2025-2029 240
Tabel 6.4 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Perikanan Lele Tahun 2025-2029 250
Tabel 6.5 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner Tahun 2025-2029 260
Tabel 6.6 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah pada Permasalahan Kemiskinan Tahun 2026-2030 270
Tabel 6. 7 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah pada Permasalahan Ketenagakerjaan Tahun 2026-2030 280

Tabel 7.1 Indikasi Program Pengembangan Usaha Bordir 292
Tabel 7.2 Indikasi Program Pengembangan Usaha Pertanian Padi 295
Tabel 7.3 Indikasi Program Pengembangan Usaha Peternakan Daging 297
Tabel 7.4 Indikasi Program Pengembangan Usaha Perikanan Lele 300
Tabel 7.5 Indikasi Program Pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner 303
Tabel 7.6 Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Permasalahan Kemiskinan) 307
Tabel 7. 7 Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Permasalahan Ketenagakerjaan) 310
Tabel 7.8 Rekomendasi Kajian 334

Daftar Gambar

Gambar 1. 1Hubungan antar dokumen perencanaan 7

Gambar 2. 1Gambar wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan.....11
Gambar 2. 2Peta pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan.....12
Gambar 2. 3Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023.....15
Gambar 2. 4Indeks Gini Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023.....17
Gambar 2. 5Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023.....18
Gambar 2. 6Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan.....21
Gambar 2. 7Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional tanun 2020-2024 39
Gambar 2. 8Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2024.....40
Gambar 2. 9Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Pasuruan 41

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan	Penjelasan
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas koordinasi, pelaksanaan, dan pengembangan riset dan inovasi nasional.
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Basis data nasional yang memuat informasi rumah tangga miskin dan rentan miskin sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran daya saing suatu daerah berdasarkan kinerja ekonomi, infrastruktur, SDM, dan inovasi.
IGA	Indeks Gini Agregat	Indikator ketimpangan pendapatan yang menunjukkan distribusi pendapatan antarpenduduk.
INOPAMAS	Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat	Ajang lomba inovasi tahunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaring ide-ide kreatif di berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, teknologi, dan pendidikan.
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Sistem pengolahan limbah cair agar ramah lingkungan sebelum dibuang.
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Bidang yang mencakup seluruh aktivitas ilmiah dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup.
Jelita	Varietas Padi Jelita Pasuruan	1) Program kolaborasi inovasi antar daerah. 2) Juga merupakan nama varietas padi lokal unggulan dari Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal akan kualitas beras dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan.
PD	Perangkat Daerah	
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	Total nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit produksi di wilayah tertentu dalam periode tertentu.
PUD	Produk Unggulan Daerah	Komoditas atau hasil produksi khas dari suatu daerah yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi..
Renstra	Rencana Strategis	Dokumen perencanaan jangka menengah suatu organisasi yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program.
RIPJPID	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Dokumen perencanaan strategis IPTEK di daerah secara terarah dan berkelanjutan.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun.
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja atau mencari kerja).
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kategori pelaku usaha skala kecil yang berperan penting dalam perekonomian lokal dan nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah (RIPJPID) merupakan salah satu wujud dokumen strategis yang dirancang secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Dokumen ini memuat peran vital IPTEK, riset, dan inovasi dalam menghadapi tantangan prioritas pembangunan di tingkat regional. Hal ini merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Dokumen rencana induk dan peta jalan IPTEK ini disusun untuk periode lima tahun, atau selaras dengan jangka waktu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dokumen ini menjadi pedoman, di mana pada tingkat kabupaten/kota, penyusunannya dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau lembaga serupa yang mengemban tanggung jawab atas riset dan inovasi di tingkat daerah. Proses penyusunan memerlukan koordinasi yang harmonis antara BRIDA, perangkat daerah terkait, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk memastikan sinergi.

Penyusunan rencana ini didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tujuannya adalah mempercepat pencapaian sasaran program yang telah ditentukan. Secara khusus, dokumen ini juga mempertimbangkan keselarasan dengan rencana induk dan peta jalan IPTEK di tingkat provinsi, sehingga menjadi bagian terintegrasi dari dokumen RPJMD atau RPD. Dokumen rencana induk ini berfungsi sebagai landasan kebijakan berbasis bukti, sehingga implementasi kebijakan diharapkan lebih efektif, akseleratif, dan mampu menjawab permasalahan strategis daerah. Hasil riset yang dihasilkan akan dijadikan basis ilmiah dalam formulasi kebijakan pembangunan daerah, mencakup mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Sebagai dokumen teknokratik, rancangan RPJMD yang berbasis riset dan inovasi mengacu pada metode ilmiah dan kerangka berpikir berbasis data untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan pendekatan ini, penyusunan kebijakan menjadi lebih fokus, efisien, dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, program pengentasan kemiskinan tidak hanya mengandalkan pemberian bantuan tunai langsung, tetapi juga dirancang dengan strategi komprehensif, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas pendidikan vokasional, mendorong kewirausahaan lokal, mendukung pengembangan sosial budaya, serta melakukan intervensi terkait pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Dengan demikian, riset dan inovasi menjadi katalis utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara signifikan.

Riset sebagai pilar utama dalam pengambilan kebijakan memiliki peran strategis dalam menciptakan inovasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tersedianya pengembangan kebijakan publik yang berbasis pada riset, baik dalam ranah dasar (R&D), terapan (teknologi), maupun pengembangan produk, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya relevan tetapi juga memberikan dampak nyata, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban. Riset menjadi alat penting untuk memahami permasalahan secara mendalam, menentukan solusi yang tepat, serta menyusun kebijakan publik yang responsif dan inklusif.

Dalam hal ini, pelaksanaan riset di daerah memiliki lima tujuan utama, yaitu (1) meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah; (2) memperkuat tata kelola administrasi daerah; (3) memberdayakan komunitas lokal dan meningkatkan partisipasinya dalam program pembangunan; (4) meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi; dan (5) mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, tahap pengembangan bertujuan untuk mengolah hasil riset lebih lanjut sehingga dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas. Proses ini mencakup penelitian awal, pengembangan teknologi, pengkajian model, hingga tahap implementasi. Aktivitas penerapan hasil riset melibatkan transfer teknologi, intermediasi teknis, penyebaran hasil ilmiah, hingga komersialisasi inovasi yang menguntungkan masyarakat.

Institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan BRIDA memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hasil riset optimal digunakan sebagai landasan kebijakan publik. Pemerintah, melalui Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045 dan Prioritas Riset Nasional 2020–2024, bertujuan menciptakan ekosistem riset yang mendukung kemandirian nasional. Salah satu pendekatan yang dijalankan melibatkan kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah, akademisi, serta sektor swasta dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mendorong produktivitas dan inovasi.

Sebagai contoh spesifik, Kabupaten Pasuruan telah mengoptimalkan riset dan inovasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan sesuai RPJMD 2026–2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2026–2030. Dengan memanfaatkan rencana induk dan peta jalan IPTEK, Kabupaten Pasuruan telah mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan pendekatan berbasis bukti, sehingga kebijakan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur riset, penciptaan ekosistem yang mendukung inovasi, serta penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan daya saing daerah serta mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah memiliki tujuan besar, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman strategis, tetapi juga menjadi pendorong utama pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis riset dan inovasi.

I.2 Dasar Hukum

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8) Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17) Peraturan Daerah No 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029
18) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No …… Tentang Rencana Induk dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan utama dari aktivitas ini adalah menyusun Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK Kabupaten Pasuruan untuk periode 2026–2030. Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman strategis untuk menciptakan keterpaduan, keberlanjutan, serta ketepatan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Adapun tujuan-tujuan rinci dari penyusunan dokumen ini meliputi:

1. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk analisis kondisi terkini dan capaian yang telah diraih.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan tema-tema prioritas yang menjadi fokus utama riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan untuk mendukung arah pembangunan daerah.
3. Mengungkapkan tantangan-tantangan serta peluang yang ada dalam pengembangan riset dan inovasi, khususnya yang relevan dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Pasuruan.
4. Menguraikan kesenjangan yang ada antara kebijakan berbasis bukti dengan ekosistem riset dan inovasi, serta memberikan solusi untuk menutup kesenjangan tersebut.
5. Merumuskan strategi yang konkret dan terukur untuk memajukan riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6. Menyusun peta jalan yang mencakup program-program prioritas di bidang riset dan inovasi daerah, dengan memastikan relevansi, keterpaduan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan dokumen ini diharapkan menjadi tolok ukur penting untuk mendukung program pembangunan yang berbasis pengetahuan dan inovasi di tingkat daerah, sehingga bisa memberikan manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

I.4 Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kedudukan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) adalah sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD, hal ini sejajar dengan beberapa dokumen lain seperti KLHS, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun berkenaan, Hasil evaluasi pembangunan selama 5 tahun terakhir, dan dokumen perencanaan lainnya yang dihasilkan oleh sektoral lainnya. Seperti tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, disajikan hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana gambar berikut ini:

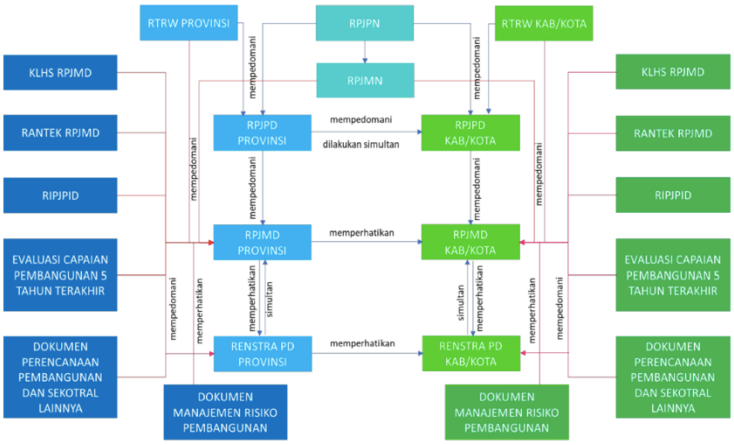

Gambar 1. 1Hubungan antar dokumen perencanaan

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah paling sedikit memuat (Pasal 28 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah):

1) gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
2) gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
3) permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
4) tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
5) tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
6) analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
7) strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
8) peta jalan Riset dan Inovasi di daerah

I.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan peraturan BRIN sebagaimana muatan isi minimum rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah, maka dokumen ini memiliki struktur penulisan sebagai berikut (sesuai lampiran II Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah):

1) BAB I PENDAHULUAN

   Bab I berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

2) BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

   Bab II berisi tentang gambaran umum wilayah, kondisi riset dan inovasi, dan tema prioritas di Kabupaten Pasuruan.

3) BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

   Bab III berisi tentang tantangan dan peluang pelaksanaan riset dan inovasi di daerah Kabupaten Pasuruan.

4) BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

   Bab IV berisi tentang analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang terdiri dari enam elemen ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan.

5) BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

   Bab V berisi tentang strategi penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Pasuruan sesuai analisis kesenjangan dalam enam elemen ekosistem riset dan inovasi di daerah.

6) BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

   Bab VI berisi tentang peta jalan riset dan inovasi di daerah Kabupaten Pasuruan dalam periode 2024-2029 yang mencakup seluruh perangkat daerah.

7) BAB VII BAB VII INDIKASI PROGRAM RISET DAN INOVASI

   BAB VII berisi tentang indikasi program riset dan inovasi untuk mendukung Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) Indikasi Program Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD) Indikasi Program Permasalahan Utama Daerah

8) BAB VIII PENUTUP

   Bab VIII berisi tentang kesimpulan, saran, dan tindak lanjut akademis

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

II.1 Gambaran Umum Daerah

II.1.1 Aspek Geografis

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" 112°34'29.31" - 113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 149.332 Ha dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi: Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo Sebelah Selatan : Kabupaten Malang Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu Wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam wilayah adminsitratif sebanyak 24 kecamatan dan 341 desa/kelurahan sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan		Luas Wilayah	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Bangil	11	4	4,413	2,96%
2	Beiji	2	12	3,927	2,63%
3	Gempol		15	6,294	4,21%
4	Gondang Wetan	1	19	2,703	1,81%
5	Grati	1	14	4,676	3,13%
6	Kejayan	1	24	7,964	5,33%
7	Kraton		25	5,925	3,87%
8	Lekok		11	4,894	3,28%
9	Lumbang		12	12,281	8.22%
10	Nguling		15	4,537	3,03%
11	Pandaan	4	14	4,341	2,91%
12	Pasrepan		17	8.564	5,73%
13	Pohjentrek		9	1.241	0,83%
14	Prigen	3	11	13.060	8,75%
15	Purwodadi		13	8.782	5,88%
16	Purwosari	1	14	7.935	5,31%

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan		Luas Wilayah	Persentase terhadap Luas Kabupaten
17	Puspo		7	7.167	4,80%
18	Rejoso		16	3.525	2,36%
19	Rembang		17	5.648	3,78%
20	Sukorejo		19	5.747	3,85%
21	Tosari		8	8.240	5,52%
22	Tutur		12	8,735	5,85%
23	Winongan		18	4.279	2,87%
24	Wonorejo		15	4.465	2,99%
	Total	**24**	**341**	**149.332**	**100%**

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043, 2025

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7,30'- 8,30' Lintang Selatan dan 112o30'-113o30' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pasuruan berada di jalur regional serta jalur utama perekonomian antara Kota Surabaya, Malang Raya, dan Kabupaten Banyuwangi. Posisi strategis Kabupaten Pasuruan memberikan peluang besar untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah melalui berbagai sektor ekonomi dan sosial seperti aktivitas Peraturan Daerahgangan, investasi, dan mobilitas, sehingga mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Berikut merupakan peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan:

Gambar 2. 1Gambar wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka (2023)

II.1.2 Aspek Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun (2019-2023) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 0,11%. Secara lebih lengkap, berikut merupakan matriks perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dalam rentang tahun 2019-2023:

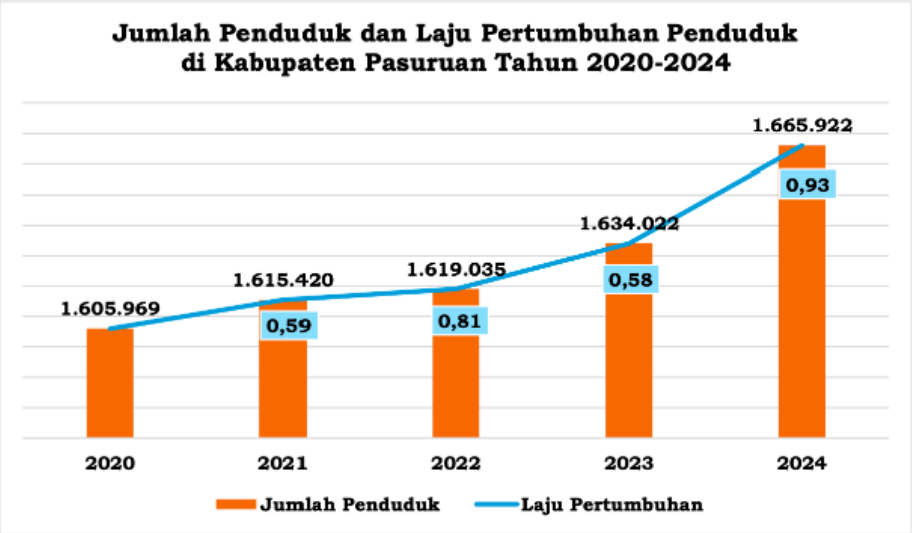

Gambar 2. 2Peta pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan

Gambar tersebut memberikan gambaran Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan mengalami perlambatan dalam lima tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persentase penduduk tahun 2023 menurut kelompok umur menempatkan kelompok usia 0-14 tahun dengan kontribusi 22,95%, kelompok usia 15-64 tahun sebesar 69,67% dan kelompok usia di >65 tahun sebanyak 7,38% terhadap keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh angka rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 43,53 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43-44 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Jika dibandingkan tahun 2019 angka ketergantungan sebesar 40,74 (data BPS Jawa Timur) maka beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin bertambah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan penduduk usia produktif dengan menekan jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui lapangan kerja formal dan informal.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Jumlah (Ribu Jiwa)
0-4	57.390	54.455	111.845

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Jumlah (Ribu Jiwa)
5-9	67.954	63.770	131.724
10-14	68.140	63.310	131.450
15-19	49.989	47.438	97.427
20-24	65.301	63.411	128.712
25-29	64.532	61.061	125.593
30-34	60.103	58.794	118.897
35-39	61.026	61.163	122.189
40-44	63.923	66.966	130.889
45-49	57.588	62.864	120.452
50-54	56.852	59.522	116.374
55-59	46.808	51.252	98.060
60-64	38.708	41.129	79.837
65-69	26.291	26.643	52.934
70-74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
Jumlah	814.762	819.260	1.634.022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika jumlah penduduk pada tahun 2023 dengan pengelompokkan umur tertinggi adalah pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk 131.724 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dengan pengelompokkan umur terendah adalah pada kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah penduduk 33.368 jiwa.

II.1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja selalu mengalami penurunan. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan pada tahun 2023, akan tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk yang menganggur menurun.

Tabel 2.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893.726	916.175	915.507	978.580
	Bekerja	Jiwa	839.861	862.062	865.336	929.470
	Pengangguran	Jiwa	53.865	54.113	50.171	49.470
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401.053	389.023	370.123	320.810
	Sekolah	Jiwa	80.310	70.415	82.044	
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247.535	258.013	237.580	
	Lainnya	Jiwa	73.208	60.595	50.499	
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	1.294.779	1.305.198	1.285.630	1.299,390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	75,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 (Jiwa)

No	Pekerjaan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366.672	378.282	391.685	397.661
2	Mengurus Rumah Tangga	230.025	238.608	246.299	249.523
3	Pelajar/Mahasiswa	235.356	224.234	213.833	208.582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16.834	16.664	16.565	16.465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189.977	189.391	189.410	189.490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.114	20.111	21.479	21.818
7	Peraturan Daerah perdagangan/Industri/ Konstruksi/Transportasi	1.862	1.814	1.844	1.839
8	Buruh Harian Lepas	8.948	9.122	11.640	12.448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/ Honorer	351.171	357.574	359.011	359.929
10	Guru/Dosen	11.896	12.306	12.524	12.693

No	Pekerjaan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	629
12	Tukang Batu/Kayu	2.149	2.184	2.650	2.730
13	Pedagang/Wiraswasta	157.972	159.497	154.107	161.038
14	Kepala/Perangkat Desa	1.186	1.152	1.106	1.089
15	Lainnya	7.123	4.629	11.244	4.807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021-2024 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya perusahan di Kabupaten Pasuruan sehingga sebagian besar penduduknya memilih untuk bekerja sebagai Karyawan Swasta, Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah Pembantu Rumah Tangga.

2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 beserta perbandingannya angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini.

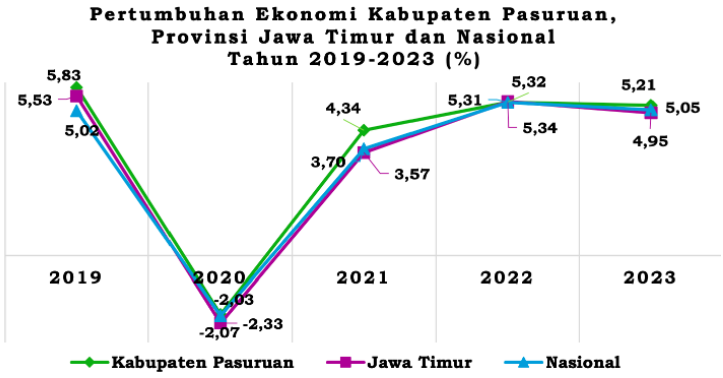

Gambar 2. 3Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun

terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi yang signifikan. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi selalu di atas angka Jawa Timur, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dan berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan selisih 0,01%. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama di tahun 2021. Akan tetapi di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional kembali mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Tren penurunan Angka Angka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan merupakan implikasi atas beberapa permasalahan seperti belum optimalnya Infrastruktur pendukung perekonomian, ketidakseimbangan ekonomi dan kurangnya inovasi dan perkembangan teknologi serta minimnya promosi produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan kabupaten serta diperlukan penguatan kelembagaan. Selain itu, penyebab lainnya adalah belum optimalnya kerja sama dengan stakeholder terkait dan kontribusi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait produk hukum yang berkaitan dengan pertumbuhan PDRB. Belum optimalnya informasi pasar dan sentra-sentra ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai jual produk unggulan Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan.:

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan indeks gini. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Tidak ada "nilai ideal" yang berlaku untuk semua kabupaten atau kota, tetapi secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan. Kabupaten atau kota dengan nilai Indeks Gini mendekati 0 cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, yang sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan sosial yang lebih baik. Namun, nilai Indeks Gini yang sangat rendah juga bisa mencerminkan adanya kesulitan dalam mengukur pendapatan secara akurat di daerah tersebut.

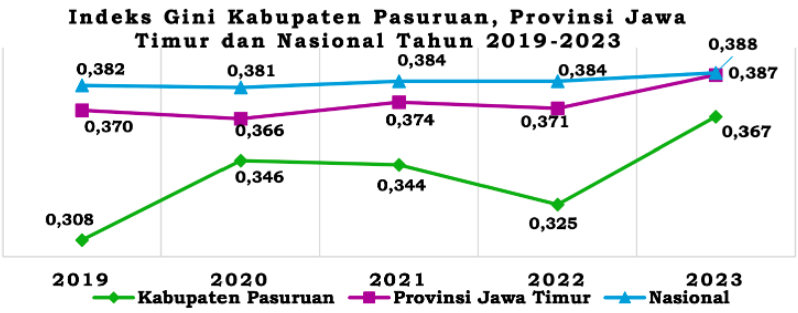

Gambar 2. 4Indeks Gini Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional.

Pembahasan selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan menurut BPS merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non- makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non- makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan

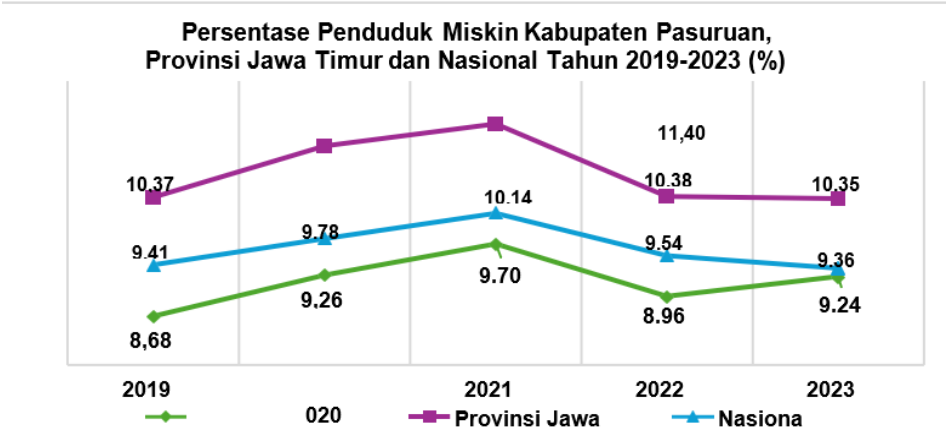

Gambar 2. 5Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar diatas. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian pada tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dikarenakan adanya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Selain itu meningkatnya garis kemiskinan sebagaimana dalam tabel dibawah yang tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan juga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.

Tabel 2.5 Penduduk Miskin 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	141,09	151,43	159,78	148,62	154,09
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	335.653	355.299	368.686	394.016	429.624
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,56	1,15	1,17	1,29	1,22
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,23	0,24	0,29	0,26

II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing, meliputi: daya saing perekonomian daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur, dan daya saing investasi. Daya saing perekonomian daerah dilambangkan dengan PDRB, dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha.

Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PDRB ADHK 5 (lima) terbesar yaitu: (1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Peraturan Daerahgangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun demikian, kelima lapangan usaha tersebut tidak secara konsisten pula memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.6 Bidang Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,47%	0,41%	1,46%	5,37%	5,12%	4,94%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,61%	4,19%	3,99%	0,45%	0,44%	0,44%
3	Industri Pengolahan	5,27%	5,41%	4,98%	60,54%	60,59 %	60,47%

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,51%	8,26%	28,81%	0,72%	0,74%	0,90%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,30%	1,05%	5,15%	0,04%	0,04%	0,04%
6	Konstruksi	0,32%	4,89%	4,57%	11,09%	11,04 %	10,97%
7	Peraturan Daerahgangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,08%	6,98%	5,76%	9,87%	10,02 %	10,07%
8	Transportasi dan Pergudangan	6,31%	14,19%	10,41%	0,63%	0,68%	0,72%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,12%	10,40%	8,73%	3,14%	3,30%	3,41%
10	Informasi Komunikasi	6,29%	4,34%	6,97%	3,84%	3,81%	3,87%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97%	1,17%	3,49%	0,74%	0,71%	0,70%
12	Real Estate	1,25%	4,18%	3,23%	0,74%	0,73%	0,72%
13	Jasa Perusahaan	1,68%	2,61%	6,46%	0,09%	0,09%	0,09%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,04%	1,83%	0,85%	0,99%	0,93%	0,89%
15	Jasa Pendidikan	0,17%	0,96%	3,10%	0,68%	0,64%	0,63%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,40%	4,45%	4,00%	0,18%	0,18%	0,18%
17	Jasa Lainnya	3,26%	11,78%	8,94%	0,89%	0,94%	0,98%

Lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami

penurunan persentase kontribusi seiring nilai pertumbuhan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya program-program pemerintah yang berfokus di subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya perbaikan dalam sistem agribisnis, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta pembatasan dalam pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Salah satu karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan umumnya bekerja di sektor pertanian, sehingga apabila sektor pertanian semakin tergerus pertumbuhannya akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi ke dalam sektor tersebut. Kondisi serupa terjadi pada kategori Kontruksi yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan persentase kontribusi terhadap PDRB semakin menurun. Hal berkebalikan terjadi pada kategori Peraturan Daerahgangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang semakin menurun, akan tetapi kontribusi terhadap struktur PDRB ADHK semakin bertambah.

Sementara itu Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 beserta perbandingannya angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini.

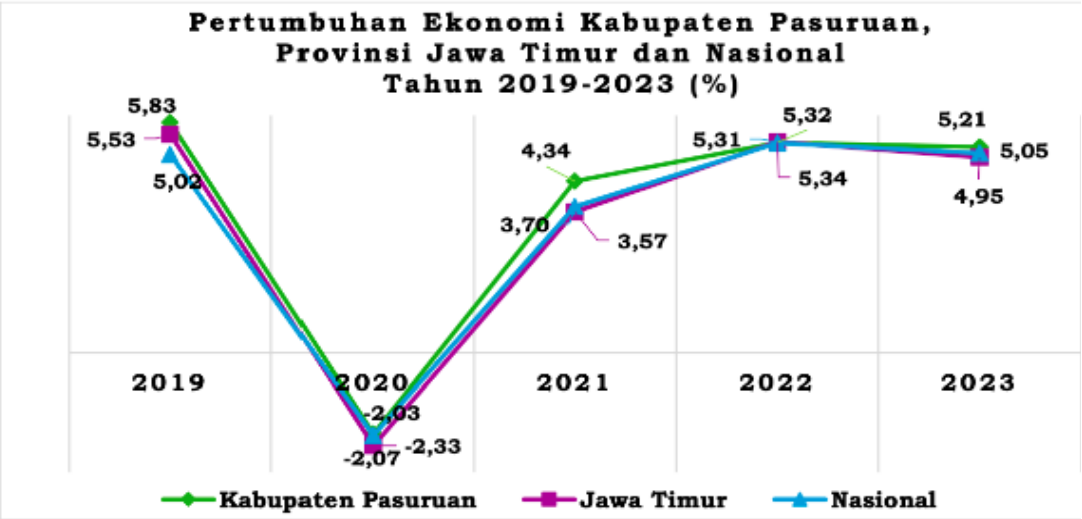

Gambar 2. 6Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi yang signifikan. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi selalu di atas angka Jawa Timur, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dan berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan selisih

0,01%. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama di tahun 2021. Akan tetapi di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional kembali mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Tren penurunan Angka Angka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan merupakan implikasi atas beberapa permasalahan seperti belum optimalnya Infrastruktur pendukung perekonomian, ketidakseimbangan ekonomi dan kurangnya inovasi dan perkembangan teknologi serta minimnya promosi produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan kabupaten serta diperlukan penguatan kelembagaan. Selain itu, penyebab lainnya adalah belum optimalnya kerja sama dengan stakeholder terkait dan kontribusi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait produk hukum yang berkaitan dengan pertumbuhan PDRB. Belum optimalnya informasi pasar dan sentra-sentra ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai jual produk unggulan Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, aspek sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten Pasuruan. Sumber Daya manusia diukur menggunakan Indeks Pendidikan, Angka Literasi dan Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM, yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019 mencapai nilai 0,579 dan pada tahun 2023 dengan nilai 0,603.

Angka literasi dan Numerasi adalah indikator untuk mengukur tingkat kemampuan baca-tulis dan hitung masyarakat. Di Kabupaten Pasuruan mulai dari tingkat SD/MI dan SMP/MTS mengalami peningkatan mulai dari tahun 2021-2023. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa standar kompetensi minimum pada asesmen untuk literasi membaca tingkat SD/MI tahun 2021 mencapai persentase 64,39% dan pada tahun 2023 mencapai persentase 77,35%. Data lainnya menunjukkan bahwa standar kompetensi minimum pada asesmen untuk literasi membaca tingkat SMP/MTS pada tahun 2021 mencapai 59,73% dan pada tahun 2023 mencapai persentase 75,31%. Selain itu, standar kompetensi minimum pada asesmen untuk numerasi tingkat SD/MI pada tahun 2021 mencapai persentase 45,11% dan pada tahun 2023 mencapai

persentase 74,40%. data yang sama terkait standar kompetensi minimum pada asesmen untuk numerasi tingkat SMP/MTS pada tahun 2021 mencapai persentase 42,71% dan pada tahun 2023 72,09%. Peningkatan tersebut mengartikan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat dan pengembangan literasi secara keseluruhan di wilayah.lah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat dan pengembangan literasi secara keseluruhan di wilayah. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai nilai 8,07, pada tahun 2022 mencapai nilai 8,40 dan pada tahun 2023 mencapai nilai 10,01. Data dari Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tersebut menandakan adanya peningkatan terkait indeks tersebut di Kabupaten Pasuruan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 memiliki capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Penurunan TPAK hanya terjadi satu kali yaitu di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Semula pada tahun 2019 capaian TPAK berada pada angka 68,64 kemudian turun pada tahun 2020 ke angka 67,67 dan selalu meningkat pada tahun 2021-2023 dengan angka 69,03 70,19 dan 71,21. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat.

Angka Ketergantungan, Rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024 menunjukkan bahwa adanya peningkatan Rasio ketergantungan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang artinya semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). pada tahun 2019 berada di angka 39,33 dan

pada tahun 2025 berada diangka 43,53. Peningkatan angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk usia tidak produktif yang ditanggung atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2017-2021 maupun 2022-2023 mengalami kenaikan meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80).

Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten Pasuruan. Infrastruktur memiliki peran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Indikator ini merupakan indikator baru dalam perhitungan infrastruktur Kabupaten Pasuruan untuk 20 tahun kedepan yang dimulai dari 2022. Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan dimulai dari tahun 2022 dengan nilai 11,57. Pada tahun 2023, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dengan capaian 38,59.

Selain itu, aspek daya saing investasi juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten Pasuruan. Untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Pasuruan, kondisi keamanan dan ketertiban umum di suatu wilayah harus ditingkatkan. Kondisi tersebut dapat diketahui dengan gambaran tentang penanganan Peraturan Daerah dan gangguan trantibum. Seluruh pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan trantibum yang terjadi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 dan 2023 telah berhasil diselesaikan. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan trantibum masih cukup tinggi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat atas ketentraman dan ketertiban yang dibuktikan dengan berkurangnya kegiatan siskamling (sistem keamanan lingkungan) di Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, Skor IDSD Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar 3,18 dimana nilai tertinggi didukung oleh Pilar Infrastruktur dan Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, sedangkan aspek terendah yang mendukung daya saing Kabupaten Pasuruan adalah

Pilar Pasar Produk. Sedangkan pada tahun 2023, skor IDSD Kabupaten Pasuruan tidak terhitung dikarenakan terdapat nilai Pilar Sistem Keuangan yang ketersediaan datanya kosong. Meskipun demikian, jika dilihat skor capaian tiap pilarnya rata- rata mengalami peningkatan mengalami sedikit penurunan yaitu mencapai 3,14. Jika dibandingkan dengan capaian IDSD Provinsi Jawa Timur dan Nasional, nilai IDSD Kabupaten Pasuruan masih berada di bawahnya.

II.1.5 Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan komoditas, barang, atau jasa yang menjadi andalan suatu daerah karena memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan produk lain. PUD dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam, budaya, atau keahlian khas daerah, serta kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penentuan PUD mempertimbangkan program prioritas Bupati Pasuruan terpilih sebagai berikut:

Tabel 2.7 Program Prioritas Bupati Pasuruan

1	Beasiswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu
2	Klinik kesehatan / ambulance untuk pondok pesantren
3	Santripreneur/ Wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren
4	Dukungan Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU)
5	Bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
6	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal
7	Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan
8	Peningkatan layanan UHC dan ambulance gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan
9	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (Orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
10	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming, dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
11	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya)

	untuk petani tambak dan nelayan
12	IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
13	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
14	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
15	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
16	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa secara merata
17	Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, RT/RW, Kader Desa, Linmas dan BPD)
18	Penciptaan Lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan
19	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan
20	Pengembangan Pusat Lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik Nasional maupun Internasional
21	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk unggulan/Produk UMKM
22	Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
23	Fasilitasi Temu Usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan dan BUMDES)
24	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di setiap Kecamatan
25	1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Olahraga atau Sepakbola
26	Persekabpas Naik Kelas
27	Penataan Kawasan Ibukota Bangil
28	Revitalisasi Pasar Tradisional
29	Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representative
30	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
31	Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor
32	Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja buruh
33	Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Selain itu, Pengembangan PUD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat branding daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah biasanya menetapkan PUD melalui kajian mendalam yang melibatkan dinas terkait kemudian memasukkannya sebagai program prioritas dalam RPJMD atau dokumen perencanaan lainnya. Dengan fokus pada PUD, diharapkan daerah dapat memaksimalkan potensi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal.

1. Penguatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Sektor Produktif

Program pengembangan seni budaya berbasis kearifan lokal pada program prioritas nomor 2 dan Santripreneur pada program prioritas nomor 3 dirancang untuk menciptakan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dengan melestarikan budaya lokal sekaligus menciptakan wirausaha baru di pesantren, program ini membuka lapangan kerja berbasis potensi daerah. Program ini diperkuat dengan kemudahan perizinan berusaha (no.12) dan fasilitasi temu usaha (no.29) yang menghubungkan pelaku ekonomi lokal dengan industri besar.

2. Perlindungan Sosial dan Peningkatan Akses Kesehatan

Program Perlinsos (no.5) dan layanan kesehatan universal (No.4,21,22) memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Klinik kesehatan pesantren dan RS NU memperluas akses layanan kesehatan dasar, sementara ambulans gratis menjamin mobilitas pasien miskin. Beasiswa untuk anak tidak mampu (no.20) memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

Pembangunan infrastruktur (No.6,7,8,9,10) difokuskan pada sektor produktif pertanian, perikanan, dan peternakan. Penyediaan IPAL komunal, biogas, dan jalan produksi menurunkan biaya operasional petani. Penataan kawasan kumuh dan nelayan meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir, sementara pengelolaan air bersih dan anti banjir melindungi aset ekonomi warga miskin.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Daya Saing UMKM

Pasuruan Coaching and Creativity (no.13) bersama sertifikasi profesi (no.19) meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Program UMK naik kelas (no.26) dan revitalisasi pasar tradisional (no.15) memperkuat posisi pelaku usaha kecil. Dukungan teknologi pertanian (no.25) melalui eco farming dan petani milenial mengoptimalkan hasil

pertanian.

5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi layanan publik (no.32) meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat miskin. Bantuan keuangan desa (no.33) memastikan pembangunan merata di tingkat grassroots. Optimalisasi organisasi pengusaha dan serikat pekerja (no.17) melindungi hak-hak pekerja, sementara peningkatan kesejahteraan aparatur (no.30) dan pendidik (no.23) memperkuat kualitas pelayanan publik.

6. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Sektor Strategis

Program khusus penciptaan lapangan kerja (no.11) dipadukan dengan pengembangan RTH (no.14) yang menciptakan ekonomi kreatif di perkotaan. Peningkatan sarpras pendidikan dan kesehatan (no.24) menyiapkan SDM berkualitas untuk bersaing di pasar kerja. Sinergi BUMDes dengan industri (no.29) memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Dengan pendekatan multidimensi ini, seluruh program prioritas saling terkait membentuk ekosistem pengentasan kemiskinan yang holistik, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas SDM, yang secara sistematis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berikut rekapitulasi program Super Prioritas bupati pasuruan:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Program Super Prioritas Bupati Pasuruan

Program Super Prioritas	Keterangan
Santripreneur/ Wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren	Betuk Usaha Baru
Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming, dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani	Pertanian
Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Perikanan
IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	Peternakan
Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	Pertanian; Peternakan
Penciptaan Lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan	Tenaga Kerja
Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	Betuk Usaha Baru
Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk unggulan/Produk UMKM	Betuk Usaha Baru
Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor	Pertanian; Peternakan
Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah	Betuk Usaha Baru

Program-program super prioritas Kabupaten Pasuruan dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan secara komprehensif, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial, termasuk sektor pertanian padi. Salah satunya adalah program Santripreneur/wirausaha baru dan hibah produktif berbasis pesantren, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru di kalangan santri, tetapi juga mendorong inovasi pertanian padi melalui pelatihan teknologi budidaya modern. Dengan memberikan modal usaha dan pendampingan, program ini dapat

mengoptimalkan produksi padi sekaligus membuka peluang usaha berbasis olahan beras, seperti industri pangan lokal, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan petani.

Selain itu, program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, juga menyasar petani padi yang termasuk dalam kategori miskin. Bantuan sosial ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung kegiatan pertanian, seperti pembelian benih unggul atau pupuk. Dengan demikian, petani padi yang rentan secara ekonomi tetap dapat mempertahankan produktivitasnya, mencegah penurunan hasil panen yang dapat memperburuk kemiskinan di pedesaan.

Pembangunan infrastruktur seperti IPAL komunal, biogas, dan mandiri pakan untuk peternak serta peningkatan jalan menuju pusat produksi sangat berdampak pada sektor pertanian padi. Jalan yang memadai mempermudah distribusi hasil panen padi ke pasar, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan pendapatan petani. Sementara itu, teknologi biogas dari limbah pertanian dapat menjadi sumber energi alternatif untuk pengeringan padi, menekan biaya produksi. IPAL komunal juga membantu pengelolaan limbah pertanian secara berkelanjutan, mendukung ekosistem pertanian yang lebih efisien.

Program Pasuruan Coaching and Creativity serta UMK naik kelas berbasis potensi unggulan daerah turut mendorong pengembangan sektor pertanian padi. Pelatihan kreativitas bagi pemuda dapat diarahkan pada inovasi pengolahan padi, seperti pembuatan produk turunan beras (mie beras, tepung, atau makanan instan) yang bernilai tambah. Sertifikasi produk padi unggulan juga akan meningkatkan daya saing di pasar nasional bahkan ekspor. Dengan begitu, petani dan pelaku UMKM berbasis padi dapat menaikkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor hilir pertanian.

Berdasarkan Analisa di atas maka dapat diusulkan beberapa potensi Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Utama Daerah. Kabupaten Pasuruan memiliki berbagai produk unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Di sektor usaha kreatif, kerajinan bordir menjadi produk Kabupaten Pasuruan yang memiliki nilai seni dan ekonomi tinggi. Di sektor pertanian terdapat komoditas padi yang menjadi andalan yang didukung dengan kondisi geografis yang ideal, terutama di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali Puspo, Tutur dan Tosari. Di sektor peternakan fokus pada produksi daging yang telah terbukti terus memberikan hasil produksi yang unggul. Sementara di sektor perikanan mengandalkan budidaya lele yang sudah familiar di kalangan pembudidaya. Terakhir, sektor pariwisata juga berkembang dengan

mengangkat kuliner utama dan khas tradisional sebagai daya tarik utama.

Selain itu, terdapat aspek legal kelembagaan tentang ketahanan pangan daerah sebagai salah satu dasar penentuan PUD dan permasalahan utama daerah sebagai berikut. Fokus pada padi dan daging di Kabupaten Pasuruan bukan hanya berdasarkan kebutuhan dasar pangan masyarakat, tetapi juga memiliki dasar legal yang kuat serta potensi daerah yang sangat mendukung. Berikut adalah alasan mengapa kedua sektor ini dipilih sebagai prioritas dalam program ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025), ada beberapa poin penting yang mengatur pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional yang juga berlaku bagi daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan:

Surat Edaran Bersama (SEB) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di tingkat daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. SEB ini mengatur kewajiban kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, memastikan bahwa Program Strategis Nasional yang terkait dengan ketahanan pangan—seperti pengadaan gabah/beras dalam negeri dan penyaluran cadangan beras pemerintah—dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

Selain itu, SEB ini bertujuan untuk memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadikan PSN sebagai bagian dari program kerja pemerintah daerah, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. SEB ini juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan program ini, untuk mengidentifikasi capaian serta hambatan yang ada, dan memberikan saran perbaikan agar program strategis dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, SEB ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional.

Surat Edaran Bersama (SEB) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di tingkat daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. SEB ini mengatur kewajiban kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan

nasional, memastikan bahwa Program Strategis Nasional yang terkait dengan ketahanan pangan—seperti pengadaan gabah/beras dalam negeri dan penyaluran cadangan beras pemerintah—dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

Selain itu, SEB ini bertujuan untuk memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadikan PSN sebagai bagian dari program kerja pemerintah daerah, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. SEB ini juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan program ini, untuk mengidentifikasi capaian serta hambatan yang ada, dan memberikan saran perbaikan agar program strategis dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, SEB ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional.

Program Strategis Nasional (PSN): Dalam PSN, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas yang jelas. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyelaraskan program-program ketahanan pangan dengan sasaran pembangunan nasional, seperti pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.

Dengan adanya dasar hukum yang mendukung dari pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional, serta potensi besar yang dimiliki Kabupaten Pasuruan dalam sektor padi dan daging, fokus pada kedua sektor ini menjadi sangat relevan dan strategis. Padi akan memperkuat ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan beras lokal, sementara sektor daging akan memastikan keberagaman pangan yang kaya protein untuk masyarakat. Program-program terkait padi dan daging ini akan mendukung pencapaian tujuan nasional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Pasuruan.

Berikut adalah usulan PUD sesuai dengan *Kajian Produk Unggulan Daerah*:

1. Usaha Bordir

   Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar dalam industri bordir, yang digerakkan oleh para pengrajin terampil dan kreatif. Hasil bordiran Pasuruan tidak hanya berupa hiasan tradisional, tetapi juga dikembangkan menjadi produk fashion modern seperti pakaian, tas, dan aksesoris bernilai seni tinggi. Sentra-sentra bordir tersebar di beberapa kecamatan, menjadi salah satu penopang ekonomi kreatif lokal.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendorong pengembangan usaha ini melalui pelatihan desain, akses pemasaran digital, dan pendampingan bisnis agar produk bordir Pasuruan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

2. Usaha Pertanian: Padi

Sektor pertanian Pasuruan dikembangkan melalui pendekatan agribisnis modern yang mengoptimalkan potensi lokal. Hampir seluruh Kecamatan yang ada di kabupaten Pasuruan kecuali Puspo, Tutur dan Tosari merupakan wilayah usaha pertanian padi. Inovasi teknologi pertanian presisi dan eco-farming diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Aspek logistik mendapatkan perhatian serius melalui pembangunan infrastruktur jalan produksi yang menghubungkan sentra-sentra pertanian dengan pusat distribusi. Pemasaran produk didukung melalui revitalisasi pasar tradisional yang tidak hanya memperbaiki fisik pasar tetapi juga sistem manajemen dan pemasarannya. Kemitraan strategis dengan pelaku usaha besar dibangun untuk menjamin serapan hasil produksi, sementara bantuan desa memberikan pondasi penguatan kapasitas petani di tingkat akar rumput.

3. Usaha Peternakan Daging

Usaha peternakan daging di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar untuk menjadi produk unggulan daerah karena didukung oleh faktor alam, permintaan pasar yang stabil, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Pasuruan memiliki lahan yang cocok untuk pengembangan peternakan sapi, kambing, dan domba, baik secara tradisional maupun modern. Selain itu, tingginya konsumsi daging di Jawa Timur, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri olahan, menjamin pasar yang luas bagi peternak lokal

4. Usaha Perikanan: Lele

Budidaya lele dikembangkan dengan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, hingga pemasaran hasil. Infrastruktur pendukung seperti cold storage dan transportasi khusus dibangun untuk menjaga kualitas produk selama distribusi. Kemitraan dengan usaha pengolahan memberikan nilai tambah bagi produk peternakan, sementara bantuan desa mendorong perluasan skala usaha ke tingkat masyarakat.

5. Usaha Pariwisata: Kuliner

Pembangunan sektor pariwisata Salah satu keunggulan utama Bluder Kentang sebagai ikon kuliner Pasuruan terletak pada bahan bakunya yang istimewa, yaitu kentang varietas unggul khas Pasuruan yang tumbuh subur di lereng Gunung Bromo – Tengger - Semeru. Kentang Pasuruan memiliki karakteristik khusus - kadar pati yang tinggi tetapi tekstur tetap lembut, serta cita rasa gumit alami yang tidak dimiliki kentang dari daerah lain. Kualitas inilah yang membuat adonan Bluder Kentang memiliki tekstur lebih empuk dan rasa lebih kaya dibandingkan versi yang menggunakan kentang biasa.

Keunikan bahan baku ini didukung oleh kondisi agroekologis spesifik Pasuruan, terutama di kecamatan Tosari, Puspo, dan Tutur yang berada di ketinggian 800-1.500 mdpl. Kombinasi suhu sejuk, tanah vulkanik yang subur, serta teknik budidaya turun-temurun menghasilkan kentang dengan kualitas premium. Tidak mengherankan jika banyak pengusaha kuliner dari luar daerah kesulitan meniru keaslian rasa Bluder Kentang Pasuruan karena ketergantungannya pada bahan baku lokal ini.

Pemilihan psektor unggulan ini didasarkan pada pertimbangan matang. Pemilihan usaha bordir dan kuliner tradisional diangkat sebagai identitas budaya sekaligus peluang ekonomi kreatif. Terkait pemilihan usaha pertanian padi memanfaatkan kondisi alam Pasuruan yang sangat mendukung. Untuk peternakan, fokus pada produksi daging didasarkan pada keunggulan komoditas ini. Sementara Budidaya lele dipilih karena teknologi yang sudah dikuasai petani dan permintaan pasar yang stabil. Dengan mengoptimalkan potensi ini dan secara bersamaan mengatasi masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan, Pasuruan dapat membangun ekonomi daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Namun demikian, kabupaten ini masih menghadapi dua permasalahan utama yang menjadi tantangan besar. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi menjadi isu krusial, dimana banyak masyarakat masih kesulitan mengakses sumber daya produktif. Di sisi lain, masalah ketenagakerjaan juga muncul akibat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan usaha yang terus berkembang. Kedua masalah ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan terpadu untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan produk unggulan ini didasarkan pada pertimbangan matang. Pemilihan usaha bordir dan kuliner tradisional diangkat sebagai identitas budaya sekaligus peluang

ekonomi kreatif. Terkait pemilihan usaha pertanian padi memanfaatkan kondisi alam Pasuruan yang sangat mendukung. Untuk peternakan, fokus pada produksi daging didasarkan pada keunggulan komoditas ini. Sementara Budidaya lele dipilih karena teknologi yang sudah dikuasai petani dan permintaan pasar yang stabil. Dengan mengoptimalkan potensi ini dan secara bersamaan mengatasi masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan, Pasuruan dapat membangun ekonomi daerah yang lebih maju dan berkelanjutan..

II.1.6 Usulan Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan Utama Daerah merupakan permasalahan yang menjadi permasalahan utama suatu daerah karena memiliki urgensi yang lebih besar dari permasalahan lain nya. Permasalahan Utama Daerah dipilih berdasarkan program prioritas yang menjadi janji kampanye bupati pada periode sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penentuan PUD mempertimbangkan program prioritas Bupati Pasuruan terpilih sebagai berikut:

Tabel 2.9 Program Prioritas Bupati Pasuruan

No	Program Prioritas Bupati
2	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
3	Santripreneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis ponpes
4	Peningkatan layanan UHC dan ambulan gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan
5	Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
6	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan
7	IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
8	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukunag infrastruktur menuju daerah wisata.
9	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
10	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
11	Penciptaan lapangan kerja baru dengan memprioritaskan naker asli pasuruan
12	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan

	saling menguntungkan
13	Pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekraf dan sertifikasi produk unggulan/produk UMKM
14	RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan
15	Revitalisasi pasar tradisional
17	Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh
19	Pengembangan pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional
20	Beasiswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu
21	Klinik Kesehatan/ambulans untuk pondok pesantren
22	Dukungan Pembangunan dan operasional RS NU
23	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun nonformal
24	Peningkatan kualitas sarpras, akses, serta kualitas SDM pendidikan dan Kesehatan
25	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
26	UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
29	Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (kelompok tani, ternak, nelayan) dan BUMDES
30	Peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa (perangkat desa, RT/RW, kader desa, linmas, BPD)
32	Digitalisasi layanan public, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE
33	Bantuan keuangan khusus untuk desa secara merata

Selain itu, Pengembangan PUD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat branding daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah biasanya menetapkan PUD melalui kajian mendalam yang melibatkan dinas terkait kemudian memasukkannya sebagai program prioritas dalam RPJMD atau dokumen perencanaan lainnya. Dengan fokus pada PUD, diharapkan daerah dapat memaksimalkan potensi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal.

1. Penguatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Sektor Produktif

Program pengembangan seni budaya berbasis kearifan lokal pada program prioritas nomor 2 dan Santripreneur pada program prioritas nomor 3 dirancang untuk menciptakan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dengan melestarikan budaya lokal sekaligus menciptakan wirausaha baru di pesantren, program ini membuka lapangan

kerja berbasis potensi daerah. Program ini diperkuat dengan kemudahan perizinan berusaha (no.12) dan fasilitasi temu usaha (no.29) yang menghubungkan pelaku ekonomi lokal dengan industri besar.

2. Perlindungan Sosial dan Peningkatan Akses Kesehatan

Program Perlinsos (no.5) dan layanan kesehatan universal (No.4,21,22) memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Klinik kesehatan pesantren dan RS NU memperluas akses layanan kesehatan dasar, sementara ambulans gratis menjamin mobilitas pasien miskin. Beasiswa untuk anak tidak mampu (no.20) memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

Pembangunan infrastruktur (No.6,7,8,9,10) difokuskan pada sektor produktif pertanian, perikanan, dan peternakan. Penyediaan IPAL komunal, biogas, dan jalan produksi menurunkan biaya operasional petani. Penataan kawasan kumuh dan nelayan meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir, sementara pengelolaan air bersih dan anti banjir melindungi aset ekonomi warga miskin.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Daya Saing UMKM

Pasuruan Coaching and Creativity (no.13) bersama sertifikasi profesi (no.19) meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Program UMK naik kelas (no.26) dan revitalisasi pasar tradisional (no.15) memperkuat posisi pelaku usaha kecil. Dukungan teknologi pertanian (no.25) melalui eco farming dan petani milenial mengoptimalkan hasil pertanian.

5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi layanan publik (no.32) meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat miskin. Bantuan keuangan desa (no.33) memastikan pembangunan merata di tingkat grassroots. Optimalisasi organisasi pengusaha dan serikat pekerja (no.17) melindungi hak-hak pekerja, sementara peningkatan kesejahteraan aparatur (no.30) dan pendidik (no.23) memperkuat kualitas pelayanan publik.

6. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Sektor Strategis

Program khusus penciptaan lapangan kerja (no.11) dipadukan dengan pengembangan RTH (no.14) yang menciptakan ekonomi kreatif di perkotaan. Peningkatan sarpras pendidikan dan kesehatan (no.24) menyiapkan SDM berkualitas untuk bersaing di pasar kerja. Sinergi BUMDes dengan industri (no.29) memperkuat

ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Dengan pendekatan multidimensi ini, seluruh program prioritas saling terkait membentuk ekosistem pengentasan kemiskinan yang holistik, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas SDM, yang secara sistematis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan analisis Program Prioritas Kabupaten Pasuruan maka diusulkan dua permasalahan utama daerah.

1. Kemiskinan

Upaya pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penghapusan kemiskinan (*no poverty*) merupakan Tujan/Goals I dalam SDG's "Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu agenda utama demi mengakhiri segala bentuk jenis kemiskinan." Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

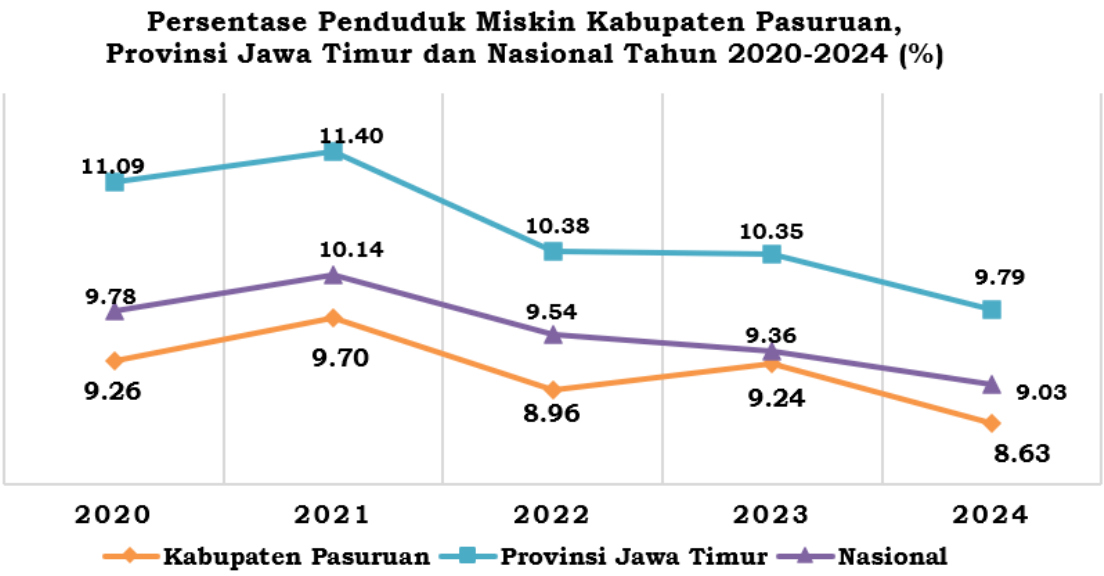

Gambar 2. 7Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional tanun 2020-2024

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional (gambar 2.15). Penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, bersamaan dengan penurunan persentase kemiskinan (tabel 2.19), menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Namun, peningkatan garis kemiskinan dapat mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, standar hidup yang lebih tinggi juga diperlukan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang tersisa.

Tabel 2.10 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan juga cenderung lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tingkat kemiskinan cenderung berfluktuasi dan kondisinya cenderung turun, di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Namun hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam

pembangunan di masa mendatang agar tingkat kemiskinan dapat ditekan lagi.

2. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.16 dibawah ini.

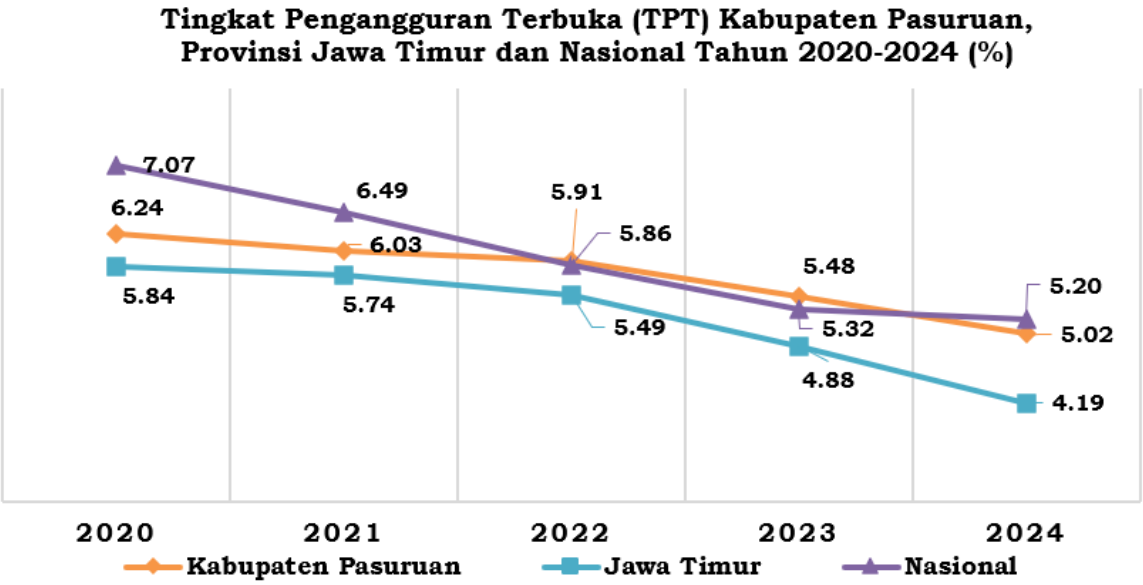

Gambar 2. 8Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2024

(Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan (gambar 2.16) menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar kerja, meskipun masih ada tantangan karena tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah ini Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia keerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat

memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Adapun capaian TPAK Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui gambar berikut :

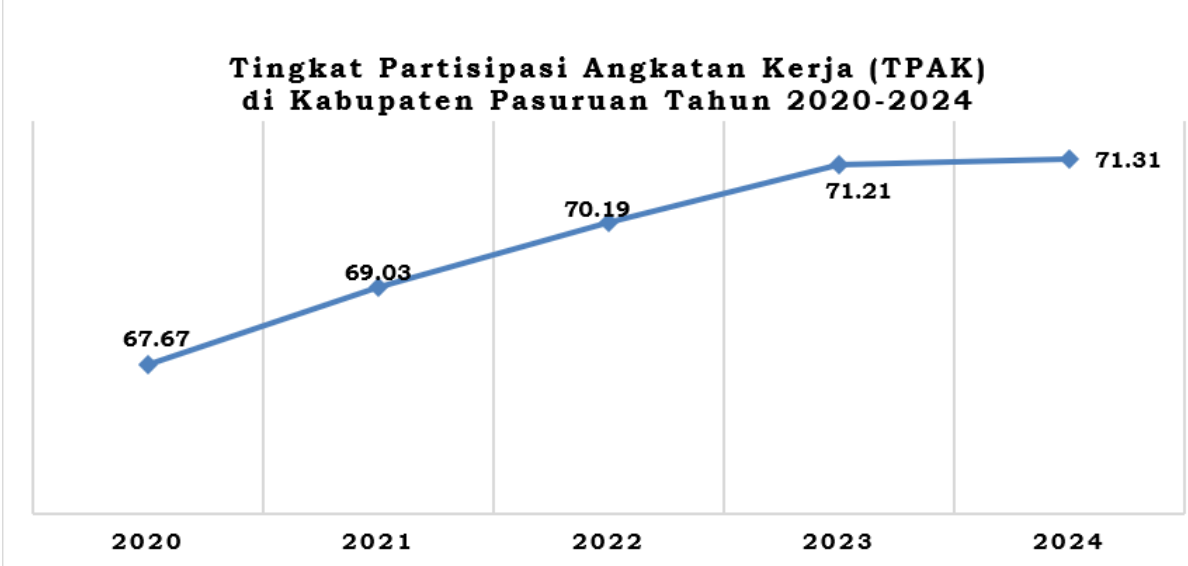

Gambar 2. 9Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Pasuruan

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025)

Gambar diatas menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 memiliki capaian yang selalu meningkat. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan beberapa hal positif terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat juga.

Pelaksanaan pelayanan urusan ketenagakerjaan diukur dengan indikator urusan ketenagakerjaan dalam periode tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	75	80	93,36	93,46	94,33
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (%)	80	100	100	9,23	77,65

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	43,44	41,06	40,47	40,67	44,27
4	Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran (%)	80	80	94	82	n/a
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal (%)	-	-	-	37	n/a

Keterangan: Indikator mulai dihitung tahun 2023
n/a = data belum rilis
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat masing-masing capaian indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami tren peningkatan yang relatif signifikan pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
b. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), mengalami peningkatan pada tahun 2024.
c. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota, menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya tingkat daya saing pencari kerja sehingga belum dapat memenuhi kualifikasi lowongan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Persentase Penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meskipun capaian di tahun 2023 menurun hingga di angka 82%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya fungsi dan peran serikat pekerja/buruh sebagai media komunikasi/perantara antara buruh dengan pengusaha.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah: Adanya isu Pelemahan Ekonomi Global sehingga meskipun tidak sebanyak saat terjadi

Covid 19, masih terdapat perusahaan yang melakukan penyesuain jumlah tenaga kerja; Faktor kualitas pencari kerja yang masih belum sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Perusahaan.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diantaranya:

a. Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
b. Melaksanakan program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (peyebarluasakan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan skill, kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri *(link and match*) serta sertifikasi pencari kerja.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan cenderung berada di atas angka Provinsi Jawa Timur dan di beberapa tahun lebih rendah dari angka nasional. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan dalam 2 tahun terakhir, namun penurunannya tidak setinggi Jawa Timur dan Nasional, sehingga tingkat pengangguran Kabupaten Pasuruan pada tahun terakhir justru lebih tinggi. Di masa mendatang, pembangunan daerah harus mampu menekan tingkat pengangguran terbuka ini.

Berdasarkan analaisis permasalahan di atas dapat diusulkan dua permasalahan utama daerah yaitu: Ketenagakerjaan dan Kemiskinan:

Bidang Ketenagakerjaan

Pengembangan SDM di Pasuruan dirancang sebagai sebuah sistem berkelanjutan yang mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan seni budaya dan kewirausahaan berbasis pesantren menjadi fondasi pengembangan keterampilan dasar yang kemudian dikembangkan lebih lanjut di coaching center. Sertifikasi kompetensi menjadi jembatan penting untuk memastikan tenaga kerja lokal memenuhi standar industri.

Penciptaan lapangan kerja baru difokuskan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan potensi daerah. Peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi tetapi juga

menciptakan role model bagi pengembangan karir di daerah. Digitalisasi memainkan peran krusial dalam mempertemukan supply dan demand tenaga kerja melalui platform pencocokan yang efisien.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan di Pasuruan didesain sebagai sebuah sistem komprehensif yang menangani akar masalah secara multidimensi melalui Pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur dasar. Layanan kesehatan universal dan perbaikan permukiman kumuh menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dasar masyarakat. Bantuan sosial yang terarah dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UMKM dan akses permodalan.

Pendidikan menjadi pilar utama dengan program beasiswa yang tidak hanya memberikan akses pendidikan tetapi juga menjamin keberlanjutan melalui pendampingan karir. Digitalisasi digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran dan transparansi distribusi bantuan. Pendekatan ini menciptakan escalator sosial yang memungkinkan keluarga miskin untuk naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

Sistem kesehatan di Pasuruan dibangun dengan pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi. Layanan kesehatan universal diperkuat dengan jaringan klinik pesantren dan rumah sakit NU yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sarana dan prasarana kesehatan terus ditingkatkan kualitasnya dengan fokus pada pelayanan dasar di daerah terpencil.

Perlindungan sosial tidak hanya berupa bantuan tunai tetapi juga program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi. Beasiswa pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan monitoring dan evaluasi yang akurat terhadap seluruh program perlindungan sosial.

Pembangunan infrastruktur di Pasuruan difokuskan sebagai pendukung utama aktivitas ekonomi produktif. Jalan produksi dibangun dengan standar yang memadai untuk menjamin kelancaran distribusi hasil pertanian dan peternakan. Penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu ke hilir melindungi aset produktif masyarakat dari kerusakan akibat bencana.

Penyediaan air bersih menjadi prioritas khusus untuk daerah-daerah yang selama ini mengalami kesulitan akses. Revitalisasi pasar tradisional tidak hanya memperbaiki fisik bangunan tetapi juga sistem pengelolaan dan pemasarannya. Sarana pendidikan dan kesehatan dibangun dengan standar

yang memadai untuk menjamin kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan utama daerah yang dilambangkan dengan indikator makro daerah, penyusunan permasalahan utama daerah pada rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah berdasar pada RPJMD 2024-2029 Kab Pasuruan. Dari delapan permasalahan utama daerah, dipilih dua usulan permasalahan utama daerah. Pemilihan usulan permasalahan utama daerah pada RIPJPID didasarkan pada analisis faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

II.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah

II.2.1 Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*)

Salah satu elemen penting yang perlu dianalisis dalam riset dan inovasi di daerah adalah sejauh mana daerah dapat melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi daerah, di semua sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah (32 urusan konkuren daerah).

Kemampuan ini dapat dinilai melalui tiga aspek, yaitu: (1) Sumber Daya Riset dan Inovasi Daerah, (2) Kelembagaan Iptek, dan (3) Jejaring Riset dan Inovasi Daerah.

(1) Sumber Daya Riset dan Inovasi Daerah

Sumber Daya manusia Iptek di Kabupaten Pasuruan adalah periset yang bekerja pada lembaga riset yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai mitra Pemerintah Daerah, termasuk SDM yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pasuruan. Sampai dengan tahun 2023, sebanyak 54 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 3 orang, Pegawai Tidak tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 16 orang. Jumlah seluruh pegawai BAPPERIDA dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.12 Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Jumlahnya

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	1	Pembina	1	Eselon IIIb	1
S-2	8	Pembina Utama Muda	1	Eselon II v	1
		Pembina Tk. I	1	Eselon IIIa	4
		Pembina	2	Eselon IIIb	2
		Pembina	2	JF Perencana	2
		Penata Tk. I	1	JF Peneliti	1
		Penata	1	JF Peneliti	1
S-1	9	Penata Tk. I	1	Kasubag keuangan	1
		Penata	1	Kasubag Umum	1
		Penata Tk. I	7	JF Perencana	7
SMA	14	Penata Tk. I	1	JF Perencana	1
		Penata Muda	4	JFU	4
		Penata Md Tk. I	6	JFU	8
		IX	3	JF Perencana	3
Jumlah	**36**		**36**		**36**

(Sumber: Data Kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan tahun 2023)

Tabel 2.13 Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan								
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	PTT	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	THL	6	-	-	-	-	10	-	-	16
Jumlah		6	-	-	-	-	12	-	-	18

(Sumber: data Kepegawaian BAPPERIDA Kab. Pasuruan Tahun 2023)

Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kabupaten Pasuruan merupakan infrastruktur fisik sebagai sarana penunjang perkembangan riset dan inovasi yang berbentuk fisik diantaranya adalah :

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pasuruan masih sangat minim. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan mencatat, jumlah RTH yang tersedia masih jauh dari 30 persen. Namun pemeliharaan masih tetap dilakukan pada sejumlah RTH yang sudah ada, sebut seperti Pogar Urban Forest yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil. Selain itu, alun-alun Bangil yang sudah direvitalisasi menambah RTH yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
- Gedung Sentra Produk Unggulan menjadi fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang pemasaran produk unggulan Kabupaten Pasuruan.
- Laboratorium di beberapa perangkat daerah: (1) UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan merupakan salah satu lembaga pelatihan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pengembangan kompetensi calon tenaga kerja melalui program-program pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia usaha); (2) Balai Penyuluhan Pertanian Wonorejo (masih dalam proses rehabilitasi dan binaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)

Ketindan, Malang. (3) Balai Benih Ikan (harusnya ada, di beberapa portal berita masuk sebagai UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Perikanan); (4) Uptd Kesehatan Pengelolaan Dan Perbekalan Kesehatan Bangil; (5) UPT Perbekalan Kefarmasian.

- Disamping itu terdapat Museum Kabupaten Pasuruan dan Tengger Cultural Center.
- Bentuk lain: Geoheritage yang memiliki potensi dan peluang menjadi Geopark Nasional. Diantaranya, 18 situs Geoheritage Kabupaten Pasuruan dan 5 warisan geologi standar internasional yaitu Arteis Umbulan, Ranu Grat sebagai danau Maar, Ranu Grati tebing timur Maar, Ranu Grati Tebing Selatan dan Ranu Grati Tebing barat. Selain itu 4 warisan standar nasional antaranya adalah air terjun coban Baung, mata air watu lanang, Goa Widodaren dan Arteis banyu Biru. Kawasan pegunungan juga berpotensi dan berpeluang diantaranya Gunung Bromo, Arjuno dan Welirang.

A. Program Riset dan Inovasi Daerah yang pernah dilaksanakan.

Program Penelitian dan Pengembangan Indikator Program tersebut adalah Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti, dengan target 100% dan capaian 100%. Indikator ini diukur melalui kajian penelitian yang ditindaklanjuti untuk mengukur IKU, IKD dan pembentukan peraturan perundangan, berikut kajian penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 :

a. Kajian Penanganan Limbah Peternakan Sapi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
b. Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
c. Kajian Refleksi dan Ekstrapolasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
d. Kajian Efektifitas Penurunan Persentase Stunting Melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra di Kabupaten Pasuruan
e. Kajian Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
f. Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Pasuruan
g. Kajian Perbanyakan Benih Kentang Dengan Sistem Stek
h. Kajian Pembentukan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Pasuruan

Selain menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan terdapat kegiatan Lomba Inovasi Daerah yang dilaksanakan untuk Lomba Inotek Pasuruan Maslahat Tahun 2023 menetapkan nominator :

1. Kategori Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- Fast Drug Pos (Fasilitas Antar Servis Obat di RSUD Bangil dengan Pos Indonesia)
- Bengkura Mas (Bebaskan Nguling dari Kusta Mandiri Bersama Masyarakat UOBF Puskesmas Nguling)
- Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Pasuruan (CUKUR Kab Pas) Bagian Perekonomian
- Gesang Lansia Bersama Pandawa Lima (Gerakan Sayang Lansia Bersama Pandawa Lima (UOBF Puskesmas Gondangwetan)
- Terumpah Kodha (Temukan, Rangkul, Obat, Motivasi, Pertahankan dalam Komunitas Orang dengan HIV/ AIDS) UOBF Puskesmas Grati
- Sipena Pasti (Sistem pelayanan Administrasi Kependudukan Pasien Persalinan RSUD Grati) RSUD Grati

2. Kategori Inovasi Teknologi / Non Teknologi :

- Aplikasi Bank Sampah (RESIK) Mengubah sampah menjadi uang : M. Alvin Bakhtiar
- Aplikasi Tumbas Online : Wilda Faruq
- Pasta Indigo Strobilantes : Fery Sugeng
- Piwarah Sibu (Pemijahan Ikan Wader Merah Semi Buatan) : M. Sudarmadji
- Bio Tesstifish (Hormon Bahan Madu Alami untuk meningkatkan bisnis aquakultur : Ahmad Ulum Fahmi
- Budi Cakep (Budidaya Cabai Petani Kabupaten Pasuruan) : Mashud

3. Kategori Inovasi di Bidang Pendidikan / Pembelajaran

- Pembelajaran Konservasi di Taman Edelweis Bromo Implementasi Merdeka Belajar : SMPN 2 Tosari
- Gerakan Pandai di Kabupaten Pasuruan : ITB Yadika Bangil
- Pembelajaran Inquiri Pemanfaatan Energi Alternatif Tongkol Jagung : SMPN 2 Purwosari
- Media Pembelajaran Berbasis Andrid Aplikasi MHVER (Mengenal Hewan Vertebrata) : UPT Pendidikan SDN Rembang I
- Inovasi Literasi Berbasis OPO Tumon : SMAN I Godangwetan
- Buku Digitaal Interaktif Berbasis Android Jawara Pasuruan (Cakap Berbahasa Jawa dan Madura serta Budaya Pasuruan) : SMPN 2 Gempol

Kegiatan Inovasi Government Award pada Tahun 2023 diikuti dari 134 Inovator dengan nilai kematangan diatas 85 sebanyak 47 Inovasi dengan Indeks 54,99 (Inovatif).

Bapperida mendorong inovator untuk untuk meraih banyak penghargaan, dalam rangka Rangkaian Acara Inotek Award Provinsi Jawa Timur setidaknya ada 4 penghargaan yang diterima Kabupaten Pasuruan.

B. Anggaran Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan data dari Perubahan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Renja 2024-2025 Kabupaten Pasuruan. Pendanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut.

Tabel 2. 14 Pendanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

No.	Tahun	Rencana Anggaran	Pagu Indikatif	Realisasi
1	2019	Rp. 2.445.000.000		

2	2020	Rp. 2.577.754.000	Rp.1.330.965.360	Rp. 1.329.879.220
3	2021	Rp. 2.271.500.000	Rp. 2.095.909.900	Rp. 2.084.474.890
4	2022	Rp. 2.449.858.000		
5	2023	Rp. 2.436.771.200		
6	2024		Rp. 1.712.438.700	
7	2025		Rp. 2.392.850.000	Rp.2.313.590.686

(2) Kelembagaan Iptek di Daerah saat ini

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bapperida Kabupaten Pasuruan terbentuk atas: 1. Sekretariat a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian keuangan c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 5. bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 6. UPT 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu terdapat juga Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM) namun belum terdapat organisasi penunjang inovasi, Forum Koordinasi dan Sinergitas Riset dan Inovasi Di Daerah (FKS) RIDa, dan Sentra HKI. Berdasarkan Peraturan BupatiPasuruan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa salah satu susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri atas (e) Bidang riset inovasi daerah.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 16 sebagai berikut;

1. Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedomaan pada nilai Pancasila dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedomaan pada nilai Pancasila;
   b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berpedomaan pada nilai Pancasila;
   c. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah. d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
   e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelembagaan Iptek lainnya adalah perguruan tinggi. Di Kabupaten Pasuruan ada 12 perguruan tinggi yang seluruhnya adalah perguruan tinggi swasta yakni STMIK Yadika Bangil, STIE Yadika Bangil, STIKES Arrahma Mandiri Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol, Universitas PGRI Wiranegara, Universitas Yudharta Pasuruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil, Universitas Merdeka Pasuruan, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, AKBID Sakinah Pasuruan, dan STAI Pancawahana Bangil.

(3) Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Penerapan teknologi di Kabupaten Pasuruan, khususnya di sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, holtikultur dan pariwisata, dapat didorong melalui jejaring riset. Saat ini, penerapan teknologi masih bersifat sporadis dan kurang terkoordinasi dengan kebutuhan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan badan usaha diperlukan untuk menciptakan solusi teknologi yang relevan. Dengan jejaring yang solid, transfer teknologi dapat dilakukan lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti dari luar daerah dapat menjadi bagian dari jejaring riset di Kabupaten.

Program seperti kuliah kerja nyata berbasis riset atau proyek akademik di sektor usaha atau industri, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan jejaring ini untuk mendorong pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung riset tetapi juga

menciptakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk sektor inovasi. Ke depan, jejaring riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan harus diarahkan untuk menciptakan sinergi antara riset akademik dan penerapan teknologi praktis.

Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat daerah untuk bekerja sama dalam proyek riset. Dengan fokus pada sektor unggulan seperti energi terbarukan, pertanian, holtikultur, dan ekowisata, jejaring ini dapat menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui dukungan kebijakan dan pendanaan, jejaring riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan dapat berkembang menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan.

II.2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap PUD yang diusulkan.

II.2.2.1 Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Bordir?	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Perda No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Bordir.	Satu data pasuruan sudah memuat beberapa informasi pemerintahan terkait Usaha Bordir.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha Bordir, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Bordir.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Pelatihan yang menyasar langsung ke potensi PUD Usaha Bordir belum tersedia dengan jelas.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Bordir.	
Elemen 2 : Kapasistas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan Usaha Bordir.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dan sebagainya) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Belum ada kegiatan atau website sebagai sarana melakukan pengembangan Usaha Bordir.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Bordir, dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Bordir.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Bordir. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir.	
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlombaan internal Pemkab Pasuruan. Namun belum ada keikutsertaan Usaha Bordir.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Bordir.	Sudah tersedia melalui BLK
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Bordir.	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang berkaitan dengan Usaha Bordir, secara turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Belum ada.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Bordir.	Belum ada.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Bordir.	Belum ada.
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk berbasis Usaha Bordir (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dan sebagainya).	belum ada.
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Bordir antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Kabupaten Pasuruan telah memiliki sejumlah kebijakan dasar untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi, seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena belum adanya peraturan teknis operasional dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). *Website* APIK (Aplikasi Inovasi dan Kewirausahaan) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten menjadi langkah awal yang baik, tetapi perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih informatif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Di sisi infrastruktur riset dan inovasi, Kabupaten Pasuruan belum memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM yang dapat menjadi inkubator

bagi UMKM. Meskipun ada beberapa upaya peningkatan kapasitas, seperti pelatihan. Selain itu, anggaran khusus untuk riset dan inovasi belum teralokasi dengan jelas, sementara perlindungan kekayaan intelektual (HaKI) masih rendah partisipasinya—hanya sekitar 40 UMKM dari ribuan yang terdaftar. Sosialisasi pentingnya HaKI perlu ditingkatkan, terutama bagi pelaku usaha di sektor usaha bordir.

Kolaborasi dengan lembaga riset seperti BRIN dan perguruan tinggi juga belum optimal. Sarana pendukung seperti *Website* kolaborasi riset atau proyek percontohan juga belum tersedia, sehingga menghambat diseminasi inovasi.

Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan peraturan teknis, pengembangan basis data terpadu, pembentukanUsaha, dan peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sinergi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten juga penting agar pengembangan PUD sejalan dengan RIPP Jawa Timur dan RIPIN nasional. Selain itu, kerjasama internasional dapat membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan standar produk agar lebih kompetitif di pasar global. Dengan demikian, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha olahan berbasis riset dan inovasi, asalkan didukung oleh kebijakan yang koheren, infrastruktur memadai, dan kolaborasi yang kuat.

II.2.2.2 Usaha Pertanian Padi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Pertanian Padi	Peraturan Daerah Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pertanian Padi	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Pertanian yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Pertanian Padi.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	Tidak tersedia kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pertanian Padi	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pertanian Padi.	Belum ada indikasi geografis varietas padi jelita
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Sudah bekerja sama dengan BRIN dan BRMP dalam rangka uji ketahanan terhadap hama dan penyakit
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Sudah bekerja sama dengan BRIN dan BRMP dalam rangka uji ketahanan terhadap hama dan penyakit
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pertanian Padi	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pemerintah melalui dinas telah mengadakan beberapa kegiatan pameran. Salah satu nya adalah Pasuruan Always Fresh pada 2023 di Rest Area Tosari yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Selain itu ada kegiatan YUK NONGGO yang merupakan akronim dari gerakan "Ayo Belonjo Nang Tonggo", SATRYA EMAS atau "Pusat Strategi Ekonomi Maslahat", PERWIRA "Perempuan Wira Usaha". Selain itu Pemerintah telah meresmikan Gedung Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan sebagai ruang pamer penjualan produk. bahkan Kabupaten Pasuruan telah melakukan pameran produk diluar daerah seperti AEO2022 dan PIATTEX V. Dalam skala internasional, dua diantara industri kecil menengah unggulan mewakili Kabupaten Pasuruan pada pameran Inacraft 2023 di Jakarta.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sedangkat terkait Apresiasi pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai penerima Tanda Daftar Varietas Lokal Terbanyak se-Indonesia.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pertanian Padi.	Pengukuhan DPD Tani Merdeka yanng belum lama ini di tahun 2025 telah diresmikan.Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas ketahanan pangan dan pertanian serta organisasi Perangkat Daerah siap bersinergi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pertanian Padi	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Pertanian Padi	Belum ada.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada.
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Pertanian Padi (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023, potensi keunggulan pertanian Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan standart kualitas yang diisyaratkan oleh pasar global.
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang pertanian antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Kabupaten Pasuruan telah membangun kerangka kebijakan dasar untuk mendukung riset dan inovasi di sektor pertanian melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum adanya peraturan teknis pendukung dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang spesifik. Bapperida telah mengidentifikasi beberapa produk unggulan daerah (PUD) di sektor Usaha Pertanian Padi. Sayangnya, upaya ini belum didukung oleh basis data yang terintegrasi dan sistem informasi yang memadai.

Beberapa inisiatif promosi seperti Pasuruan *Always Fresh* dan partisipasi

dalam pameran internasional Inacraft 2023 menunjukkan potensi besar produk pertanian lokal. Untuk pengembangan ke depan, diperlukan:

1. Penyusunan peraturan teknis operasional untuk implementasi kebijakan riset dan inovasi
2. Pengembangan sistem data terpadu sektor pertanian
3. Pembentukan inovasi berbasis komoditas unggulan
4. Peningkatan alokasi anggaran riset spesifik sektor pertanian
5. Penguatan kemitraan dengan lembaga riset internasional
6. Digitalisasi seluruh rantai nilai produk pertanian

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Pasuruan dapat mengoptimalkan potensi sektor pertaniannya melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi yang berkelanjutan.

II.2.2.3 Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Peternakan Daging?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Peternakan yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Usaha Peternakan Daging
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor peternakan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Peternakan Daging	Belum tersedia.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Peternakan Daging	Olahan bakso sakera
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	pada tahun 2025 belum lama ini Penandatanganan PKS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dengan dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi. terutama Peternakan Daging.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum ada

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging Selain itu, belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Peternakan Daging	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut serta dalam *event* promosi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo atau APKASI AOE 2022. dalam *event* promosi potensi daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan meramaikannya dengan aneka produk-produk unggulan makanan olahan seperti abon ayam dan sapi, *Stick* susu kambing dan sapi, *Chrispy Chicken Food*.
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Peternakan Daging	belum ada.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Peternakan Daging	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Peternakan Daging	Belum ada.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada.
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Peternakan Daging (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada.
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Peternakan Daging antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Kabupaten Pasuruan telah memiliki landasan kebijakan untuk mendukung riset dan inovasi di sektor peternakan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Namun, implementasinya masih terkendala oleh belum adanya peraturan teknis pendukung dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Bapperida dan Disperindag telah mengusulkan Produk Unggulan Daerah (PUD) di sektor peternakan, seperti susu dan daging. Namun, upaya ini belum didukung oleh basis data yang terintegrasi. Meskipun Satu Data Pasuruan dan *Website* APIK telah tersedia, informasi spesifik tentang potensi peternakan masih terbatas, terutama terkait UMKM, tenaga kerja, dan omzet. Pengembangan *platform* digital yang lebih komprehensif dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong partisipasi pelaku usaha.

Di sisi infrastruktur, Kabupaten Pasuruan belum memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) atau inkubator khusus untuk sektor peternakan. Padahal, fasilitas ini penting untuk pendampingan teknis dan pengembangan bisnis UMKM. Anggaran riset dan inovasi juga belum teralokasi secara jelas, sementara perlindungan kekayaan intelektual (HaKI) masih rendah—hanya sedikit UMKM yang mendaftarkan merek atau paten. Sosialisasi HaKI perlu digencarkan, terutama bagi Peternakan terkait Susu dan Daging.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi mulai dilakukan, seperti kerjasama Dinas Peternakan dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Namun, kemitraan dengan BRIN atau swasta masih minim. Sayangnya, sarana pendukung seperti *Website* kolaborasi riset atau proyek percontohan belum tersedia, sehingga menghambat diseminasi inovasi.

Promosi produk peternakan telah dilakukan melalui ajang seperti APKASI Expo, tetapi partisipasi dalam lomba inovasi (INOPAMAS) masih rendah. Perlunya inventarisasi kearifan lokal dan teknologi masyarakat di bidang peternakan juga belum terjawab, padahal hal ini bisa menjadi dasar pengembangan berbasis kearifan lokal. Untuk memperkuat ekosistem, langkah strategis seperti pembentukan inovasi peternakan, penyelarasan kebijakan pusat-daerah, dan peningkatan kerjasama internasional—khususnya dalam standarisasi produk—menjadi kunci. Dengan demikian, Kabupaten Pasuruan dapat mengoptimalkan potensi peternakannya melalui riset dan inovasi yang terpadu dan berkelanjutan.

II.2.2.4 Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Perikanan Lele?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Perikanan Lele.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Perikanan yaitu dalam nominasi tersebut salah satunya Usaha Perikanan Lele.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor perikanan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Perikanan Lele.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Namun sentra-sentra pembudidaya komoditi seperti ikan air tawar sudah terpetakan berdasarkan kecamatan termasuk Usaha Perikanan Lele di Kecamatan Beji.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Perikanan Lele.	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Gerai Niku Ikan Mas yang menguruai Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, tanda daftar kapal, fasilitas pengujian contoh produk olahan ikan, fasilitas sertifikasi usaha perikanan, permodalan, konsultasi penangkapan ikan dan konsultasi usaha ikan non konsumsi.
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Pada tahun 2024 Kominfo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Dinas perikanan Pasuruan dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan serta *eFishery*, yaitu mengembangkan transformasi digital untuk pembudidaya melalui *Automatic Feeder.*

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang perikanan khususnya terkait Usaha Perikanan Lele.
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Perikanan Lele.	Sudah ada CPIB terkait praktik baik perikanan
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	diselenggarakannya festival Mbakar Iwak yang digelar di Taman Dayu pada tahun 2024. pelaksanaan pameran produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan di Sentra Produk Unggulan Bangkodir Bangil dalam acara Gebyar Produk IKM. salah satunya hasil perikanan dan kelautan yang dipamerkan pada acara tersebut.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan usaha pengolahan atau produk lainnya yang berkaitan dengan perikanan. belum terdapat juga data-data prestasi dari sektor perikanan.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Perikanan Lele.	belum ada.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Perikanan Lele.	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Perikanan Lele (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	belum ada.
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Perikanan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Kabupaten Pasuruan telah memiliki landasan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri perikanan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum adanya peraturan teknis pendukung dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang spesifik. Bapperida dan Disperindag telah mengidentifikasi beberapa Produk Unggulan Daerah (PUD) di sektor Usaha Perikanan Lele. Sayangnya, upaya ini belum didukung oleh basis data yang terintegrasi. Meskipun *Website* APIK telah diluncurkan, informasi mengenai UMKM perikanan, tenaga kerja, dan omzet masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan *platform* digital yang lebih komprehensif.

Di sisi infrastruktur, Kabupaten Pasuruan belum memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) yang dapat menjadi inkubator bagi pelaku usaha perikanan. Meskipun sentra pembudidayaan seperti Lele di Kecamatan Beji telah terpetakan, dukungan riset dan inovasi masih minim. Alokasi anggaran khusus untuk riset perikanan juga belum jelas, sementara perlindungan kekayaan intelektual (HaKI) masih rendah—hanya 40 UMKM dari

ribuan yang terdaftar. Sosialisasi HaKI perlu ditingkatkan, terutama bagi pembudidaya dan pengolah produk perikanan.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan swasta mulai dilakukan, seperti kerja sama dengan *eFishery* untuk penerapan *Automatic Feeder* dalam budidaya ikan. Namun, kemitraan dengan BRIN atau lembaga riset lainnya masih terbatas, padahal potensi pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan sangat besar. Sarana pendukung seperti *Website* kolaborasi riset atau proyek percontohan juga belum tersedia, sehingga menghambat diseminasi inovasi.

Promosi produk perikanan telah dilakukan melalui festival seperti Mbakar Iwak dan pameran di Sentra Produk Unggulan Bangkodir. Namun, partisipasi dalam lomba inovasi (INOPAMAS) masih rendah. Selain itu, inventarisasi kearifan lokal dan teknologi masyarakat di bidang perikanan belum terdokumentasi dengan baik, padahal hal ini dapat menjadi dasar pengembangan berbasis kearifan lokal.

Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, langkah strategis seperti pembentukan perikanan, penyelarasan kebijakan pusat-daerah, dan peningkatan kerjasama internasional—khususnya dalam standarisasi produk—menjadi kunci. Dengan demikian, Kabupaten Pasuruan dapat mengoptimalkan potensi perikanannya melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.

II.2.2.5 Usaha Pariwisata Kuliner

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	**Indikator**	**Kondisi Saat Ini**
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Pariwisata Kuliner?	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Perda No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Satu data pasuruan sudah memuat beberapa informasi pemerintahan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Pariwisata Kuliner, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Pelatihan yang menyasar langsung ke potensi PUD Usaha Pariwisata Kuliner belum tersedia dengan jelas.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner	
Elemen 2 : kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dan sebagainya) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada kegiatan atau website sebagai sarana melakukan pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan inovasi		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner, dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pariwisata Kuliner	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlombaan internal Pemkab Pasuruan. Namun belum ada keikutsertaan Usaha Pariwisata Kuliner.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pariwisata Kuliner.	Sudah tersedia namun perlu berbasis riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata Kuliner, secara turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Pariwisata Kuliner	Belum ada
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk berbasis Usaha Pariwisata Kuliner (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dan sebagainya).	belum ada
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Pariwisata Kuliner antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Kabupaten Pasuruan telah memiliki landasan kebijakan untuk mendukung pengembangan usaha Pariwisata Kuliner melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum adanya peraturan teknis pendukung dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang spesifik. Bapperida dan Disperindag telah mengidentifikasi beberapa Produk Unggulan Daerah (PUD) di sektor Usaha Pariwisata Kuliner. Sayangnya, upaya ini belum didukung oleh basis data yang terintegrasi. Meskipun *Website* APIK telah diluncurkan, informasi mengenai UMKM kuliner, tenaga kerja, dan omzet masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan *platform* digital yang lebih komprehensif.

Di sisi infrastruktur, Kabupaten Pasuruan belum memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) yang dapat menjadi inkubator bagi pelaku usaha pariwisata kuliner. Alokasi anggaran khusus untuk riset perikanan juga belum jelas, sementara perlindungan kekayaan intelektual (HaKI) masih rendah—hanya 40 UMKM dari ribuan yang terdaftar. Sosialisasi HaKI perlu ditingkatkan, terutama bagi pembudidaya dan pengolah produk perikanan.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan swasta belum dilakukan secara maksimal. Namun, kemitraan dengan BRIN atau lembaga riset lainnya masih terbatas. Sarana pendukung seperti *Website* kolaborasi riset atau proyek

percontohan juga belum tersedia, sehingga menghambat diseminasi inovasi.

Promosi produk usaha pariwisata kuliner telah dilakukan melalui festival. Namun, partisipasi dalam lomba inovasi (INOPAMAS) masih rendah. Selain itu, inventarisasi kearifan lokal dan teknologi masyarakat di bidang perikanan belum terdokumentasi dengan baik, padahal hal ini dapat menjadi dasar pengembangan berbasis kearifan lokal.

Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, langkah strategis seperti pembentukan perikanan, penyelarasan kebijakan pusat-daerah, dan peningkatan kerjasama internasional—khususnya dalam standarisasi produk—menjadi kunci. Dengan demikian, Kabupaten Pasuruan dapat mengoptimalkan potensi pariwisatanya melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.

II.2.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap Permasalahan Utama Daerah Yang diusulkan

Berikut adalah penjabaran Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Kemiskinan dan Tenaga Kerja.

II.2.3.1 Kemiskinan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Pengentasan Kemiskinan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Terdapat fokus utama pembangunan daerah untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung pengentasan Kemiskian	Terdapat DTKS dan KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem berdasarkan by name by address sehingga lebih tepat, efektif dan efisien dalam melakukan intervensi.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan pengentasan kemiskinan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan pengentasan kemiskinan	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengentasan kemiskinan	Belum tersedia
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi		

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengentasan kemiskinan	Sudah ada kerjasama multistake holder: salah satu nya dengan organisasi kemasyarakatan. Namun perlu dikerjakan secara lebih luas
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Sudah Terdapat KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama pengentasan kemiskinan.
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan masyarakat miskin. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengentasan kemiskinan	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga pemangku pengentasan kemiskinan. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.	Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi pengentasan kemiskinan
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengentasan kemiskinan	Ada lomba INOPAMAS
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada pengentasan kemiskinan	belum ada
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengentasan kemiskinan	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. diakses.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Belum ada.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis pengentasan kemiskinan	Belum ada
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengentasan kemiskinan.	Sudah ada

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam pengentasan kemiskinan	belum ada
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengentasan kemiskinan	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam pengentasan kemiskinan antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional

II.2.3.2 Tenaga Kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung penyerapan ketenagakerjaan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung penyerapan ketenagakerjaaan	Terdapat data terpadu dalam Berita Resmi Statistik (BRS) mengenai "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Agustus 2024". Dokumen tersebut memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
		2024 beserta indikator-indikator nya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk penyerapan ketenagakerjaan.	Sudah tersedia UPT LKD Kabupaten Pasuruan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan penyerapan ketenagakerjaan.	Belum tersedia
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi		

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Belum ada
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan..	Belum ada
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama penyerapan ketenagakerjaan
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan penyedia tenaga kerja dan tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset ketenaga kerjaan.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga penyedia tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam penyerapan ketenagakerjaan..	Terdapat jobfair namun bukan pameran inovasi. Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi ketenagakerjaan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan penyerapan ketenagakerjaan.	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemkab Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan penyerapan tenaga kerja belum ada
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada penyerapan tenaga kerja	belum ada
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan penyerapan tenaga kerja.	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis penyerapan tenaga kerja	Belum ada

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam penyerapan tenaga kerja.	Sudah ada
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam penyerapan tenaga kerja	belum ada
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka penyerapan tenaga kerja	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam bidang tenaga kerja antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional

BAB III
TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan sektor dengan tujuan menciptakan dampak positif yang luas bagi penduduk setempat. Salah satu fokus utama pembangunan daerah adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan daerah juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara langsung, tetapi juga membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan daerah berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat.

Pembangunan daerah adalah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Proses tersebut melibatkan kolaborasi berbagai sektor dengan sasaran untuk memberikan dampak positif yang luas bagi penduduk setempat. Salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran secara signifikan. Selain itu, pembangunan daerah juga mencakup peningkatan akses serta kualitas layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Upaya ini tidak hanya berdampak langsung dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mampu mereduksi ketimpangan sosial yang ada, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata. Dengan demikian, pembangunan daerah memegang peranan penting dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak.

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan daerah juga berorientasi pada prinsip keberlanjutan, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Hal ini melibatkan perhatian pada pelestarian sumber daya alam, perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan limbah secara efisien, serta pelestarian ekosistem yang ada. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga institusi internasional. Pendekatan

yang melibatkan partisipasi aktif dari semua komponen ini, dan yang mempertimbangkan semua faktor secara menyeluruh, akan mampu mendorong pembangunan yang tidak hanya positif dan berdampak jangka panjang, tetapi juga berkelanjutan.

Keterkaitan antara pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sangat jelas, dimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sering menjadi salah satu tujuan utama dalam agenda pembangunan daerah. Dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terciptalah lebih banyak lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat meningkat, dan investasi dalam infrastruktur maupun layanan publik lebih memungkinkan untuk dilakukan. Dampaknya, kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik, terutama dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas perumahan yang memadai.

Sebaliknya, pembangunan daerah yang sukses juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Infrastruktur berkualitas, seperti jalan yang memadai, layanan listrik, serta sistem telekomunikasi yang andal, memungkinkan perusahaan lokal maupun internasional menjalankan operasionalnya secara lebih efisien. Di samping itu, kebijakan yang ramah investasi dan mendukung pengembangan kewirausahaan mampu menarik modal ke daerah, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dalam proses ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keberhasilan pembangunan daerah menjadi dua sisi yang saling melengkapi, menciptakan ekosistem yang saling mendukung demi pen

Riset dan inovasi memainkan peran yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Kedua elemen ini mampu membuka peluang baru, memperkuat daya saing, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui riset, sebuah daerah dapat memahami lebih dalam mengenai potensi sumber daya alam dan manusia yang tersedia. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta membantu mengidentifikasi sektor perekonomian yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan.

Sementara itu, inovasi lebih menitikberatkan pada penerapan gagasan baru, teknologi terkini, serta praktik bisnis modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan inovasi, nilai tambah dapat dihasilkan pada berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, maupun jasa. Dampaknya, selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, proses inovasi juga mampu menciptakan banyak lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memberikan kemampuan bagi daerah untuk bersaing di pasar global yang semakin

kompetitif. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan inovasi merupakan pondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Melalui riset, sebuah daerah dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi peluang ekonomi potensial, menganalisis kebutuhan pasar, serta menyusun strategi pengembangan ekonomi yang lebih relevan. Riset juga memberikan kemampuan untuk memahami tren pasar yang berubah, memprediksi tantangan dan peluang di masa depan, serta memberikan dasar ilmiah untuk pembuatan kebijakan yang relevan. Data dan hasil analisis yang dihasilkan dari riset ini sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

Di sisi lain, inovasi menjadi wahana penting untuk proses pengembangan ide, penerapan teknologi, hingga strategi pemasaran produk atau layanan yang dapat menciptakan dampak positif yang signifikan. Dengan adanya inovasi, produk atau layanan yang telah ada dapat terus ditingkatkan, memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi konsumen, sekaligus membantu daerah memperluas pangsa pasar ekonominya. Inovasi, pada dasarnya, dapat menjadi katalisator dalam proses transformasi ekonomi di tingkat daerah dengan memberikan peluang bagi sektor lokal beralih ke sektor yang lebih maju serta kompetitif, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, maupun industri kreatif.

Era globalisasi dan maraknya transformasi berbasis digital semakin menekankan pentingnya kemampuan untuk berinovasi dalam menjaga keunggulan kompetitif sebuah daerah. Inovasi yang berkelanjutan tidak hanya sekadar membantu menjaga daya saing, namun juga membuka pintu bagi berbagai peluang baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Dengan demikian, riset dan inovasi bukan hanya menjadi alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator untuk transformasi sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Membudayakan riset dan inovasi di tingkat daerah adalah kunci untuk membuka jalan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran yang merata.

III.1 Tantangan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Pemanfaatan riset dan inovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah menghadapi berbagai kendala yang harus diatasi agar dapat mencapai hasil yang optimal. Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

1. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Riset dan Inovasi

Melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi memerlukan investasi finansial yang signifikan, baik untuk peralatan, sumber daya manusia, atau infrastruktur penelitian. Keterbatasan sumber daya finansial bisa menjadi hambatan

serius dalam menggerakkan inisiatif riset dan inovasi. Faktor ini menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kemajuan riset dan inovasi suatu daerah. Ini berdampak langsung pada proses pengembangan seperti terbatasnya Infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi di Kabupaten Pasuruan masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Keterbatasan fasilitas penelitian, laboratorium, dan pusat inovasi menghambat pengembangan potensi lokal dalam sektor-sektor seperti pariwisata alam, produk olahan berbasis sumber daya alam, serta teknologi industri.

2. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang Belum Terkelola Secara Optimal

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi alam yang melimpah, seperti kawasan Bromo Tengger Semeru dan kawasan industri. Namun, banyak potensi alam ini yang belum dikelola secara optimal untuk riset dan inovasi. Ketergantungan yang berlebihan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa disertai inovasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak buruk terhadap keberlanjutan lingkungan.

3. Keterbatasan Jaringan Kolaborasi Antar Sektor

Kolaborasi yang terbatas antara sektor publik, swasta, dan akademik di Kabupaten Pasuruan memperlambat proses penerapan riset dalam kebijakan dan praktek lokal. Meskipun memiliki potensi besar, kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga riset, universitas, dan sektor swasta menghalangi pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, seperti pengembangan teknologi pariwisata atau inovasi industri ramah lingkungan.

4. Resistensi terhadap Perubahan dalam Sektor Tradisional

Kabupaten Pasuruan memiliki sektor tradisional yang kuat, seperti pertanian dan kerajinan berbasis alam. Namun, ada resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru di kalangan masyarakat, petani, dan pengusaha lokal. Hal ini menghambat inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing sektor-sektor tersebut dalam pasar global.

5. Pengelolaan Lingkungan yang Tidak Terintegrasi dengan Riset

Meski Kabupaten Pasuruan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, riset terkait pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah. Masalah perubahan iklim, kerusakan ekosistem, serta perlindungan kawasan alam seperti Bromo Tengger Semeru harus menjadi prioritas dalam riset dan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. **Keterbatasan Akses terhadap Sumber Pendanaan Inovasi**

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pendanaan yang tersedia untuk riset dan inovasi, baik dari pemerintah daerah maupun sektor swasta. Tanpa akses pendanaan yang memadai, banyak riset yang gagal diterapkan dalam bentuk produk inovatif atau solusi yang dapat memajukan ekonomi daerah.

7. **Tantangan Keberlanjutan**

Inovasi harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan. Perlindungan lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim adalah isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi.

III.2 Peluang dalam pemanfaatan riset dan Inovasi di Masa Datang

Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi digital yang terus berkembang, riset dan inovasi menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Sebagai langkah strategis, percepatan pembangunan ekonomi berbasis riset dan inovasi seharusnya menjadi fokus prioritas bagi pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Namun, untuk mencapai visi tersebut, sejumlah tantangan signifikan perlu diatasi. Tantangan ini mencakup keterbatasan dalam infrastruktur riset, rendahnya tingkat sinergi antara sektor publik dan swasta, keterbatasan sumber pendanaan, kekurangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan penerimaan inovasi di tingkat lokal. Meski demikian, di balik hambatan-hambatan ini, terdapat peluang strategis yang dapat dimaksimalkan untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang tangguh dan berkelanjutan..

1. **Inovasi dalam Pengelolaan Kawasan Alam dan Pariwisata Berbasis Budaya**

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, terutama melalui kawasan wisata Bromo Tengger Semeru. Inovasi dalam pengelolaan wisata yang berbasis teknologi digital, eco-tourism, serta aplikasi pariwisata yang mendukung pelestarian alam dapat meningkatkan daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara, serta menciptakan lapangan kerja baru.

2. **Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Sektor**

Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, universitas, dan lembaga riset dapat mempercepat pengembangan riset dan

inovasi di Kabupaten Pasuruan. Kemitraan ini tidak hanya memberikan akses ke pendanaan dan infrastruktur, tetapi juga mempercepat komersialisasi inovasi dalam sektor usaha, pertanian, dan pariwisata, serta membantu menciptakan ekosistem riset yang lebih integratif.

3. **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan di Sektor Usaha dan Pertanian**

Kabupaten Pasuruan memiliki peluang untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan pertanian, seperti penggunaan energi terbarukan, teknologi pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang efisien. Riset dalam bidang ini akan mendorong ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan daya saing industri daerah.

4. **Pengembangan Produk Inovatif Berbasis Potensi Lokal**

Kabupaten Pasuruan dapat mengembangkan riset untuk menciptakan produk-produk inovatif berbasis sumber daya alam lokal, seperti olahan pangan, kerajinan tangan, dan produk berbasis bahan alam lainnya. Melalui inovasi dalam proses produksi dan pengemasan, produk-produk ini dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas pasar baik di tingkat domestik maupun internasional.

5. **Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan di Bidang Riset dan Inovasi**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis riset dapat meningkatkan kualitas SDM yang siap mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan. Pelatihan di bidang teknologi digital, manajemen pariwisata berbasis alam, serta industri kreatif akan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan riset dan inovasi serta mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli luar daerah.

6. **Pendanaan Alternatif melalui Kemitraan Publik-Swasta dan Sumber Lainnya**

Kabupaten Pasuruan memiliki peluang untuk menjajaki berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema kemitraan publik-swasta atau dana hibah yang ditujukan untuk riset dan pengembangan. Pendanaan ini akan membantu mempercepat riset dan inovasi dalam sektor industri, pariwisata berbasis alam, serta teknologi ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak

positif yang lebih luas bagi ekonomi daerah.

7. **Pengembangan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi di Sektor Industri**

Inovasi dalam sektor industri di Kabupaten Pasuruan, seperti di kawasan industri, dapat didorong dengan penerapan teknologi tinggi yang meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, serta memperbaiki manajemen energi. Riset di sektor ini akan mempercepat transformasi digital di industri, membuka peluang untuk produk-produk baru, dan memperkuat daya saing di pasar global.

III.3 Kondisi yang Diharapkan: *Evidence Based Policy* dan Ekosistem RID

Pengembangan *evidence based policy* dan ekosistem RID merupakan salah satu tujuan utama dari rencana induk. Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Pasuruan diharapkan menjadi daerah yang tidak hanya unggul dalam potensi alam, tetapi juga dalam inovasi berbasis teknologi. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk melaksanakan kedua kegiatan inti tersebut, diperlukan Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi. Kabupaten Pasuruan diharapkan memiliki lembaga riset yang kokoh, termasuk pendirian pusat penelitian lokal, laboratorium, dan pusat inovasi. Lembaga-lembaga ini seharusnya berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, sesuai dengan potensi unggulan daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, yang mengintegrasikan berbagai program riset dan inovasi, harus dikembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah utama daerah, seperti pengangguran, ketimpangan akses pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Dengan lembaga yang kuat, transfer teknologi dan penerapan hasil riset dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Iptek, Ekosistem riset yang diharapkan juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kabupaten Pasuruan perlu menyediakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menyusun program pelatihan lokal menjadi krusial untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. SDM Iptek yang terampil akan menjadi pilar utama dalam pengembangan dan penerapan inovasi.

Peningkatan Infrastruktur Riset dan Teknologi, Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Pasuruan diharapkan memiliki infrastruktur riset yang memadai, seperti Kawasan Sains dan Teknologi (KST), laboratorium modern, dan pusat inkubasi

bisnis berbasis teknologi. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung riset terapan dan inovasi yang dapat menyelesaikan masalah utama daerah, seperti peningkatan produktivitas pertanian atau pengelolaan industri berbasis teknologi. Dukungan teknologi digital juga diharapkan menjadi bagian penting dalam pengelolaan data dan kolaborasi riset.

Kolaborasi dan Jejaring Riset yang Kuat, Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu membangun jejaring riset yang solid antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Kolaborasi ini akan mendukung pelaksanaan riset yang relevan dan aplikatif dalam pembangunan daerah. Kemitraan dengan perguruan tinggi nasional atau internasional juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas riset dan mengakses teknologi terkini. Jejaring riset yang kuat akan mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan daya saing daerah.

Dukungan Kebijakan dan Anggaran yang Konsisten, Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Peningkatan alokasi anggaran riset menjadi 1%-2% dari APBD dapat mendorong pelaksanaan program-program strategis berbasis riset. Kebijakan ini juga harus mencakup insentif bagi sektor swasta yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi. Dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang kuat, pembangunan berbasis riset dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

III.3.1 Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*Evidence based policy*)

Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan anggaran yang memadai serta menjalin kolaborasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan program prioritas kepala daerah. Selain itu, tema atau topik riset harus selaras dengan program prioritas perencanaan jangka menengah yang relevan dengan tahun tersebut.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu merespons isu-isu aktual periode 2025-2029 dengan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kolaborasi riset bersama stakeholder terkait. Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program Inovasi Daerah.

Proses pengubahan bukti menjadi kebijakan memerlukan mekanisme pertukaran pengetahuan yang efektif. Hubungan antara bukti dan kebijakan tidak bersifat langsung, karena bukti ilmiah jarang secara langsung mengatasi masalah kebijakan. Oleh karena itu, bukti ilmiah membutuhkan pendekatan yang terstruktur dalam pertukaran pengetahuan yang mendorong kolaborasi antara peneliti dan

pembuat kebijakan. Kolaborasi ini dapat difasilitasi oleh kapasitas organisasi perantara yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara pembuatan bukti dan penerapan kebijakan.

III.3.2 Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan (PUD)

Berikut ini akan disajikan kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan sampai tahun 2029, dengan menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi di daerah, yang terdiri dari 6 (enam) elemen. Ada 3 (tiga) tema yang akan dianalisis kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan.

III.3.2.1 Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Bordir	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Perda No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi perda dan perbup tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok Usaha Bordir.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Bordir	Satu data pasuruan sudah memuat beberapa informasi industri bordir, namun belum sampai kepada promosi produk unggulan	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kab Pasuruan. Tersedia elemen- elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Bordir (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb). Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	Keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha Bordir, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Bordir	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Namun sentra industri bordir telah mulai diinkubasi melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek Manajemen Pengelolaan Usaha sebagai upaya strategis. Pelatihan yang menyasar langsung ke potensi PUD belum tersedia dengan jelas	Pembuatan tempat berdiskusi komunitas kreatif Kab Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender event/kegiatan. Selain itu mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Bordir).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum tersedia	Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Bordir
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Bordir	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan Usaha Bordir	Perlu inisiasi kolaborasi dengan perguruan tinggi
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum ada kegiatan atau website sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi pada Usaha Bordir	Membangun website sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi pada Usaha Bordir
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang Usaha Bordir	Perlu inisiasi kemitraan dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Bordir. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Bordir	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Bordir. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir	Belym tersedia	Adanya Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlombaan internal Pemkab Pasuruan. Namun belum ada keikutsertaan Usaha Bordir.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Bordir
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Bordir	belum ada	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Bordir	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5: **Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah**			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum ada	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Bordir	Belum ada	Usaha Bordir, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Bordir	Belum ada	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD Usaha Bordir dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: **Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global**			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Bordir (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Bordir antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	

III.3.2.2 Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Usaha Pertanian Padi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Pertanian Padi?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok Usaha Pertanian Padi
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pertanian Padi	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Pertanian yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Pertanian Padi.	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen- elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro terkait Usaha Pertanian Padi Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	Tidak tersedia kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Kondisi yang diharapkan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pertanian Padi	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.	Peningkatan fungsi RPK seperti Taman sebagai tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. RPIK diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah yang mengolah hasil ikan. PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (Usaha Pertanian Padi).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi		Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Pertanian Padi
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pertanian Padi	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Pertanian Padi
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pada tahun 2023 telah terjalin kerjasama dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara. selain itu juga bekerjasama dengan Balai Besar Perbenihan dan proyeksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta kerjasama dengan Politeknik Pembangunan pertanian malang.	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Kabupaten Pasuruan telah bermitra dengan PTPN dan BBPPTP Surabaya. Kemitraan sudah dijalin namun belum spesifik pada pengembangan PUD terkait Pertanian Padi.	Perlu inisiasi kemitraan dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pertanian Padi	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pemerintah melalui dinas telah mengadakan beberapa kegiatan pameran. Salah satu nya adalah Pasuruan *Always Fresh* pada 2023 di *Rest Area* Tosari yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya .saing. Selain itu ada kegiatan YUK NONGGO yang merupakan akronim dari gerakan "Ayo Belonjo Nang Tonggo", SATRYA EMAS atau "Pusat Strategi Ekonomi Maslahat", PERWIRA "Perempuan Wira Usaha". Selain itu	Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Pertanian Padi, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Pertanian Padi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Kondisi yang diharapkan
		Pemerintah telah meresmikan Gedung Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan sebagai ruang pamer penjualan produk. bahkan Kabupaten Pasuruan telah melakukan pameran produk diluar daerah seperti AEO2022 dan PIATTEX V. Dalam skala internasional, dua diantara usaha kecil menengah unggulan mewakili Kabupaten Pasuruan pada pameran *Inacraft* 2023 di Jakarta.	
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sedangkat terkait Apresiasi pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai penerima Tanda Daftar Varietas Lokal Terbanyak se-Indonesia.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Pertanian Padi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pertanian Padi	Pengukuhan DPD Tani Merdeka yanng belum lama ini di tahun 2025 telah diresmikan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas ketahanan pangan dan pertanian serta organisasi Perangkat Daerah siap bersinergi.	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pertanian Padi	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Kondisi yang diharapkan
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi		Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis industri Pertanian Padi		DibentukUsaha Pertanian Padi, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat – provinsi - kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi		Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Pertanian Padi (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023, potensi keunggulan pertanian Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan standart kualitas yang diisyaratkan oleh pasar global.	
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang pertanian antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	

III.3.2.3 Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Peternakan Daging?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha Usaha Peternakan Daging Peraturan Daerah RPIK dapat diimplementasikan dengan fokus ke Usaha Peternakan Daging
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Peternakan yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Usaha Peternakan Daging	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen- elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Peternakan Daging Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor peternakan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Peternakan Daging		PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Peternakan Daging).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging		Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Peternakan Daging
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Peternakan Daging	belum dapat sumber dan data yang baik.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Peternakan Daging
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	pada tahun 2025 belum lama ini Penandatanganan PKS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dengan dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi. terutama Peternakan Daging.	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi;			

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penguatan kemitraan antarkelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum ada	Perlu inisiasi kemitraan dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Peternakan Daging	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut serta dalam *event* promosi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo atau APKASI AOE 2022. dalam *event* promosi potensi daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan meramaikannya dengan aneka produk-produk unggulan makanan olahan seperti Abon Ayam dan Sapi, *Stick* Susu Kambing dan Sapi, *Chrispy Chicken Food*.	Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Peternakan Daging, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Peternakan Daging
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan usaha Peternakan atau produk lainnya yang berkaitan dengan Peternakan terkait Susu dan Daging belum terdapat juga data-data prestasi dari sektor peternakan.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Peternakan Daging
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Peternakan Daging	belum ada.	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Peternakan Daging	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal.
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada.	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Peternakan Daging.	Belum ada.	DibentukUsaha Peternakan Daging, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Belum ada.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu	Standarisasi produk Usaha Peternakan Daging (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	belum ada.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;			
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Peternakan Daging antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	

III.3.2.4 Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Perikanan Lele?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha Usaha Perikanan Lele. Peraturan Daerah RPIK dapat diimplementasikan dengan fokus ke Usaha Perikanan Lele.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Perikanan Lele.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Perikanan yaitu dalam nominasi tersebut salah satunya Usaha Perikanan Lele.	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen- elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro terkait Usaha Perikanan Lele. Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha Perikanan Lele, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Perikanan Lele.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Namun sentra-sentra pembudidaya komoditi seperti ikan air tawar sudah terpetakan berdasarkan kecamatan yaitu salah satunya Usaha Perikanan Lele di Kecamatan Beji.	Peningkatan fungsi RPK seperti Taman sebagai tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. RPIK diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah yang mengolah hasil ikan. PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Perikanan Lele).

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	butuh logika anggaran.	Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Perikanan Lele.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Perikanan Lele.	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Gerai Niku Ikan Mas yang menguruai Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, tanda daftar kapal, fasilitas pengujian contoh produk olahan ikan, fasilitas sertifikasi usaha perikanan, permodalan, konsultasi penangkapan ikan dan konsultasi usaha ikan non konsumsi.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Perikanan Lele. Gerai Niku Ikan Mas bisa diadaptasi dan dikembangkan guna keperluan Usaha Perikanan Lele.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Pada tahun 2024 Kominfo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Dinas perikanan Pasuruan dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan serta *eFishery*, yaitu mengembangkan transformasi digital untuk pembudidaya melalui *Automatic Feeder.*	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;			

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penguatan kemitraan antar kelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang perikanan khususnya terkait Usaha Perikanan Lele.	Perlu inisiasi kemitraan dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang Tepat.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Perikanan Lele.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	diselenggarakannya festifal Mbakar Iwak yang digelar di Taman Dayu pada tahun 2024. pelaksanaan pameran produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan di Sentra Produk Unggulan Bangkodir Bangil dalam acara Gebyar Produk IKM. salah satunya hasil perikanan dan kelautan yang dipamerkan pada acara tersebut.	Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Perikanan Lele, khususnya Usaha Perikanan Lele, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Perikanan Lele.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan Usaha Perikanan Lele produk lainnya yang berkaitan dengan perikanan. belum terdapat juga data-data prestasi dari sektor perikanan khususnya Usaha Perikanan Lele.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Perikanan Lele.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Perikanan Lele.	belum ada.	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Perikanan Lele.	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal.
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.	DibentukUsaha Perikanan Lele, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Belum ada.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Perikanan Lele (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	belum ada.	
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Perikanan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	

III.3.2.5 Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Usaha Pariwisata Kuliner

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Pariwisata Kuliner?	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Perda No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi perda dan perbup tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok Usaha Pariwisata Kuliner.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pariwisata Kuliner	Satu data pasuruan sudah memuat beberapa informasi Usaha Pariwisata Kuliner, namun belum sampai kepada promosi produk unggulan	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kab Pasuruan. Tersedia elemen- elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Pariwisata Kuliner (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb). Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	Keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha Pariwisata Kuliner, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Namun sentra Usaha Pariwisata Kuliner telah mulai diinkubasi melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek Manajemen Pengelolaan Usaha sebagai upaya strategis. Pelatihan yang menyasar langsung ke potensi PUD belum tersedia dengan jelas.	Pembuatan tempat berdiskusi komunitas kreatif Kab Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender event/kegiatan. Selain itu mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Pariwisata Kuliner).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum tersedia	Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner.	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Perlu inisiasi kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada kegiatan atau website sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi pada Usaha Pariwisata Kuliner.	Membangun website sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi pada Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang Usaha Pariwisata Kuliner.	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih, peningkatan praktik baik yang tepat terhadap Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.		
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlombaan internal Pemkab Pasuruan. Namun belum ada keikutsertaan Usaha Pariwisata Kuliner	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pariwisata Kuliner	belum ada	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda terkait Usaha Pariwisata Kuliner

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5: **Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah**			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner	Belum ada	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Pariwisata Kuliner	Belum ada	Usaha Pariwisata Kuliner, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner	Belum ada	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD Usaha Pariwisata Kuliner dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: **Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global**			

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Pariwisata Kuliner (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Pariwisata Kuliner antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	

III.3.3 Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tematik Permasalahan Utama Daerah

III.3.3.1 Kemiskinan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Pengentasan Kemiskinan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Terdapat fokus utama pembangunan daerah untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan	Ada payung hukum untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung pengentasan Kemiskian	Terdapat DTKS dan KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem berdasarkan by name by address sehingga lebih tepat, efektif dan efisien dalam melakukan intervensi.	Tersedia data mengenai kemiskinan yang secara keseluruhan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha bordir, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan pengentasan kemiskinan		
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka		Tersedia anggaran riset yang memadai

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
	pengentasan kemiskinan		
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengentasan kemiskinan	Belum tersedia	Tersedia kegiatan inventarisasi riset tentang kemiskinan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengentasan kemiskinan	Sudah ada kerjasama multistake holder: salah satu nya dengan organisasi kemasyarakatan.	Perlu diadakan secara lebih luas

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Sudah Terdapat KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama pengentasan kemiskinan.	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
	Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan masyarakat miskin. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengentasan	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
	kemiskinan	pemangku pengentasan kemiskinan. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.	Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi pengentasan kemiskinan	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan pengentasan kemiskinan	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemkab Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan pengentasan kemiskinan belum ada	Perlu ada keikutsertaan inovasi dalam bidang pengentasan kemiskinan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada	belum ada	Tersedia sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
	pengentasan kemiskinan		
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengentasan kemiskinan	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Belum ada.	Perlu konsntrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis pengentasan kemiskinan	Belum ada	Perlu dibantuk pengentasan kemiskinan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengentasan kemiskinan.	Sudah ada	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten- provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam pengentasan kemiskinan	belum ada	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan industri atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
			peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya di bidang pengentasan kemiskinan.
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengentasan kemiskinan	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam pengentasan kemiskinan antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	Perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.

III.3.3.2 Tenaga Kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung penyerapan ketenagakerjaan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan	Adanya tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi permasalahan ketenagakerjaan. Adanya peraturan yang mendukung tatalaksana UPT pelatihan kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung penyerapan ketenagakerjaaan	Terdapat data terpadu dalam Berita Resmi Statistik (BRS) mengenai "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Agustus 2024". Dokumen tersebut memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 beserta indikator-indikator nya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).	Tersedianya data terpadu milik pemerintah kabupaten yang tersinkronisasi dengan BPS untuk diakses, dan bukan hanya rilis berita statistik saja. Tersedia by name by address seperti ketenagakerjaan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan.	Apabila terdapat urgensi, antara pengentasan kemiskinan dan kebun raya daerah, maka kebun raya dapat dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk penyerapan ketenagakerjaan.	Sudah tersedia UPT LKD Kabupaten Pasuruan	Tersedianya Keberadaan UPT LKD Pasuruan secara langsung mendukung penyerapan tenaga kerja yang langsung memberikan keterampilan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.		Tersedianya Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan penyerapan ketenagakerjaan.	Belum tersedia	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Belum ada	Adanya kerjasama dengan BRIN swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada	Tersedianya Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama penyerapan ketenagakerjaan.	Adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan penyedia tenaga kerja dan tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset ketenaga kerjaan.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga penyedia tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi	Adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
		tersebut.	
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam penyerapan tenaga kerja.	Terdapat jobfair namun bukan pameran inovasi. Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi ketenagakerjaan.	Terselenggaranya jobfair yang berkaitan dengan inovasi pencari kerja.
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan penyerapan tenaga kerja	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat)	Adanya keikutsertaan bidang penyerapan tenaga kerja dalam perlombaan inovasi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
		perlompaan internal Pemkab Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan penyerapan tenaga kerja belum ada	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada penyerapan tenaga kerja.	belum ada	Adanya sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan dan program-program lanjutan guna mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan penyerapan tenaga kerja.	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak	Tersedianya inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
		belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada.	Adanya konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam penyerapan tenaga kerja.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis penyerapan tenaga kerja	Belum ada	Adanya penyerapan tenaga kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam penyerapan tenaga kerja.	Sudah ada	Adanya kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan. mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan permasalahan utama daerah dengan kebijakan di provinsi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
			dan pusat, harus selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam penyerapan tenaga kerja	belum ada	Adanya keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya di bidang ketenagakerjaan.
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka penyerapan tenaga kerja	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam bidang tenaga kerja	Adanya kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan
		antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.

BAB IV
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Riset dan inovasi di tingkat daerah memiliki peranan penting sebagai fondasi utama dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dilandasi oleh riset dan inovasi dipercaya dapat mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, yakni lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan memaksimalkan penggunaan anggaran. Untuk memastikan hal tersebut, penting bahwa kebijakan-kebijakan ini diukur (*measurable*) menggunakan pendekatan berbasis riset sebelum diimplementasikan. Di sisi yang lain, inovasi memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan elemen-elemen rekayasa dan teknologi sebagai alat untuk menyusun kebijakan publik. Ini menjadi inti dari kebijakan berbasis bukti, di mana riset dan inovasi memainkan peran fundamental terhadap rancangan kebijakan yang lebih efisien dan efektif.

Secara umum, ekosistem riset dan inovasi di daerah dapat dipahami sebagai sebuah struktur yang kompleks, terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan untuk mendukung keseluruhan rantai nilai dari riset dan inovasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem ini merupakan jaringan interaksi yang melibatkan berbagai elemen dalam mendukung terciptanya riset dan inovasi di daerah. Dalam rangka memperkuat ekosistem ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara aktif mendorong pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan adanya ekosistem yang kokoh, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik yang berbasis riset dan inovasi. Implikasinya, pembangunan daerah dapat dipercepat, khususnya melalui penerapan inovasi yang berbasis teknologi.

Merujuk pada Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah mencakup beberapa elemen utama. Elemen-elemen tersebut meliputi: (1) kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan serta daya dukung riset inovasi di daerah; (3) kemitraan riset inovasi di daerah; (4) budaya riset inovasi di daerah; (5) keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, elemen-elemen utama dalam ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan serta infrastruktur riset dan inovasi daerah yang memadai menjadi landasan awal yang sangat penting. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset serta inovasi pada tingkat daerah merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas. Ketiga, adanya kemitraan riset dan inovasi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, dunia akademik, serta komunitas, membuka peluang kolaborasi yang strategis. Keempat, penguatan budaya riset dan inovasi di tengah masyarakat lokal perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendekatan berbasis pengetahuan. Kelima, adanya keterpaduan riset dan inovasi yang memastikan sinergi antara seluruh elemen dalam sistem ekosistem tersebut. Terakhir, adalah penyelarasan riset dan inovasi dengan perkembangan global agar kebijakan yang dihasilkan dapat tetap relevan di tingkat yang lebih luas.

Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah perlu menggunakan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dengan membandingkan standar ekosistem riset dan inovasi sesuai yang dianjurkan BRIN dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dapat merancang strategi-strategi untuk mengatasi kekurangan yang ada. Langkah ini memungkinkan daerah tetap mengembangkan ekosistem riset dan inovasi guna mendukung percepatan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.

IV.1 Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti

Unsur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah.	Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang berkualitas. Kendala utama terletak pada terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Bapperida Pasuruan telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian nasional seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan riset dan inovasi, yang	Bapperida Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan riset serta memperkuat jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini memungkinkan penyelarasan antara tema penelitian dengan program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dengan demikian, setiap kegiatan riset yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.	Pertama, peningkatan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan perlu menjadi prioritas dalam APBD. Kedua, perlu diperluasnya jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian terkemuka, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional. Ketiga, penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan riset benar-benar terfokus pada isu-isu strategis yang sesuai dengan program prioritas RPJMD 2025-2029.

Unsur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
	secara langsung berdampak pada terbatasnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat dihasilkan.		
Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah cukup	Bapperida mampu merespon isu aktual periode 2025-2029 dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan hasil kolaborasi riset dengan stakeholder terkait	Perlu penyediaan anggaran dan memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk merespon isu strategis selama periode 2025-2029

Unsur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	Tahun 2021: Peringkat 339 dengan indeks inovasi 10,72 (kurang inovatif). Tahun 2022: Indeks inovasi meningkat menjadi 55,73 (inovatif). Tahun 2023: Indeks inovasi meningkat menjadi 64,47 (sangat inovatif). Tahun 2024: sangat inovatif	Bapperida mengoptimalkan koordinasi program Inovasi Daerah untuk menumbuhkan budaya inovasi ASN dan meningkatkan partisipasi dalam IGA kemudian Riset dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan	belum adanya peraturan yang mewajibkan penggunaan riset sebagai dasar kebijakan menjadi kendala struktural. Proses perencanaan pembangunan juga belum secara eksplisit mengintegrasikan tahapan kajian ilmiah, sementara alokasi anggaran untuk *knowledge management* masih terbatas. Hal ini berakibat pada lemahnya sistem pendukung kebijakan berbasis bukti. Budaya organisasi di lingkungan pemerintah daerah masih didominasi pendekatan konvensional ("business as usual") dalam perumusan kebijakan. Temuan riset seringkali kurang diapresiasi oleh pimpinan PD, sementara mindset ASN masih lebih mengandalkan pengalaman empiris dibandingkan bukti ilmiah. Kondisi ini menciptakan jurang antara dunia penelitian dengan praktik pengambilan keputusan. Dari sisi kualitas riset, banyak penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik perumusan kebijakan. Metodologi yang digunakan seringkali belum memenuhi standar akademik yang ketat, sementara diseminasi hasil riset kepada pemangku kepentingan masih rendah. Akibatnya, temuan penelitian kurang termanfaatkan secara optimal. Koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala signifikan. Sinergi antara Bapperida dengan PD teknis masih lemah, ditambah tidak adanya forum rutin untuk membahas implikasi kebijakan dari temuan riset. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset eksternal pun masih terbatas, sehingga potensi pengetahuan dari luar sistem pemerintah belum tergarap maksimal.

IV.2 Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Tematik Produk

Unggulan Daerah

IV.2.1 Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Bordir	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pelaku usaha di daerah namun belum ada peraturan teknis yang mendukung operasional Peraturan Daerah tersebut dengan kata lain butuh aturan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Pasuruan juga belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Sementara itu Bapperida juga melakukan kajian pada Februari 2025 dengan usulan PUD sebagai berikut: Usaha Bordir	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok Usaha Bordir.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Bordir		Perlu penyediaan data yang mampu menunjukkan produk unggulan daerah dalam sektor pertanian Perlu penyediaan data yang mampu menunjukkan produk unggulan daerah dalam sektor Usaha Bordir. *Website* APIK yang telah diluncurkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan awalan yang baik, namun kenyataannya *Website* tersebut perlu dikembangkan lagi dan lebih memberikan informasi yang lengkap, ketersediaan fitur yang mudah dipahami dan	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen-elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Bordir (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb). Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			kesesuaian data yang tepat ketika diakses oleh masyarakat. kemudian kemudahan mendaftarkan UMKM harus menjadi catatan penting serta program-program lanjutan seperti pembinaan dan pelatihan.	masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha Bordir, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	apabila terdapat urgensi, pembudidayaan guna dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral, memiliki peluang yang bagus kedepannya untuk pengembangan Usaha Bordir	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Bordir	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.	PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan	Pembuatan tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. Selain itu mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Bordir).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan			Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir			
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Bordir	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017.	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Bordir
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan Usaha Bordir	belum terdapat kerjasama dengan BRIN dalam bidang usaha bordir. Namun BRIN memiliki sektor riset. Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang kuat terhadap pengembangan industri di Kabupaten Pasuruan. peluang ini perlu dimaksimalkan untuk keberlanjutan Usaha Bordi di Kabupaten Pasuruan.BRIN memiliki kelompok riset berbagai bidang, dalam hal ini dapat dimanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk keperluan.	Perlu inisiasi kolaborasi dengan perguruan tinggi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	untuk mendukung penuh pengembangan produk unggulan daerah, *Website* khusus atau fitur khusus dalam *Website* yang berkaitan dengan inovasi dan riset dirancang sebaik mungkin dengan tersedianya hasil riset dan inovasi unggulan yang dapat dicontoh. selain itu data data pendukung yang berkaitan dengan riset dan inovasi disediakan sebaik mungkin serta yang terpenting kemudahan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik.	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang bordir	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan	
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha bordir. Dan	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Bordir. Dan belum ada rencana	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	dan strategi transfer teknologi yang tepat
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset usaha bordir	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha bordir. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha industri bordir. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir			Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Bordir, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Bordir.
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan Usaha Bordir atau produk lainnya yang berkaitan dengan Bordir. belum	Wadah kompetisi inovasi dan teknologi yang telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Inovasi dan Teknologi. Wadah ini diharapkan menjadi jenjang yang membangkitkan semangat Masyarakat untuk terus berinovasi dan mampu meningkatkan daya saing lokal, antar daerah, dalam negeri hingga internasional.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		terdapat juga data-data prestasi dari sektor Usaha Bordir.		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha usaha Bordir	belum ada	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan Usaha Bordir dan program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi Usaha Bordir di Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Bordir	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	nampaknya keberadaan belum mampu dicatat dan didokumentasikan secara baik terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait sistem pembuatan bordir lokal atau adat secara turun temurun. keberadaanya tentu menjadi catatan penting untuk menelaah nilai-nilai leluhur dalam upaya melakukan kegiatan Usaha Bordir yang kemungkinan penerapannya mampu menjaga alam sekitar.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Belum ada	Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam pengembangan Usaha Bordir.	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Bordir

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Bordir	Belum ada	Perlu dibantukUsaha Bordir diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja	Usaha Bordir, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Bordir	Belum ada	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Bordir (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan Usaha Bordir atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya dibidang Usaha Bordir	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang pertanian antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			kepedulian isu global.	

IV.2.2 Usaha Pertanian Padi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung usaha Pertanian?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pelaku usaha di daerah namun belum ada peraturan teknis yang mendukung operasional Peraturan Daerah tersebut dengan kata lain butuh aturan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Pasuruan juga belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Sementara itu Bapperida juga melakukan kajian pada Februari 2025 dengan usulan PUD sebagai berikut: Pertanian Padi Selain itu, belum ada juga Peraturan Bupatiyang secara khusus mendukung dan memperkuat potensi produk unggulan daerah.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok Usaha Pertanian Padi
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaa	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada	*Website* APIK yang telah diluncurkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan awalan yang baik, namun kenyataannya *Website*	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten

	n (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pertanian Padi	Pertanian yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Pertanian Padi	tersebut perlu dikembangkan lagi dan lebih memberikan informasi yang lengkap, ketersediaan fitur yang mudah dipahami dan kesesuaian data yang tepat ketika diakses oleh masyarakat. kemudian kemudahan mendaftarkan UMKM harus menjadi catatan penting serta program-program lanjutan seperti pembinaan dan pelatihan. tentu menyelaraskan nominasi Produk Unggulan Daerah terkait Pertanian Padi	Pasuruan. Tersedia elemen-elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Pertanian Padi Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	Tidak tersedia kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Tidak tersedia kebun raya, namun bisa ada inisiasi kerjasama dengan BRIN dalam pengelolaan kolaborasi riset kebun raya purwodadi yang berlokasi di Pasuruan	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pertanian Padi	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan	PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan	Peningkatan fungsi RPK sebagai tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. RPIK diharapkan mampu mendorong tumbuhnya Usaha Pertanian Padi PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Pertanian Padi).

Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi			Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Pertanian Padi
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pertanian Padi	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Pertanian Padi
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pada tahun 2023 telah terjalin kerjasama dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara. selain itu juga bekerjasama dengan Balai Besar Perbenihan dan proyeksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta kerjasama dengan Politeknik Pembangunan pertanian malang	Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa bentuk kerjasama yang disepakati di bidang perkebunan dan pertanian sejak tahun 2023 namun target yang ingin dicapai belum begitu spesifik dan belum fokus terhadap pengembangan produk unggulan. Kedepannya bentuk kerjasama dibidang pertanian harus diperluas dengan target pencapaian yang tepat guna mendukung pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Pasuruan terkait Pertanian Padi	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	untuk mendukung penuh pengembangan produk unggulan daerah, *Website* khusus atau fitur khusus dalam *Website* yang berkaitan dengan inovasi dan riset dirancang sebaik mungkin dengan tersedianya hasil riset dan inovasi unggulan yang dapat dicontoh. selain itu data data pendukung yang berkaitan dengan riset dan inovasi disediakan sebaik mungkin serta yang terpenting kemudahan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik.	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Kabupaten Pasuruan telah bermitra dengan PTPN dan BBPPTP Surabaya. Kemitraan sudah dijalin namun belum spesifik pada pengembangan PUD terkait Pertanian Padi	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan terutama terkait Pertanian Padi	
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat

		tersebut.		
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pertanian Padi	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pemerintah melalui dinas telah mengadakan beberapa kegiatan pameran. Salah satu nya adalah Pasuruan Always Fresh pada 2023 di Rest Area Tosari yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Selain itu ada kegiatan YUK NONGGO yang merupakan akronim dari gerakan "Ayo Belonjo Nang Tonggo", SATRYA EMAS atau "Pusat Strategi Ekonomi Maslahat", PERWIRA "Perempuan Wira Usaha". Selain itu Pemerintah telah meresmikan Gedung Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan sebagai ruang pamer penjualan produk. bahkan Kabupaten Pasuruan telah melakukan pameran produk diluar daerah seperti AEO2022 dan PIATTEX V. Dalam skala internasional, dua diantara usaha kecil menengah	keaktifan Pemerintah Kabupaten dalam mengikuti berbagai ajang promosi penghargaan dan lomba atau pameran tentu merupakan hal yang positif dan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten terhadap produk-produk unggulan dan menghasilkan produk yang berpotensi kedepannya.	Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Pertanian Padi, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Pertanian Padi

		unggulan mewakili Kabupaten Pasuruan pada pameran Inacraft 2023 di Jakarta.		
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sedangkat terkait Apresiasi pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai penerima Tanda Daftar Varietas Lokal Terbanyak se-Indonesia	Wadah kompetisi inovasi dan teknologi yang telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Inovasi dan Teknologi. Wadah ini diharapkan menjadi jenjang yang membangkitkan semangat Masyarakat untuk terus berinovasi dan mampu meningkatkan daya saing lokal, antar daerah, dalam negeri hingga internasional.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Pertanian Padi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pertanian Padi	Pengukuhan DPD Tani Merdeka yanng belum lama ini di tahun 2025 telah diresmikan.Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas ketahanan pangan dan pertanian serta organisasi Perangkat Daerah siap bersinergi	organisasi yang terbentuk diharapkan memiliki target-target yang jelas dan konkret menyesuaikan perkembangan teknologi. Oleh karena itu pengembangan inovasi dan teknologi berbasis riset harus menjadi acuan utama disetiap pelaksanaan pengembangan pertanian khususnya Usaha Pertanian Padi.	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pertanian Padi	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	nampaknya keberadaan belum mampu dicatat dan didokumentasikan secara baik terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait sistem pertanian lokal atau adat secara turun temurun. keberadaanya tentu menjadi catatan penting untuk menelaah nilai-nilai leluhur dalam upaya melakukan kegiatan pertanian yang kemungkinan penerapannya mampu menjaga alam sekitar.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi		Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Pertanian Padi		Perlu dibantukUsaha Pertanian Padi diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja	DibentukUsaha Pertanian Padi diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi		Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.

Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Pertanian Padi (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023, potensi keunggulan pertanian Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan standart kualitas yang diisyaratkan oleh pasar global	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan Usaha Pertanian Padi atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya dibidang Usaha Pertanian Padi	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Pertanian Padi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.	

IV.2.3 Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Peternakan Daging?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pelaku usaha di daerah namun belum ada peraturan teknis yang mendukung operasional Peraturan Daerah tersebut dengan kata lain butuh aturan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Pasuruan juga belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Sementara itu Bapperida juga melakukan kajian pada Februari 2025 dengan usulan PUD sebagai berikut: Peternakan terkait Daging Selain itu, Belum ada juga Peraturan Bupatiyang secara khusus mendukung dan memperkuat potensi produk unggulan daerah.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha Usaha Peternakan Daging Peraturan Daerah RPIK dapat diimplementasikan dengan fokus ke Usaha Peternakan Daging
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Peternakan yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Usaha Peternakan Daging	*Website* APIK yang telah diluncurkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan awalan yang baik, namun kenyataannya *Website* tersebut perlu dikembangkan lagi dan lebih memberikan informasi yang lengkap, ketersediaan fitur yang mudah dipahami dan kesesuaian data yang tepat ketika diakses oleh masyarakat. kemudian kemudahan mendaftarkan UMKM	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen-elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro Usaha Peternakan Daging Data terupdate

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			harus menjadi catatan penting serta program-program lanjutan seperti pembinaan dan pelatihan. tentu menyelaraskan nominasi Produk Unggulan Daerah Peternakan seperti Daging.	secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor peternakan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	apabila terdapat urgensi, penangkaran hewan-hewan ternak guna dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral, memiliki peluang yang bagus kedepannya untuk pengembangan Usaha Peternakan Daging	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Peternakan Daging		PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan	PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Peternakan Daging).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha			Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	Peternakan Daging			
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Peternakan Daging	belum dapat sumber dan data yang baik	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Peternakan Daging
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	pada tahun 2025 belum lama ini Penandatanganan PKS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dengan dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.		Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi. terutama Peternakan Daging.	untuk mendukung penuh pengembangan produk unggulan daerah, *Website* khusus atau fitur khusus dalam *Website* yang berkaitan dengan inovasi dan riset dirancang sebaik mungkin dengan tersedianya hasil riset dan inovasi unggulan yang dapat dicontoh. selain itu data data pendukung yang berkaitan dengan riset dan inovasi disediakan sebaik mungkin serta yang terpenting kemudahan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			memanfaatkannya dengan baik.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum ada		
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Peternakan DagingDan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Peternakan DagingDan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Peternakan Daging	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut serta dalam *event* promosi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo atau APKASI AOE 2022. dalam *event* promosi potensi daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan meramaikannya dengan aneka produk-produk unggulan makanan olahan seperti Abon Ayam dan Sapi, *Stick* Susu Kambing dan Sapi, *Chrispy Chicken Food*.	Promosi dan kampanye sangat diperlukan untuk menyebarluaskan Produk Unggulan Daerah khuusnya terkait Susu dan Daging Promosi dan Kampanye membangkitkan daya saing agar setiap PUD mampu terus berinovasi dan terus mempertahankan kualitas produk unggulannya.	Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Peternakan Daging, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Peternakan Daging
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan Usaha Peternakan Daging atau produk lainnya yang berkaitan dengan Peternakan terkait Susu dan Daging belum terdapat juga data-	Wadah kompetisi inovasi dan teknologi yang telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Inovasi dan Teknologi. Wadah ini diharapkan menjadi jenjang yang membangkitkan semangat Masyarakat untuk terus berinovasi dan mampu meningkatkan daya saing lokal, antar daerah, dalam negeri hingga internasional.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		data prestasi dari Usaha Peternakan Daging		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Peternakan Daging	belum ada	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan Usaha Peternakan Daging dan program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi Usaha Peternakan Daging di Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Peternakan Daging	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	nampaknya keberadaan belum mampu dicatat dan didokumentasikan secara baik terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait sistem peternakan daging lokal atau adat secara turun temurun. keberadaanya tentu menjadi catatan penting untuk menelaah nilai-nilai leluhur dalam upaya melakukan kegiatan peternakan yang kemungkinan penerapannya mampu menjaga alam sekitar.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Belum ada	Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Peternakan Daging.	Belum ada	Perlu dibantukUsaha Peternakan Daging diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja	DibentukUsaha Peternakan Daging, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Belum ada	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Peternakan Daging (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan Usaha Peternakan Daging yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya dibidang Usaha Peternakan Daging	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang peternakan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan	perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		dengan lembaga atau mitra internasional	pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.	

IV.2.4 Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Perikanan Lele?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pelaku usaha di daerah namun belum ada peraturan teknis yang mendukung operasional Peraturan Daerah tersebut dengan kata lain butuh aturan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Pasuruan juga belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).. Sementara itu Bapperida juga melakukan kajian pada Februari 2025 dengan usulan PUD salah satunya Usaha Perikanan Lele	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha Usaha Perikanan Lele. Peraturan Daerah RPIK dapat diimplementasikan dengan fokus ke Usaha Perikanan Lele.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb)	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada Perikanan yaitu Usaha Perikanan Lele.	*Website* APIK yang telah diluncurkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan awalan yang baik, namun kenyataannya *Website* tersebut perlu dikembangkan lagi dan lebih memberikan informasi yang lengkap, ketersediaan fitur yang	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen-elemen data yang secara spesifik

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	terkait Usaha Perikanan Lele.		mudah dipahami dan kesesuaian data yang tepat ketika diakses oleh masyarakat. kemudian kemudahan mendaftarkan UMKM harus menjadi catatan penting serta program-program lanjutan seperti pembinaan dan pelatihan. tentu menyelaraskan nominasi Produk Unggulan Daerah terkait Usaha Perikanan Lele	menggambarkan kondisi usaha mikro terkait Usaha Perikanan Lele. Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor perikanan, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	apabila terdapat urgensi, pembudidayaan guna dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral, memiliki peluang yang bagus kedepannya untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk I Usaha Perikanan Lele	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan. Namun sentra-sentra pembudidaya komoditi seperti ikan air tawar sudah terpetakan berdasarkan kecamatan yaitu Lele berada di Kecamatan Beji	PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan	Peningkatan fungsi RPK seperti Taman sebagai tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. RPIK diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri kecil menengah yang mengolah hasil ikan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
				PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha (khususnya Usaha Perikanan Lele).
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	butuh logika anggaran		Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Perikanan Lele
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Perikanan Lele.	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Gerai Niku Ikan Mas yang menguruai Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, tanda daftar kapal, fasilitas pengujian contoh produk olahan ikan, fasilitas sertifikasi usaha perikanan, permodalan,	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		konsultasi penangkapan ikan dan konsultasi usaha ikan non konsumsi		
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Pada tahun 2024 Kominfo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Dinas perikanan Pasuruan dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan serta *eFishery*, yaitu mengembangkan transformasi digital untuk pembudidaya melalui *Automatic Feeder.*	belum terdapat kerjasama dengan BRIN dalam bidang perikanan. peluang ini perlu dimaksimalkan untuk keberlanjutan perikanan di Kabupaten Pasuruan khususnya Usaha Perikanan Lele. BRIN memiliki kelompok riset berbagai bidang, dalam hal ini dapat dimanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk keperluan pengembangan sektor perikanan. dkP Jatim juga memiliki UPT Labkeskanling. kerjasama dalam pemanfaatan laboratorium ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut.	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	untuk mendukung penuh pengembangan produk unggulan daerah, *Website* khusus atau fitur khusus dalam *Website* yang berkaitan dengan inovasi dan riset dirancang sebaik mungkin dengan tersedianya hasil riset dan inovasi unggulan terutama terkait Usaha Perikanan Lele. selain itu	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	Perikanan Lele		data data pendukung yang berkaitan dengan riset dan inovasi disediakan sebaik mungkin serta yang terpenting kemudahan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang perikanan khususnya terkait Usaha Perikanan Lele	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan terutama terkait Usaha Perikanan Lele	
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang tepat
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Perikanan Lele. Dan belum ada rencana target	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	Perikanan Lele	target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	diselenggarakannya festifal Mbakar Iwak yang digelar di Taman Dayu pada tahun 2024. pelaksanaan pameran produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan di Sentra Produk Unggulan Bangkodir Bangil dalam acara Gebyar Produk IKM. salah satunya hasil perikanan dan kelautan yang dipamerkan pada acara tersebut		Terjadi peningkatan promosi produk hasil Usaha Perikanan Lele, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan Usaha Perikanan Lele
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan Usaha Perikanan Lele atau produk lainnya yang berkaitan dengan perikanan. belum	Wadah kompetisi inovasi dan teknologi yang telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Inovasi dan Teknologi. Wadah ini diharapkan menjadi jenjang yang membangkitkan semangat Masyarakat untuk terus berinovasi dan mampu meningkatkan daya saing lokal, antar daerah, dalam negeri hingga internasional.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		terdapat juga data-data prestasi dari sektor perikanan.		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Perikanan Lele	belum ada	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan khususnya Usaha Perikanan Lele, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan Usaha perikanan dan program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi Usaha Perikanan Lele di Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Perikanan Lele	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	nampaknya keberadaan belum mampu dicatat dan didokumentasikan secara baik terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait sistem perikanan lokal atau adat secara turun temurun. keberadaanya tentu menjadi catatan penting untuk menelaah nilai-nilai leluhur dalam upaya melakukan kegiatan perikanan yang kemungkinan penerapannya mampu menjaga alam sekitar.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Belum ada	Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
PUD				
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Perikanan Lele	Belum ada	Perlu dibantukUsaha Perikanan Lele diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja	DibentukUsaha Perikanan Lele, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	Belum ada	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi produk Usaha Perikanan Lele (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb)	belum ada	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan Usaha Perikanan Lele atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya dibidang Usaha Perikanan Lele	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Perikanan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.	

IV.2.5 Usaha Pariwisata Kuliner

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Usaha Pariwisata Kuliner?	Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tersedia Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Inovasi Daerah dan Peraturan BupatiNo. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, Namun belum memiliki SiDA.	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pelaku usaha di daerah namun belum ada peraturan teknis yang mendukung operasional Peraturan Daerah tersebut dengan kata lain butuh aturan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Pasuruan juga belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Sementara itu Bapperida juga melakukan kajian pada Februari 2025 dengan usulan PUD salah satunya Usaha Pariwisata Kuliner.	Diterbitkan surat keputusan bupati tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha Usaha Pariwisata Kuliner Peraturan Daerah RPIK dapat diimplementasikan dengan fokus ke Usaha Pariwisata Kuliner.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha, omzet, dsb) terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama padaUsaha Pariwisata Kuliner.	*Website* APIK yang telah diluncurkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan awalan yang baik, namun kenyataannya *Website* tersebut perlu dikembangkan lagi dan lebih memberikan informasi yang lengkap, ketersediaan fitur yang mudah dipahami dan kesesuaian data yang tepat ketika diakses oleh masyarakat. kemudian kemudahan mendaftarkan UMKM harus menjadi catatan penting serta program-program lanjutan seperti pembinaan dan pelatihan.	Tersedia penjelasan tentang meta data yang ada di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tersedia elemen-elemen data yang secara spesifik menggambarkan kondisi usaha mikro terkait Usaha Pariwisata Kuliner. Data terupdate secara otomatis/ sistematis oleh masing-masing

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			tentu menyelaraskan nominasi Produk Unggulan Daerah terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	produsen data.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah;	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah.	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah Usaha Pariwisata Kuliner sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.	apabila terdapat urgensi, pembudidayaan guna dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral, memiliki peluang yang bagus kedepannya untuk pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.	PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan	Peningkatan fungsi RPK seperti Taman sebagai tempat berdiskusi komunitas kreatif Kabupaten Pasuruan, dikelola bersama komunitas, dilengkapi fasilitas yang cukup, dan ditetapkan kalender *event*/kegiatan. RPIK diharapkan mampu mendorong tumbuhnya Usaha Pariwisata Kuliner. PLUT mampu menjalankan inkubasi terhadap usaha mikro dan calon wirausaha.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam	butuh logika anggaran.		Anggaran tersedia cukup untuk mendukung pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
	rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.			
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner.	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI pada tahun 2017.	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.		belum terdapat kerjasama dengan BRIN dalam bidang Usaha Pariwisata Kuliner. Peluang ini perlu dimaksimalkan untuk keberlanjutan kerjasama dalam pemanfaatan laboratorium bisa dimanfaatkan lebih lanjut.	Melanjutkan kolaborasi yang ada dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Sarana pendukung (*Website*, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada kegiatan atau *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	untuk mendukung penuh pengembangan produk unggulan daerah, *Website* khusus atau fitur khusus dalam *Website* yang berkaitan dengan inovasi dan riset dirancang sebaik mungkin dengan tersedianya hasil riset dan inovasi unggulan terutama terkait Usaha Pariwisata Kuliner. Selain itu data data pendukung yang berkaitan dengan	Membangun *Website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			riset dan inovasi disediakan sebaik mungkin serta yang terpenting kemudahan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan;	kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama dibidang Usaha Pariwisata Kuliner.	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan terutama terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih model dan strategi transfer teknologi yang Tepat.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi	Terpetakan usaha mikro yang menjadi target intervensi dan terpilih praktik baik yang tepat.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
		menerima sosialisasi tersebut.	tersebut.	
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum tersedia	Perlu adanya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan promosi dan kampanye produk	adanya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan promosi dan kampanye produk
Apresiasi prestasi inovasi;	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Ada perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan Usaha Pariwisata Kuliner.	Wadah kompetisi inovasi dan teknologi yang telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Inovasi dan Teknologi. Wadah ini diharapkan menjadi jenjang yang membangkitkan semangat Masyarakat untuk terus berinovasi dan mampu meningkatkan daya saing lokal, antar daerah, dalam negeri hingga internasional.	Memberikan apreasiasi inovasi pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha Usaha Pariwisata Kuliner.	belum ada.	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan khususnya Usaha Pariwisata Kuliner, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner	Meningkatkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
			program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi Usaha Pariwisata Kuliner di Kabupaten Pasuruan	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan Usaha Pariwisata Kuliner.	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	nampaknya keberadaan belum mampu dicatat dan didokumentasikan secara baik terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait sistem olahan kuliner lokal atau adat secara turun temurun. keberadaanya tentu menjadi catatan penting untuk menelaah nilai-nilai leluhur dalam upaya melakukan kegiatan olahan kuliner atau usaha pariwisata kuliner yang kemungkinan penerapannya mampu menjaga alam sekitar.	Dilakukan inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal.
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada.	Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Melalui RIPJPID ini diupayakan untuk menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada.	Perlu dibentukUsaha Pariwisata Kuliner diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja.	DibentukUsaha Pariwisata Kuliner, diawali dengan pemetaan pelaku, dan pembentukan serta program kerja.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Analisis Kesenjangan	Kondisi yang diharapkan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Belum ada.	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Standarisasi produk Usaha Pariwisata Kuliner (Kemasan/Label Halal/BPOM/ PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dsb).	belum ada.	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan Usaha Pariwisata Kuliner atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya dibidang Usaha Pariwisata Kuliner.	
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Pariwisata Kuliner antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	perlu kerjasama yang konkret. Kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.	

IV.3 Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Tematik Permasalahan Utama Daerah

IV.3.1 Kemiskinan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung Pengentasan Kemiskinan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Terdapat fokus utama pembangunan daerah untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan	Ada payung hukum untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan. Namun belum ada paying hukum untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang tidak ekstrem. Pelaksanaan program dari Dinas Sosial dengan memasukkan data penduduk miskin ekstrem yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga membuat program *greget* dari beberapa Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Sosial. Secara terintegrasi melakukan peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui pelatihan keterampilan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung pengentasan Kemiskian	Terdapat DTKS dan KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem berdasarkan by name by address sehingga lebih tepat, efektif dan efisien dalam melakukan intervensi.	Tersedia data mengenai kemiskinan yang secara keseluruhan.	Sudah tersedia data terpadu kemiskinan Ekstrem. Selain itu sudah terdapat data mengenai intervensi yang diberikan pada masyarakat miskin ekstrem. Melalui aplikasi ini kondisi yang diharapkan adalah: Memberi kemudahan bagi Perangkat Daerah dalam mengakses data kemiskinanekstrem Memberi kemudahan bagi perangkat daerah dalam menentukan sasaran intervensi penduduk miskin eksterm berdasarkan by name by address Memberi kemudahan bagi perangkat Daerah dalam melakukan intervensi lebih spesifik berdasarkan by name by address Memberi kemudahan bagi stakeholder dan dunia usaha/industri untuk memberikan kontribusi dan CSR pada sasaran penduduk miskin ekstrem secara tepat berdasarkan by name by address Namun belum tersedia data mengenai kemiskinan yang tidak ekstrem.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor Usaha bordir, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.		apabila terdapat urgensi, antara pengentasan kemiskinan dan kebun raya daerah, maka kebun raya dapat dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk pengembangan pengentasan kemiskinan	Belum tersedia PLUT KUKM di Kabupaten Pasuruan.	Tersedia PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah)	PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pendampingan. Kabupaten Pasuruan belum memiliki PLUT-KUMKM sejenis yang dapat menjadi inkubator usaha di wilayah Kabupaten Pasuruan. Meskipun tidak secara langsung PLUT KUKM memperbaiki angka kemiskinan namun PLUT KUKM dapat memiliki side effect yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan		Tersedia anggaran riset yang memadai	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan pengentasan kemiskinan	Belum tersedia	Tersedia kegiatan inventarisasi riset tentang kemiskinan	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengentasan kemiskinan	Sudah ada kerjasama multistake holder: salah satu nya dengan organisasi kemasyarakatan.	Perlu diadakan secara lebih luas	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Sudah Terdapat KEMISAN MESRA. Sebuah Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera instrumen bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengakses data kemiskinan ekstrem		
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama pengentasan kemiskinan.	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan masyarakat miskin.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat . Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
		Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.		
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengentasan kemiskinan	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga pemangku pengentasan kemiskinan. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.	Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi pengentasan kemiskinan		
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan pengentasan kemiskinan	Ada lomba INOPAMAS	Perlu ada keikutsertaan inovasi dalam bidang pengentasan kemiskinan	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemkab Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan pengentasan kemiskinan belum ada
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada pengentasan kemiskinan	belum ada	Tersedia sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil.	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan usaha dan program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengentasan kemiskinan	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.		Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Belum ada.	Adanya konsntrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga	Perlu konsntrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis pengentasan kemiskinan	Belum ada	Adanya dibantuk pengentasan kemiskinan	Perlu dibantuk pengentasan kemiskinan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengentasan kemiskinan.	Sudah ada	Adanya kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat.	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten- provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam pengentasan kemiskinan	belum ada	Adanya keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan usaha.	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya di bidang pengentasan kemiskinan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengentasan kemiskinan	Sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam pengentasan kemiskinan antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	Adanya kerjasama yang konkret.	Perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.

IV.3.2 Tenaga Kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan yang mendukung penyerapan ketenagakerjaan	Terdapat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketenagakerjaan	Adanya tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi permasalahan ketenagakerjaan. Adanya peraturan yang mendukung tatalaksana UPT pelatihan kerja	Sudah tersedia peraturan daerah yang menjadi payung bagi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu terdapat peraturan yang mendukung tatalaksana UPT pelatihan kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
		Kabupaten Pasuruan		
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung penyerapan ketenagakerjaaan	Terdapat data terpadu dalam Berita Resmi Statistik (BRS) mengenai "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Agustus 2024". Dokumen tersebut memaparkan	Tersedianya data terpadu milik pemerintah kabupaten yang tersinkronisasi dengan BPS untuk diakses, dan bukan hanya rilis berita statistik saja. Tersedia by name by address seperti kemiskinan ekstrem.	Sudah tersedia data terpadu milik BPS namun data tidak tersedia untuk diakses, hanya rilis berita statistik saja. Selain itu tidak tersedia by name by address seperti kemiskinan ekstrem.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
		kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 beserta indikator-indikator nya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).		
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan.	Apabila terdapat urgensi, antara pengentasan kemiskinan dan kebun raya daerah, maka kebun raya dapat dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral.	apabila terdapat urgensi, antara pengentasan kemiskinan dan kebun raya daerah, maka kebun raya dapat dimanfaatkan sebagai basis riset dan inovasi yang dilakukan dengan baik dan sentral.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ruang Publik Kreatif (RPK), Pusat inovasi, inkubator, dsb untuk penyerapan ketenagakerjaan.	Sudah tersedia UPT LKD Kabupaten Pasuruan	Tersedianya Keberadaan UPT LKD Pasuruan secara langsung mendukung penyerapan tenaga kerja yang langsung memberikan keterampilan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.	Keberadaan UPT LKD Pasuruan secara langsung mendukung Usaha Bordir. Secara langsung memberikan keterampilan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.		Tersedianya Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan penyerapan ketenagakerjaan.	Belum tersedia	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.	Perlu sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI melalui Disperindag Kabupaten Pasuruan.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Belum ada	Adanya kerjasama dengan BRIN swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam	Belum ada	Tersedianya Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
	rangka penyerapan tenaga kerja.			
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;				
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan dilakukan dengan mitra dalam negeri atau luar negeri untuk memberikan kemudahan akses informasi; kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Belum terdapat data antar kelembagaan yang memuat kerja sama penyerapan ketenagakerjaan.	Adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan	Perlu adanya penguatan kemitraan antarkelembagaan

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha untuk berjejaring dengan penyedia tenaga kerja dan tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	Perlu adanya model dan strategi transfer teknologi ke masyarakat. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset ketenaga kerjaan.	Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan antar Lembaga penyedia tenaga kerja. Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima	Adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
		sosialisasi tersebut.		
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.	Terdapat jobfair namun bukan pameran inovasi. Belum terdapat promosi program penyelenggaraan inovasi ketenagakerjaan.	Terselenggaranya jobfair yang berkaitan dengan inovasi pencari kerja.	Jobfair diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun 2024 terdapat 40 mitra peserta jobfair.
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan pengentasan kemiskinan	terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, Pemkab Pasuruan telah me launching INOPAMAS (Inovasi dan Teknologi Kabupaten	Adanya keikutsertaan bidang penyerapan tenaga kerja dalam perlombaan inovasi	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
		Pasuruan Maju Penuh Maslahat) perlompaan internal Pemkab Pasuruan. namun belum ada keikutsertaan penyerapan tenaga kerja belum ada		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha berfokus pada penyerapan tenaga kerja.	belum ada	Adanya sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan dan program-program lanjutan guna mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan	sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil perlu dimatangkan, sehingga menjadi acuan dasar pengembangan usaha dan program-program lanjutan guna mendorong diversifikasi di Kabupaten Pasuruan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan penyerapan	belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku	Tersedianya inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
	tenaga kerja.	turun-temurun. Pendataan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Belum ada.	Adanya konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam penyerapan tenaga kerja.	Perlu konsentrasi dalam menjadikan RIPJPID sebagai pedoman riset sehingga kerangka ekosistem riset dan inovasi terjaga dalam penyerapan tenaga kerja.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan inovasi berbasis penyerapan tenaga kerja	Belum ada	Adanya penyerapan tenaga kerja	Perlu dibentuk penyerapan tenaga kerja

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam penyerapan tenaga kerja.	Sudah ada	Adanya kesesuaian perencanaan kabupaten-provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan. mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan permasalahan utama daerah dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.	Perlu kesesuaian perencanaan kabupaten- provinsi-pemerintah pusat. RIPK Pasuruan. mengacu RIPP Jawa Timur, dan mengacu kepada RIPIN Sinkronisasi kebijakan permasalahan utama daerah dengan kebijakan di provinsi dan pusat, harus selalu dijaga.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyelenggaraan atau keikutsertaan pemerintah dalam forum internasional dalam penyerapan tenaga kerja	belum ada	Adanya keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra	keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan usaha atau yang lainnya dalam skala internasional tentu akan menghasilkan kepedulian dalam peningkatan isu-isu internasional. keaktifan tersebut juga akan membuka peluang kerjasama dengan lembaga atau mitra internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
			internasional untuk penguatan aktifitas ekonomi khususnya di bidang ketenagakerjaan.	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka penyerapan tenaga kerja	sejauh ini belum terdapat dokumen kerjasama internasional dalam bidang tenaga kerja antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional	Adanya kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.	Perlu kerjasama yang konkret. kerjasama yang apabila terjalin dengan lembaga atau mitra internasional akan memberikan dampak yang baik seperti pertukaran informasi dan difusi teknologi serta meningkatkan kepedulian isu global.

BAB V
STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah. Maka, strategi ini sejalan dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah pada bagian sebelumnya. Selain itu, strategi ini juga mengelaborasi kesenjangan ekosistem riset dan inovasi dengan tantangan dan peluang yang ada. Pada dasarnya, strategi ini berupaya menguatkan, membangun, dan mengembangkan kekurangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Kabupaten Pasuruan memiliki ekosistem riset dan inovasi daerah yang baik. Kekurangan yang paling besar adalah pada elemen kebijakan dan infrastruktur. Pada bagian ini, kekurangan elemen dan indikator ekosistem riset dan inovasi daerah akan dibahas untuk menjadi strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kabupaten Pasuruan.

V.1 Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Strategi ini dilakukan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, baik terhadap program prioritas RPJMD tahun 2025-2029 maupun merespon isu strategis di periode yang sama adalah meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset serta menyediakan anggaran yang cukup untuk menjalankan program/kolaborasi tersebut.

Sedangkan strategi peningkatan capaian indeks inovasi daerah adalah meningkatkan koordinasi Bapperida dengan seluruh perangkat daerah dan membentuk Tim Percepatan yang berfungsi memberikan fasilitasi dan dukungan administrasi kepada seluruh perangkat daerah/ pelaku inovasi.

V.2 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan

Pada level makro, fokus strategi diarahkan pada penyiapan kerangka kebijakan pengembangan Sektor Unggulan Daerah dan pada Level meso menitikberatkan pada penciptaan kolaborasi antar-pelaku ekonomi melalui pembentukanUsaha berbasis Sektor Unggulan Daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat-daerah. Sementara level mikro difokuskan pada penumbuhan wirausaha baru berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah Sektor

Unggulan Daerah.

Potensi besar yang dimiliki usaha bordir, usaha pertanian padi, usaha peternakan daging, dan usaha perikanan lele serta usaha pariwisata kuliner menawarkan peluang signifikan untuk dikembangkan secara bertahap dengan perluasan pasar. Strategi pengembangan harus mencakup penguatan infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung sektor unggulan, termasuk adopsi teknologi baru seperti sistem budidaya ikan modern dan manajemen energi terbarukan. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform analisis data real-time juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Pengembangan infrastruktur riset ini akan menjadi pondasi penting untuk mewujudkan visi misi daerah. Strategi kebijakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah mampu memberikan solusi konkret bagi pengembangan Sektor Unggulan Daerah sebagaimana diuraikan dalam kerangka kebijakan yang komprehensif.

Tabel 5.1 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
Membangun pendekatan problem and research based policy sebagai tidak lanjut atas penyusunan RIPJPID.	Menyusun kebijakan pembangunan berbasis data, riset, dan analisis masalah nyata di daerah serta memperkuat kapasistas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Membangun pendekatan melalui integrasi keunggulan industri dengan pelaku usaha sejenis dalam kawasan produksi terpadu berbasis komoditas andalan daerah. Pendekatan ini memfasilitasi kolaborasi antar-pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk.	Merumuskan regulasi yang mendukung sekaligus menyiapkan sarana-prasarana bagi pengembangan empat pusat keunggulan industri. Pengembangan produk inovatif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mengembangkan kerjasama, meningkatkan budaya inovasi, meningkatkan rantai nilai produk unggulan.

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
Menciptakan sistem pendukung inovasi yang efektif dengan membentuk jejaring kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan industri.	Menyiapkan berbagai kebijakan yang berbasis riset, menciptakan kerjasama riset dan inovasi di berbagai tingkat baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan nilai tambah bagi Produk Unggulan Daerah.
Mengakselerasi pertumbuhan bisnis berbasis terobosan baru sekaligus memperkokoh institusi pendukung usaha.	Mengembangkan skema investasi riset dan inovasi, membangun pusat- pusat inovasi produk unggulan, membangun budaya inovasi, membangun kerjasama riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional.

V.3 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah

Kabupaten Pasuruan menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunannya. Berbagai program pelatihan berbasis kompetensi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata dikembangkan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja lokal. Pemberdayaan perempuan dalam sektor-sektor ekonomi strategis juga mendapat perhatian khusus melalui penyediaan pelatihan khusus dan fasilitas pendukung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi berbagai pihak menjadi tulang punggung dalam pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah setempat aktif membangun kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pusat penelitian, dan dunia usaha untuk mendorong inovasi yang aplikatif. Keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan proyek-proyek inovatif, khususnya di bidang ekowisata, terus didorong melalui berbagai skema insentif. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

menjadi landasan penting dalam menjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan jangka panjang.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, transformasi digital akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan. Penerapan teknologi digital dalam seluruh rantai nilai produk unggulan, mulai dari produksi hingga pemasaran, akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penguatan sektor usaha bordir, usaha pertanian padi, usaha peternakan daging, dan usaha perikanan lele serta usaha pariwisata kuliner ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga keseimbangan iklim usaha yang adil. Melalui pendekatan terpadu ini, Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk mewujudkan visinya sebagai “Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Tabel 5.2 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui program pelatihan berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi di bidang teknologi dan penelitian, sementara kemitraan strategis dengan universitas dan pusat riset dikembangkan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi.
Kerjasama berbagai pihak	Memperkuat sinergi multipihak melalui kemitraan strategis antara pemangku kepentingan utama - mencakup pemerintah daerah, pusat penelitian, perguruan tinggi, dan dunia usaha - guna membangun lingkungan inovasi yang terpadu dan saling mendukung.
Penguatan Teknologi Informasi	Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital dengan mengimplementasikan solusi teknologi terkini dalam sistem informasi dan pengelolaan basis data untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja.
Pemusatan Ekonomi Lokal	Memperkuat kemampuan kompetensi melalui penguatan penelitian terapan yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya ekonomi lokal, dengan fokus pengembangan pada bidang-bidang strategis meliputi agrobisnis, kepariwisataan, serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Peningkatan Pelayanan Publik	Memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penelitian kebijakan berbasis data dan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
Peningkatan Partisipasi Publik	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam riset dan inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dan meningkatkan relevansi riset.

Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan kompetitif. Dalam upaya mengembangkan komoditas andalan, fokus utama ditempatkan pada revitalisasi usaha bordir, usaha pertanian padi, usaha peternakan daging, dan usaha perikanan lele serta usaha pariwisata kuliner yang mencakup pembaruan teknologi penangkapan, pengembangan unit pengolahan hasil olahan, serta perluasan jaringan pemasaran produk.

Melalui strategi terpadu ini, diharapkan tercipta distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis wilayah tersebut.

BAB VI
PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kebijakan yang berbasis bukti ilmiah, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Proses penyusunan kebijakan pembangunan yang ideal harus didukung oleh data riset yang mutakhir, relevan, dan valid agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran. Tantangan utama yang dihadapi adalah menyelaraskan kegiatan riset dan inovasi dengan prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD, sehingga hasilnya dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Kabupaten Pasuruan mengembangkan sistem riset dan inovasi yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan, dengan tiga tujuan utama: (1) menghasilkan penelitian yang berdampak nyata, (2) meningkatkan manfaat riset bagi masyarakat dan pemerintah, serta (3) mengembangkan mekanisme diseminasi hasil penelitian untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah. Pendekatan ini didukung oleh proses penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga membangun budaya riset yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Bapperida Kabupaten Pasuruan berperan sebagai koordinator tata kelola riset dan inovasi daerah, dengan tugas menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian. Melalui kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan mitra strategis, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan berbasis pengetahuan (knowledge-based policy) yang efektif mencapai target pembangunan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap perencanaan pembangunan didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

VI.1 Peta Jalan

VI.1.1 Peta Jalan Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based-policy)*

Peta jalan riset dan inovasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) disesuaikan dengan program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029.

Selain itu, peta jalan riset dan inovasi untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN di perangkat daerah yang dilambangkan dengan IGA, maka dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2025: koordinasi Bapperida dengan seluruh Perangkat Daerah, pembentukan Tim Percepatan Inovasi Daerah (dukungan fasilitasi dan administrasi), dan pelaksanaan inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam IGA.

2. Tahun 2026: Peningkatan efektivitas kerja Tim Percepatan Inovasi Daerah (dukungan fasilitasi dan administrasi), dan pelaksanaan inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam IGA.
3. Tahun 2027: Peningkatan efektivitas kerja Tim Percepatan Inovasi Daerah (dukungan fasilitasi dan administrasi), dan pelaksanaan inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam IGA.
4. Tahun 2028: Peningkatan efektivitas kerja Tim Percepatan Inovasi Daerah (dukungan fasilitasi dan administrasi), dan pelaksanaan inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam IGA.
5. Tahun 2029: Peningkatan efektivitas kerja Tim Percepatan Inovasi Daerah (dukungan fasilitasi dan administrasi), pelaksanaan inovasi daerah untuk diikutsertakan dalam IGA, dan evaluasi pelaksanaan program.

VI.1.2 Peta Jalan Riset dan Inovasi Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)

VI.1.2.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Usaha Bordir

Tabel 6.1 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Bordir Tahun 2026-2030

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan PUD.	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Bordir.	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Bordir di Kabupaten Pasuruan.	Tersusunnya rancangan penyediaan infrastruktur prioritas dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi Pinkoperumik (pusat inovasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil) sebagai lembaga inkubator pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi Pinkoperumik (pusat inovasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil) sebagai lembaga inkubator dan sarana pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi Pinkoperumik (pusat inovasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil), sebagai sarana pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penyediaan Pinkoperumik sebagai sarana pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Bordir, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan kegiatan riset dan inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD, seperti CSR, dana pemerintah pusat, provinsi, dsb.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan usaha mikro dan PUD, dengan koordinasi dengan semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Bordir.	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi pengembangan usaha mikro dan PUD yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi usaha mikro dan PUD.	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium terpadu untuk pengembangan PUD.	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Bordir.	Terbangunnya laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Bordir Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Bordir.	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Bordir.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, industri menengah-besar) dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Bordir.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Usaha Bordir.
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Usaha Bordir.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Bordir.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Bordir.	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada pelaku Usaha Bordir.	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Usaha Bordir.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Bordir.	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir .	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir.	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir.	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi produk Usaha Bordir.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Bordir.	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Usaha Bordir.	Terciptanya desain promosi dan kampanye Usaha Bordir.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Bordir.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Bordir.	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Usaha Bordir.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Bordir.	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Usaha Bordir.	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang award untuk maju ke tingkat nasional.	Evaluasi kegiatan *innovation award.*
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Bordir.	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda dibidang Usaha Bordir.	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda di bidang Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait Usaha Bordir	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Usaha Bordir.	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda Usaha Bordir

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasiny a tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Bordir.	Tersusunnya rancangan database teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Bordir.	Terbentuknya database yang menyediakan informasi mengenai teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Bordir.	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Bordir.	Sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pemanfaatan database yang memuat kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Bordir.	Evaluasi kegiatan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Bordir

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Bordir.	Tersusunnya rencana prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Bordir.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Bordir.
Penyelenggaraa n pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya pengembangan Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembang an Usaha Bordir.	Terselenggarany a forum koordinasi antara pelaku usaha bordir dengan lain yang saling berhubungan.	TerbentuknyaUs aha Bordir.	Terlaksanany a kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait usaha bordir kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.	Evaluasi Usaha Bordir.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Bordir.	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Usaha Bordir.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Usaha Bordir.	Terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Usaha Bordir.	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Bordir.	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Usaha Bordir.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Bordir.	Terselenggaranya sosialisasi isu standar produk dalam pengembangan Usaha Bordir.	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar dalam pengembangan Usaha Bordir.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Bordir.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Bordir.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar produk Usaha Bordir.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir.	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran Usaha Bordir.	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir.	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir.	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir.	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir.

VI.1.2.2 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Padi

Tabel 6.2 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Pertanian Padi Tahun 2025-2029

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Pertanian Padi.	Terbitnya Peraturan Bupati terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Terbitnya Peraturan Bupati mengenai Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah	Terbitnya Peraturan Daerah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan perencanaan cadangan pangan daerah	Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi	Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pertanian Padi	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Pertanian Padi.	Memperbarui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan dengan pihak e tiga	Revisi SK, penyusunan naskah akademik	Penyusunan perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Monitoring dan evaluasi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Monitoring dan evaluasi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Pertanian Padi, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Terbitnya Surat Edaran terkait pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan dan prioritas Penggunaan Dana Desa 20% pertanian untuk Cadangan Pangan di Desa.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan usaha mikro dan PUD, dengan koordinasi dengan semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.
Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan Kuantitas indikasi geografis pada Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya identifikasi potensi PUD yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro mengenai potensi PUD yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan potensi PUD yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi PUD yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis.	Evaluasi pendataan potensi PUD yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi usaha mikro dan PUD:	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium terpadu Wonorejo untuk pengembangan PUD. - Produksi benih inti	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu Wonorejo guna pengembangan Usaha Pertanian Padi. - Produksi benih sejenis -	Optimalisasi laboratorium terpadu Wonorejo guna pengembangan Usaha Pertanian Padi Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu. - Produksi benih inti - Produksi benih sumber	Optimalisasi laboratorium terpadu Wonorejo guna pengembangan Usaha Pertanian Padi. - Produksi benih inti - Produksi benih sumber	Evaluasi pemanfaatan laboratorium terpadu Wonorejo guna pengembangan Usaha Pertanian Padi. - Produksi benih inti - Produksi benih sumber

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, industri menengah-besar) dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Usaha Pertanian Padi.
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Pertanian Padi.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Pertanian Padi. Pengembangan pada beberapa kecamatansentra produksi padi di pasuruan	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada Usaha Pertanian Padi	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi Usaha Pertanian Padi.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.	Terciptanya desain promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Usaha Pertanian Padi	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke. tingkat nasional.	Evaluasi kegiatan *innovation award.*
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;.	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Pertanian Padi.	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda di bidang Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda di bidang Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda Usaha Pertanian Padi.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pertanian Padi.	Tahun 2025 dilaksanakan karakterisasi dan pendataan varietas, uji adaptif di 10 lokasi, uji ketahanan hama dan penyakit di BSIP padi, produksi benih inti padi inbrida seluas 0,25 Ha. Di tahun 2026 produksi benih penjenis (BS) 1 Ha, Launching varietas padi asal pasuruan, pengembangan pada 4 kecamatan sentra padi di kabupaten pasuruan seluas 1 Ha	Produksi benih inti 0,25 Ha, produksi benih sumber benih penjenis (BS), Foundation seed (FS), Stock seed (SS), Extension seed (ES) sebanyak 1 Ha, pengembangan pada 4 sentra kecamatan padi di Pasuruan sebanyak 1 Ha	Produksi benih inti 0,25 Ha, produksi benih sumber (BS, FS, SS, ES) sebanyak 1 Ha	Produksi benih inti 0,25 Ha, produksi benih sumber (BS, FS, SS, ES) sebanyak 1 Ha	Pengembangan varietas padi jelita

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya kajian identifikasi dan analisis mengenai jenis-jenis pangan lokal, memuat kondisi produksi, pemasaran, dan harga pangan setempat	Penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten dan insfrastruktur pendukung kemandirian pangan	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya pengembangan usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi Jelita: - Uji Adaptasi di 10 lokasi (kabupaten)	Terselenggaranya forum koordinasi antara peneliti Padi Jelita dan pelaku usaha Pertanian Padi Jelita dengan lain yang saling berhubungan. - Pengembangan pada 4 kecamatan sentra produksi padi di Pasuruan	Terbentuknya inovasi Pertanian Padi Jelita.	Terlaksanaanya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait Usaha Pertanian Padi Jelita kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.	Evaluasi Usaha Pertanian Padi Jelita.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Usaha Pertanian Padi: - Uji ketahanan hama dan penyakit di BSIP Padi Subang - Uji mutu gabah dan beras di BSIP - Analisis data dan penyusunan proposal varietas	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Usaha Pertanian Padi.	terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Usaha Pertanian Padi.	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Pertanian Padi.	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Usaha Pertanian Padi.

Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Pertanian Padi.	Terselenggaranya sosialisasi isu standar produk dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pertanian Padi.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Pertanian Padi.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar Usaha Pertanian Padi.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi.	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi.	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi.

Sumber: data diolah, 2025

VI.1.2.3 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Usaha Peternakan Daging

Tabel 6.3 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Peternakan Daging Tahun 2025-2029

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan PUD.	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.

Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Peternakan Daging di Kabupaten Pasuruan.	Tersusunnya rancangan penyediaan infrastruktur prioritas dan revitalisasi UPT Peternakan sebagai sentra pelatihan usaha peternakan dan persiapan penambahan puskeswan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen peternakan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.	Pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas dan revitalisasi UPT Peternakan sebagai sentra pelatihan usaha peternakan dan penambahan puskeswan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen peternakan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan lainnya.	Pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas dan revitalisasi UPT Peternakan sebagai sentra pelatihan usaha peternakan dan penambahan puskeswan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen peternakan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan lainnya.	Pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas dan revitalisasi UPT Peternakan sebagai sentra pelatihan usaha peternakan dan penambahan puskeswan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen peternakan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan lainnya.	Evaluasi penyediaan infrastruktur prioritas dan revitalisasi UPT Peternakan sebagai sentra pelatihan usaha peternakan dan penambahan puskeswan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen peternakan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan lainnya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Peternakan Daging, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan dan bantuan benih/bibit ternak, bibit HPT, dan peralatan peternakan. Berikut penyediaan obat-obatan, vaksin untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.	Terlaksananya bantuan benih/bibit ternak, bibit HPT, dan peralatan peternakan. Juga penyediaan obat-obatan, vaksin untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.	Terlaksananya bantuan benih/bibit ternak, bibit HPT, dan peralatan peternakan. Juga penyediaan obat-obatan, vaksin untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.	Terlaksananya bantuan benih/bibit ternak, bibit HPT, dan peralatan peternakan. Juga penyediaan obat-obatan, vaksin untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.	Evaluasi penerimaan bantuan benih/bibit ternak, bibit HPT, dan peralatan peternakan. Juga penyediaan obat-obatan, vaksin untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi pengembangan usaha mikro dan PUD yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan ;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya pemetaan pengadaan bibit ternak dan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain.	Pelaksanaan pengadaan bibit ternak dan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain.	Pelaksanaan pengadaan bibit ternak dan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain.	Pelaksanaan pengadaan bibit ternak dan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain.	Evaluasi Pelaksanaan pengadaan bibit ternak dan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium terpadu untuk pengembangan PUD.	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Peternakan Daging .	Terbangunnya laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Peternakan Daging Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Peternakan Daging.	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Peternakan Daging.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, industri menengah-besar) dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Peternakan Daging.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Usaha Peternakan Daging.

Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian identifikasi penambahan SDM Peternakan dan kesehatan hewan (Medik dan Paramedik)	Implementasi penambahan SDM Peternakan dan kesehatan hewan (Medik dan Paramedik)	Implementasi penambahan SDM Peternakan dan kesehatan hewan (Medik dan Paramedik)	Identifikasi tantangan/hambatan dan langkah-langkah dalam penambahan SDM Peternakan dan kesehatan hewan (Medik dan Paramedik)	Evaluasi pelaksanaan penambahan SDM Peternakan dan kesehatan hewan (Medik dan Paramedik)

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi, rencana pelatihan budidaya ternak, teknologi peternakan, olahan hasil ternak, kehalalan, dan bantuan peralatan kompos (Lekok)	Tersusunnya pelatihan budidaya ternak, teknologi peternakan, olahan hasil ternak, kehalalan, dan bantuan peralatan kompos (Lekok)	Terselenggarakannya pelatihan budidaya ternak, teknologi peternakan, olahan hasil ternak, kehalalan, dan bantuan peralatan kompos (Lekok)	Terselenggarakannya pelatihan budidaya ternak, teknologi peternakan, olahan hasil ternak, kehalalan, dan bantuan peralatan kompos (Lekok)	Evaluasi pelatihan budidaya ternak, teknologi peternakan, olahan hasil ternak, kehalalan, dan bantuan peralatan kompos (Lekok)

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging .	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging	Terciptanya desain promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging.	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging.
Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Usaha Peternakan Daging.	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan terkait Usaha Peternakan Daging .	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan terkait Usaha Peternakan Daging .	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke tingkat nasional.	Evaluasi kegiatan *innovation award.*

Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset Usaha Peternakan Daging .	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda di bidang Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda di bidang Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait Usaha Peternakan Daging .	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Usaha Peternakan Daging.	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda Usaha Peternakan Daging .

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya rancangan monitoring terhadap benih/bibit ternak, bibit HPT, obat-obatan, dan peralatan peternakan yang beredar di masyarakat.	Terlaksanakannya monitoring terhadap benih/bibit ternak, bibit HPT, obat-obatan, dan peralatan peternakan yang beredar di masyarakat.	Terlaksanakannya monitoring terhadap benih/bibit ternak, bibit HPT, obat-obatan, dan peralatan peternakan yang beredar di masyarakat.	Terlaksanakannya monitoring terhadap benih/bibit ternak, bibit HPT, obat-obatan, dan peralatan peternakan yang beredar di masyarakat.	Evaluasi kegiatan monitoring terhadap benih/bibit ternak, bibit HPT, obat-obatan, dan peralatan peternakan yang beredar di masyarakat.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian identifikasi peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman.	Tersusunnya rencana peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman.	Implementasi peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman.	Implementasi peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman.	Evaluasi peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya pengembangan usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian identifikasi dan penetapan bibit ternak unggulan dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman Kabupaten Pasuruan.	Penyebaran bibit ternak unggulan dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman Kabupaten Pasuruan.	Penyebaran bibit ternak unggulan dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya penyebaran bibit ternak unggulan dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman Kabupaten Pasuruan	Evaluasi terhadap penyebaran bibit ternak unggulan dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman Kabupaten Pasuruan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Usaha Peternakan Daging.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Usaha Peternakan Daging	Terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Usaha Peternakan Daging.	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Peternakan Daging d	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Usaha Peternakan Daging

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Peternakan Daging.	Terselenggaranya sosialisasi isu standar produk dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging.	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar dalam pengembangan usaha peternakan Daging.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Peternakan Daging.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Peternakan Daging.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar produk Usaha Peternakan Daging.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging.	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging.	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging.

Sumber: data diolah, 2025

VI.1.2.4 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Usaha Perikanan Lele

Tabel 6.4 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Perikanan Lele Tahun 2025-2029

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan PUD.	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.

Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.
Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya rancangan penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Pembangunan penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi usaha perikanan lele, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan kegiatan riset dan inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD, seperti CSR, dana pemerintah pusat, provinsi, dsb.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan usaha mikro dan PUD, dengan koordinasi dengan semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi pengembangan usaha mikro dan PUD yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi usaha mikro dan PUD.	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium terpadu untuk pengembangan PUD.	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Perikanan Lele.	Terbangunnya laboratorium terpadu guna pengembangan produk makanan berbasis olahan Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Perikanan Lele.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha usaha menengah-besar) dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Perikanan Lele..	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Usaha Perikanan Lele.
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Perikanan Lele.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Perikanan Lele.	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada pelaku Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;.	Diselenggarakan nya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengemban gan usaha perikanan lele.	Terselenggarakan nya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terselenggarakan nya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi produk Usaha Perikanan Lele.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye usaha perikanan lele.	Tersusunnya pemetaan/identifik asi strategi promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele.	Terciptanya desain promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau *reward* terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Usaha Perikanan Lele.	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke tingkat nasional..	Evaluasi kegiatan *innovation award*
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Perikanan Lele.	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda di bidang Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda di bidang Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda Usaha Perikanan Lele.

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasiny a tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya rancangan database teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Perikanan Lele.	Terbentuknya database yang menyediakan informasi mengenai teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pemanfaatan database yang memuat kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi kegiatan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Perikanan Lele.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele;	Tersusunnya rencana prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Perikanan Lele.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya pengembangan usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha perikanan lele dengan lain yang saling berhubungan.	Terbentuknya Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait usaha perikanan lele kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.	Evaluasi Usaha Perikanan Lele.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Usaha Perikanan Lele.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Usaha Perikanan lele.	terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Usaha Perikanan Lele.	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Perikanan Lele.	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Usaha Perikanan Lele.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Perikanan Lele.	Terselenggaranya sosialisasi isu standar produk dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele.	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar dalam pengembangan usaha perikanan lele.	Fasilitasi pemenuhan standar produk perikanan lele.	Fasilitasi pemenuhan standar produk perikanan lele.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar perikanan lele.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele.	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran usaha perikanan lele.	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele.	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele.

Sumber: data diolah, 2025

VI.1.2.5 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner

Tabel 6.5 Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) Pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner Tahun 2025-2029

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan PUD.	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai usaha mikro dan PUD.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya rancangan penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Pembangunan penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penyediaan infrastruktur prioritas pendukung dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Pariwisata Kuliner, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan kegiatan riset dan inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD, seperti CSR, dana pemerintah pusat, provinsi, dsb.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan usaha mikro dan PUD, dengan koordinasi dengan semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi pengembangan usaha mikro dan PUD yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam pengembangan usaha mikro dan PUD.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi usaha mikro dan PUD.	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium terpadu untuk pengembangan PUD.	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terbangunnya laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.
Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Koordinasi antara pihak- pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha usaha menengah-besar) dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Usaha Pariwisata Kuliner.

Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Pariwisata Kuliner.	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Usaha Pariwisata Kuliner.	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada pelaku Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;.	Diselenggarakan nya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengemban gan Usaha Pariwisata Kuliner.	erselenggarakannya onferensi/ seminar asil riset dan inovasi ntuk pengembangan Usaha Pariwisata uliner. Tersusunnya roceeding asil konferensi/ eminar hasil riset dan ovasi untuk engembangan Usaha ariwisata Kuliner.	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner. Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi produk Usaha Pariwisata Kuliner.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Terciptanya desain promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau *reward* terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Usaha Pariwisata Kuliner.	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke tingkat nasional..	Evaluasi kegiatan *innovation award*

Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Pariwisata Kuliner.	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda di bidang Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda di bidang Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda Usaha Pariwisata Kuliner.

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasiny a tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya rancangan database teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Terbentuknya database yang menyediakan informasi mengenai teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pemanfaatan database yang memuat kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi kegiatan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembang an Usaha Pariwisata Kuliner.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner;	Tersusunnya rencana prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembang an Usaha Pariwisata Kuliner.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner dengan lain yang saling berhubungan.	Terbentuknya Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksanaanya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait Usaha Pariwisata Kuliner kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.	Evaluasi Usaha Pariwisata Kuliner .
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Usaha Pariwisata Kuliner.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terselenggaranya sosialisasi isu standar produk dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar Usaha Pariwisata Kuliner.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terlaksananya implementasi danevaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.

VI.1.3 Peta Jalan Riset dan Inovasi Tematik Permasalahan Utama Daerah

VI.1.3.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Permasalahan Kemiskinan

Tabel 6.6 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah pada Permasalahan Kemiskinan Tahun 2026-2030

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung Pengentasan Kemiskinan	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait Pengentasan Kemiskinan	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pengentasan Kemiskinan	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pengentasan Kemiskinan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai Pengentasan Kemiskinan.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai Pengentasan Kemiskinan.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai Pengentasan Kemiskinan.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai Pengentasan Kemiskinan.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Pengentasan Kemiskinan	1. Revitalisasi Pusat Inovasi Daerah di 2 lokasi tertinggal. 2. Penyediaan akses internet gratis di 10 desa miskin.	1. Pembangunan lab inovasi di 2 desa tertinggal 2. Instalasi peralatan riset sederhana (contoh: alat pengolahan pangan) di 2 desa.	Ekspansi pusat inovasi ke 5 wilayah baru	Optimalisasi penggunaan fasilitas lab melalui pelatihan teknis untuk 300 masyarakat miskin	Evaluasi dampak infrastruktur terhadap penurunan angka kemiskinan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Pengentasan Kemiskinan serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan kegiatan riset dan inovasi Pengentasan Kemiskinan, seperti CSR, dana pemerintah pusat, provinsi, dsb.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan inovasi Pengentasan Kemiskinan dengan koordinasi semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk inovasi Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan kuantitas HKI pada Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi Pengentasan Kemiskinan yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam Pengentasan Kemiskinan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder urusan Pengentasan Kemiskinan.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi urusan Pengentasan Kemiskinan.	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan Pengentasan Kemiskinan.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan Pengentasan Kemiskinan.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder urusan Pengentasan Kemiskinan.

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus Pengentasan Kemiskinan.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terbangunnya laboratorium terpadu guna Pengentasan Kemiskinan Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan Pengentasan Kemiskinan
Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha usaha menengah-besar) dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Pengentasan Kemiskinan

Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Pengentasan Kemiskinan	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Pengentasan Kemiskinan	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada pelaku Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Pengentasan Kemiskinan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Diselenggarakanny a kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada dinas terkait yang menjadi model percontohan pengembangan Pengentasan Kemiskinan	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk Pengentasan Kemiskinan.	Terselenggarakanny a konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Pengentasan Kemiskinan Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk Pengentasan Kemiskinan	Terselenggarakanny a konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Pengentasan Kemiskinan Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi Pengentasan Kemiskinan.

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi Pengentasan Kemiskinan.	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Pengentasan Kemiskinan	Terciptanya desain promosi dan kampanye Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Pengentasan Kemiskinan
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau *reward* terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Pengentasan Kemiskinan	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke tingkat nasional.	Evaluasi kegiatan *innovation award*
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda .

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Tersusunnya rancangan database teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Pengentasan Kemiskinan	Terbentuknya database yang menyediakan informasi mengenai teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk Pengentasan Kemiskinan	Sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pemanfaatan database yang memuat kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi kegiatan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam Pengentasan Kemiskinan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya rencana prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk Pengentasan Kemiskinan.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk Pengentasan Kemiskinan.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk Pengentasan Kemiskinan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya inovasi pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha Usaha dengan lain yang saling berhubungan.	Terbentuknya Pengembangan Inovasi Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait usaha kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas Pengentasan Kemiskinan.	Evaluasi inovasi Pengentasan Kemiskinan .
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Pengentasan Kemiskinan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan Pengentasan Kemiskinan.	terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Pengentasan Kemiskinan	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai Pengentasan Kemiskinan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar pengembangan yang dihasilkan di bidang Pengentasan Kemiskinan	Terselenggaranya sosialisasi isu standar pengembangan dalam Pengentasan Kemiskinan	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Fasilitasi pemenuhan standar pengembangan Pengentasan Kemiskinan.	Fasilitasi pemenuhan standar pengembangan Pengentasan Kemiskinan.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar pengembangan Pengentasan Kemiskinan.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Pengentasan Kemiskinan

Sumber: data diolah, 2025

VI.1.3.2 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Untuk Permasalahan Ketenagakerjaan

Tabel 6. 7 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah pada Permasalahan Ketenagakerjaan Tahun 2026-2030

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Ketenagakerjaan	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung Ketenagakerjaan	Terbitnya peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau peraturan bupati (Peraturan Bupati) terkait Ketenagakerjaan	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Ketenagakerjaan	Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait ketenagakerjaan.	Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait ketenagakerjaan.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Ketenagakerjaan	Tersusunnya rancangan sistem informasi terintegrasi (dengan program satu data Indonesia) yang menyediakan informasi mengenai ketenagakerjaan.	Tersusunnya desain basis data (meta data/ elemen data) dalam sistem satu data mengenai ketenagakerjaan.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai ketenagakerjaan.	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai meta data/ elemen data dalam sistem satu data mengenai ketenagakerjaan.	Evaluasi basis data dalam sistem satu data mengenai ketenagakerjaan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Ketenagakerjaan	Revitalisasi perencanaan pusat pelatihan kerja (BLK) di wilayah strategis yang terintegrasi dengan Riset dan Inovasi	Peningkatan kapasitas BLK hingga mampu melatih 350 peserta per tahun	Ekspansi BLK ke 4 wilayah kecamatan, menjangkau 400 peserta per tahun	Operasionalisasi BLK dengan pelatihan untuk 450 peserta per tahun	Operasionalisasi BLK dengan pelatihan untuk 500 peserta per tahun
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi ketenagakerjaan serta memperkuat perencanaan dan penganggaran.	Tersusunnya Identifikasi potensi sumber pembiayaan kegiatan riset dan inovasi ketenagakerjaan, seperti CSR, dana pemerintah pusat, provinsi, dsb.	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, sentra IKM/ sentra usaha mikro sesuai PUD, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan Ketenagakerjaan	Tersusunnya strategi peningkatan sumber pembiayaan pengembangan inovasi ketenagakerjaan dengan koordinasi semua stakeholder, seperti perusahaan besar terkait CSR, K/L, provinsi, dsb.	Tersusun Rencana penggunaan anggaran untuk inovasi ketenagakerjaan.	Evaluasi penerimaan dan penggunaan anggaran untuk ketenagakerjaan.

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Peningkatan kuantitas HKI pada Ketenagakerjaan	Terlaksananya identifikasi potensi teknologi inovasi ketenagakerjaan yang dapat didaftarkan HKI (merk, hak cipta, paten, rahasia perusahaan, dsb).	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, usaha mikro tentang HKI.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI.	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat.	Evaluasi pendataan dan pendaftaran HKI teknologi inovasi dalam Ketenagakerjaan

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder urusan ketenagakerjaan.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan riset dan inovasi urusan ketenagakerjaan.	Terbentuknya forum kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan ketenagakerjaan.	Tersusunnya kegiatan kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan ketenagakerjaan.	Terciptanya teknologi inovasi hasil kolaborasi riset dengan para stakeholder urusan ketenagakerjaan.	Evaluasi kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder urusan ketenagakerjaan.

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus ketenagakerjaan.	Tersusunnya pemetaan kebutuhan laboratorium pengembangan ketenagakerjaan	Tersusunnya rancangan desain laboratorium terpadu guna pengembangan ketenagakerjaan	Terbangunnya laboratorium terpadu guna ketenagakerjaan Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium terpadu.	Pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan ketenagakerjaan	Evaluasi pembangunan dan pemanfaatan laboratorium terpadu guna pengembangan ketenagakerjaan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar Kelembagaan;	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya rancangan jalinan kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Koordinasi antara pihak-pihak terkait baik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha usaha menengah-besar) dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Penandatangan MOU kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Ketenagakerjaan.	Evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam mengembangkan Ketenagakerjaan

Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan Ketenagakerjaan	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Ketenagakerjaan	Implementasi transfer teknologi hasil riset dan inovasi kepada pelaku Ketenagakerjaan	Identifikasi tantangan/ hambatan dan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan/ hambatan dan dalam upaya difusi inovasi hasil riset kepada pelaku Ketenagakerjaan	Evaluasi difusi inovasi dalam pengembangan Ketenagakerjaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi;	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi praktik baik hasil riset dan inovasi kepada dinas terkait yang menjadi model percontohan pengembangan Ketenagakerjaan	tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk ketenagakerjaan.	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Ketenagakerjaan Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk ketenagakerjaan	Terselenggarakannya konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Ketenagakerjaan Tersusunnya proceeding hasil konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk ketenagakerjaan	Evaluasi praktik baik dan diseminasi riset dan inovasi ketenagakerjaan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi;	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi ketenagakerjaan.	Tersusunnya pemetaan/identifikasi strategi promosi dan kampanye Ketenagakerjaan	Terciptanya desain promosi dan kampanye Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan promosi dan kampanye Ketenagakerjaan	Evaluasi kegiatan promosi dan kampanye Ketenagakerjaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Apresiasi prestasi inovasi;	Pemberian penghargaan atau *reward* terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Ketenagakerjaan	Tersusunnya rancangan kegiatan pemberian penghargaan hasil teknologi inovasi Ketenagakerjaan	Penyaringan kandidat program *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Terlaksananya kegiatan *innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.	Fasilitasi bagi pemenang *award* untuk maju ke tingkat nasional..	Evaluasi kegiatan *innovation award*
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset	Penjaringan calon pengusaha muda masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mencari potensi calon pengusaha muda	Terlaksananya bimbingan teknis serta workshop bagi calon pengusaha muda	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait Ketenagakerjaan	Evaluasi kegiatan pengembangan pengusaha muda .

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Tersusunnya rancangan database teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Ketenagakerjaan	Terbentuknya database yang menyediakan informasi mengenai teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Ketenagakerjaan	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk ketenagakerjaan	Sosialisasi dan pelatihan SDM dalam pemanfaatan database yang memuat kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam ketenagakerjaan.	Evaluasi kegiatan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam ketenagakerjaan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk ketenagakerjaan	Tersusunnya rencana prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk ketenagakerjaan.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk ketenagakerjaan.	Implementasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk ketenagakerjaan.	Evaluasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk ketenagakerjaan

Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	Terselenggaranya inovasi pengembangan Ketenagakerjaan	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha Usaha dengan lain yang saling berhubungan.	Terbentuknya Pengembangan Inovasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait usaha kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas ketenagakerjaan.	Evaluasi inovasi ketenagakerjaan .
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Ketenagakerjaan	Terciptanya kajian identifikasi kebijakan pemerintah pusat terkait Ketenagakerjaan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan ketenagakerjaan.	terselenggaranya kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Ketenagakerjaan	Terciptanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Ketenagakerjaan	Evaluasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai ketenagakerjaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Terdapat sosialisasi isu standar pengembangan yang dihasilkan di bidang Ketenagakerjaan	Terselenggaranya sosialisasi isu standar pengembangan dalam Ketenagakerjaan	Terselenggaranya bimbingan teknis terkait isu standar pengembangan ketenagakerjaan	Fasilitasi pemenuhan standar pengembangan ketenagakerjaan.	Fasilitasi pemenuhan standar pengembangan ketenagakerjaa n.	Fasilitasi dan Evaluasi kegiatan fasilitasi pemenuhan teknis terkait isu standar pengembangan ketenagakerjaan.
Penguatan kerjasama internasional;	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan Ketenagakerjaan	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional dalam pengembangan ketenagakerjaan	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan Ketenagakerjaan

Sumber: data diolah, 2025

I.1 Indikasi Program

Program Indikatif merupakan rencana strategis lima tahunan yang dirancang untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD) dan mengatasi permasalahan utama daerah melalui pendekatan ekosistem riset dan inovasi. Program ini bersifat tematik dan dilaksanakan secara lintas perangkat daerah (cross-cutting programme), melibatkan kolaborasi antar-PD sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunannya didasarkan pada analisis kontekstual terhadap potensi dan tantangan daerah, dengan kerangka kerja yang memperkuat inovasi berbasis riset.

Dalam implementasinya, Program Indikatif mengacu pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk memastikan kesesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program. Hal ini memudahkan integrasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini diharapkan dapat diadopsi ke dalam RPJMD sebagai panduan mencapai target pembangunan, baik dalam penguatan PUD maupun penyelesaian masalah utama daerah. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Program Indikatif menjadi landasan bagi pembangunan daerah yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan.

I.1.1 Indikasi Program Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)

Sebagaimana disampaikan dalam Peta Jalan Riset dan Inovasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, bahwa riset yang akan dijalankan sesuai dengan program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 dan bergantung kepada isu strategis yang berkembang di periode tahun tersebut dan yang memerlukan dukungan riset dalam memberikan respon terhadap isu strategis tersebut.

Kabupaten Pasuruan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan riset dan studi kelayakan melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBD, DAK, maupun hibah. Namun, meskipun dana riset tersedia, hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan seringkali hanya berakhir sebagai dokumen laporan tanpa tindak lanjut nyata dalam bentuk kebijakan atau program pembangunan. Padahal, berbagai studi strategis telah dilakukan, seperti riset pengembangan sentra IKM pengolahan hasil pembudidayaan ikan, kajian peningkatan produktivitas nelayan, serta studi pengembangan blue economy melalui DAK 2026. Sayangnya, rekomendasi dari riset-riset tersebut jarang dijadikan dasar pengambilan keputusan atau perencanaan program di tingkat PD.

Namun demikian dalam penyusunan dokumen RIPJPID ini telah muncul berbagai topik yangmemerlukan riset untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, seperti berikut ini:

Persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya political will dari jajaran dinas dan pimpinan daerah dalam mengadopsi hasil riset sebagai landasan kebijakan. Para pengambil keputusan di Kabupaten Pasuruan masih cenderung mengandalkan pendekatan business as usual atau kebijakan top-down, tanpa merujuk pada temuan riset yang sebenarnya sudah tersedia. Akibatnya, meskipun bukti dan rekomendasi penelitian ada, implementasinya dalam perencanaan pembangunan sangat minim. Hasil riset juga belum terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD 2025-2029 atau Renstra PD, karena tidak ada mekanisme yang mewajibkan PD untuk menggunakan penelitian sebagai acuan.

Tanpa perubahan mindset dan komitmen struktural dari pimpinan daerah, riset di Kabupaten Pasuruan akan tetap menjadi kegiatan formalitas belaka, tanpa memberikan dampak nyata bagi pembangunan. Padahal, dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, seharusnya hasil riset bisa menjadi penentu arah kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki hal ini, Kabupaten Pasuruan berisiko kehilangan peluang memanfaatkan penelitian sebagai alat mempercepat pembangunan daerah.

I.1.2 Indikasi Program Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)

Pembahasan Indikasi Program riset dan inovasi diuraikan menurut tema-tema PUD, yaitu usaha bordir, usaha pertanian padi, usaha peternakan daging, usaha perikanan lele dan usaha pariwisata kuliner. Secara rinci disajikan dalam lima tabel berikut ini:

Tabel 7.1 Indikasi Program Pengembangan Usaha Bordir

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penerbitan peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau Peraturan Bupati (Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Bordir	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
			Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Bordir	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Bordir	Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Bordir	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
				KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Bordir	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Bordir serta memperkuat Penelitian dan Pengembangan dan penganggaran	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Bordir	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan Usaha Bordir	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Bordir	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Dinkoperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bagian Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Bordir	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Bordir	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye Usaha Bordir	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Apresiasi prestasi inovasi	*Innovation award bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan*	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Bordir, berbasis riset terkait	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Bordir	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Bordir	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan Usaha Bordir	Terselenggaranya pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
				USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Bordir	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bag.Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Bordir	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Bordir	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 7.2 Indikasi Program Pengembangan Usaha Pertanian Padi

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penerbitan peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau Peraturan Bupati(Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Pertanian Padi	Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
			Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pertanian Padi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Pertanian Padi, serta memperkuat Penelitian dan Pengembangan dan penganggaran	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Pertanian Padi	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pertanian Padi	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Pertanian Padi	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan pengawasan distribusi bahan pangan (beras)	Pengawasan distribusi beras pada pelaku usaha	Pengawasan perdagangan beras dalam rangka menjaga stabilitas harga	Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Pertanian Padi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Pertanian	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Apresiasi prestasi inovasi	*Innovation award bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan*	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
		pengembangan Usaha Pertanian Padi		
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Pertanian Padi, berbasis riset terkait	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan Uaha Pertanian Padi	Terselenggaranya pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Pertanian Padi	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pertanian Padi	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Pertanian Padi	Pertanian,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 7.3 Indikasi Program Pengembangan Usaha Peternakan Daging

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset	Penerbitan peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk	Peternakan	Program Penyediaan dan

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
dan Inovasi di daerah;	Peraturan Bupati(Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD	Usaha Peternakan Daging		Pengembangan Sarana Pertanian
			Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Peternakan Daging	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Peternakan Daging	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Peternakan Daging, serta memperkuat Penelitian dan Pengembangan dan penganggaran	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Peternakan Daging	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Peternakan Daging dan Susu	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
	Usaha Peternakan Daging	pengembangan Usaha Peternakan Daging		
				Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Peternakan Daging	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Peternakan Daging	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
				MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Apresiasi prestasi inovasi	*Innovation award bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan*	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Peternakan Daging, berbasis riset terkait	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Peternakan Daging	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	PembentukanUsaha Peternakan Daging	Terselenggaranya pengembanganUsaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Perizinan Usaha Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Peternakan Daging	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Bag. Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Peternakan Daging	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Peternakan Daging	Peternakan,	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Peternakan Daging	Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 7.4 Indikasi Program Pengembangan Usaha Perikanan Lele

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penerbitan peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau Peraturan Bupati(Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Perikanan Lele	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Perikanan Lele, serta memperkuat Penelitian dan Pengembangan dan penganggaran	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Perikanan Lele	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Perikanan Lele	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Perikanan Lele	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Perikanan Lele	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Perikanan Lele	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
Apresiasi prestasi inovasi	*Innovation award bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan*	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Perikanan	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
	Lele, berbasis riset terkait			
			Dinkoperindag	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Perikanan Lele	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	PembentukanUsaha Perikanan Lele	Terselenggaranya pengembanganUsaha Perikanan Lele	Perikanan, Bapperida, Dinkoperindag	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Perikanan Lele	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Bag. Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi pemenuhan standar produk Perikanan Lele	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinkoperindag	
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
	pengembangan dan pemasaran produk Usaha Perikanan Lele			
			Dinkoperindag	
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

(Sumber: data diolah, 2025)

Tabel 7.5 Indikasi Program Pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Riset dan Inovasi di daerah;	Penerbitan peraturan daerah (Peraturan Daerah) atau Peraturan Bupati(Peraturan Bupati) terkait pengembangan usaha mikro dan PUD.	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk Usaha Pariwisata Kuliner. inovasi untuk Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi Usaha Pariwisata, serta memperkuat Penelitian dan Pengembangan dan Penganggaran.	Pariwisata, Bapperida,.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Pariwisata Kuliner.	Peningkatan kuantitas HKI pada Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD.	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penguatan kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara stake holder dan pelaku usaha	Bertambahnya jumlah IKM yang berkembang dan produktif	Dinkoperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus produk unggulan daerah Usaha Pariwisata Kuliner..	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan;	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Pariwisata Kuliner.	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penguatan kemitraan antar pelaku usaha	Kerjasama kemitraan antar pelaku usaha untuk mengembangkan produk IKM makan dan minum	Menjalin kerja sama antara IKM makan dan minum dengan pengusaha dibidang kuliner	Dinkoperindag	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi;	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Pariwisata Kuliner.	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
kepada pelaku inovasi;	Usaha Pariwisata Kuliner.			DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Peningkatan promosi dan kampanye Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Promosi dagang melalui e commerce	Promosi dagang secara on line dan off line	Peningkatan kualitas promosi	Dinkoperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Apresiasi prestasi inovasi;	*Innovation award bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan.*	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset;	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Pariwisata Kuliner, berbasis riset terkait	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Terinventarisasinya tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Dinkoperindag	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
untuk promosi PUD;				PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah;	PembentukanUsaha Pariwisata Kuliner.	Terselenggaranya pengembanganUsaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pengembangan inovasi produk berbasik potensi unggulan daerah	Pengembangan produk bagi pelaku usaha dibidang makanan dan minuman	Terselenggaranya pelatihan bagi IKM makanan dan minuman	Dinkoperindag	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Pariwisata Kuliner.	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan kebijakan pusat tentang pengembangan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Bag. Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Dinkoperindag	
Penguatan kerjasama internasional;	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pariwisata Kuliner.	Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penguatan kualitas pruduk IKM	Kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait	Terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha	Dinkoperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Elemen/ Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	Urusan Pemerintahan	Program Indikatif
	masalah ekspor makanan dan minuman	Makanan dan Minuman		
			Bag. Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Bapperida	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah

Sumber: data diolah, 2025

I.1.3 Indikasi Program Permasalahan Utama Daerah

Pembahasan Indikasi Program riset dan inovasi diuraikan menurut tema-tema permasalahan utama daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.6 Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Permasalahan Kemiskinan)

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penerbitan regulasi penanggulangan kemiskinan berbasis riset dan inovasi	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Setda (Bagian Hukum)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pengembangan basis data kemiskinan daerah	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	-		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Penyediaan infrastruktur dasar riset dan inovasi tentang kemiskinan	Sosial, PUPR	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Penyediaan skema pembiyaan riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Penguatan kerjasama riset dan inovasi untuk meningkatkan	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
	pendapatan masyarakat miskin		
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Pengembangan jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Terdapat sarana pendukung proyek percontohan untuk	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Bimbingan teknis dan pelatihan untuk masyarakat penerima program (PKH, lainnya)	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan pengetahuan teknologi masyarakat miskin	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Perlu adanya sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Sosial	
Promosi dan kampanye inovasi;		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Apresiasi prestasi inovasi	Pengembangan budaya inovasi bagi penerima PKH dan bantuan sosial lainnya	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pengembangan aktivitas usaha masyarakat miskin	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		UMKM,	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Peningkatan pengetahuan teknologi masyarakat miskin	Sosial	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	Optimalisasi kerjasama riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Program Inovasi pengentasan kemiskinan	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyelarasan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan (sinergi program)	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
		Bag. Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Elemen 6: Penyelearasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyusunan standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan	sosial	

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Penguatan kerjasama internasional	Program kerjasama internasional	Setda (Bagian Kerjasama)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		sosial	
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 7. 7 Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Permasalahan Ketenagakerjaan)

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penyusunan Perda tentang Pengembangan Ketenagakerjaan Berbasis Inovasi. Revitalisasi regulasi UPT Pelatihan Kerja.	Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Dan Produktifitas / UPT LKD REjoso
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pembangunan platform data terpadu ketenagakerjaan terintegrasi dengan BPS.	Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	-		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya Keberadaan UPT LKD Pasuruan secara langsung mendukung penyerapan tenaga kerja yang langsung memberikan keterampilan kepada	Ketenegakerjaan	Program Pelatihan Dan Produktifitas / UPT LKD

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
	masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.		
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Tersedianya Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Ketenegakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Program sosialisasi pentingnya pendaftaran HaKI Kabupaten Pasuruan.	Ketenagakerjaan	-
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 2			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Program kerjasama dengan BRIN swasta atau perguruan tinggi dalam rangka penyerapan ketenagakerjaan.	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Program Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 3			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Program penguatan kemitraan antarkelembagaan	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Peningkatan difusi inovasi	Program model dan strategi transfer	Pertanian, Ketenagakerjaan	Porogram Pelatihan & Produktivitas, PROGRAM

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
	teknologi ke pelaku usaha pertanian. Dan belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.		PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN (DKPP),PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (DKPP), PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN (DKPP)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Program sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pemangku kepentingan.	Ketenagakerjaan	-
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 4			
Promosi dan kampanye inovasi;	Program jobfair yang berkaitan dengan inovasi pencari kerja.	Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Apresiasi prestasi inovasi	Program inovasi penyerapan tenaga kerja dalam perlombaan inovasi	Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Program sinergi antara basis data, penyebaran perusahaan besar menengah hingga kecil	Ketenagakerjaan	Program HI & Jamsos
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Program inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun.	Ketenagakerjaan, UMKM	-
Elemen 5			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Program sosialisasi RIPJPID sebagai dasar riset dan inovasi daerah untuk penyerapan tenaga kerja.	Ketenagakerjaan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikasi Program	Urusan	Program Indikatif
untuk Permasalahan Utama Daerah			
		Bappelitbangda	Program Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Program inovasi penyerapan tenaga kerja	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program penyesuaiaan perencanaan kabupaten- provinsi-pemerintah pusat.	Bappelitbangda, perencanaan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 6			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Program keaktifan dalam forum-forum global atau delegasi yang mengikuti perkembangan atau yang lainnya dalam skala internasional.	Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah
Penguatan kerjasama internasional	Program Kerjasama Internasional	Setda (Bagian Kerjasama)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Ketenagakerjaan	-
		Bappelitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah

BAB II
PENUTUP

II.1 Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi riset di Kabupaten Pasuruan memiliki peran krusial sebagai penggerak utama dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah yang komprehensif. Dengan struktur kelembagaan yang semakin matang dan kapasitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan, unit litbang diharapkan mampu menjadi katalisator yang menghubungkan berbagai stakeholder pembangunan. Sinergi antara program-program teknis di tingkat Perangkat Daerah dengan kegiatan penelitian akan menciptakan suatu sistem perencanaan yang benar-benar berbasis data dan bukti empiris. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan solusi inovatif untuk tantangan kompleks yang dihadapi Pasuruan, mulai dari peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri kreatif, hingga optimalisasi potensi wisata berbasis masyarakat.

Berbagai inisiatif litbang yang dirancang secara sistematis dan terukur diharapkan dapat menjawab kebutuhan spesifik daerah, khususnya dalam penguatan sektor unggulan seperti agroindustri, pengolahan hasil pembudidayaan ikan, dan ekonomi kreatif. Dengan memadukan kearifan lokal dan teknologi modern, Kabupaten Pasuruan berpotensi menjadi model pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Keberhasilan implementasi model ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, komitmen anggaran, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

II.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi di Kabupaten Pasuruan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Prioritas pertama adalah pengembangan infrastruktur penelitian yang representatif, meliputi pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan kemudian sebagai laboratorium pengujian produk olahan pertanian dan perikanan, serta pusat inovasi yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi. Infrastruktur ini harus didesain untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah secara end-to-end, mulai dari riset bahan baku hingga pengemasan akhir.

Aspek kedua adalah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi, pelatihan teknis bersertifikasi, serta program magang di industri terkait. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dan nasional perlu di Peraturan Daerahlam untuk menciptakan talent pool yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, perlu dibentuk suatu sistem manajemen pengetahuan daerah yang mampu mendokumentasikan, mengkurasi, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kepada para pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Dari sisi pendanaan, diperlukan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran litbang secara progresif, dengan mekanisme pendanaan yang fleksibel namun akuntabel. Skema pendanaan hibah kompetitif dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif dari akademisi dan pelaku usaha. Terakhir, penting untuk membangun jaringan kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, investor, dan pasar global guna memperluas dampak ekonomi dari hasil-hasil inovasi lokal. Dengan paket kebijakan yang holistik ini, Kabupaten Pasuruan akan memiliki fondasi yang kuat untuk mentransformasi potensi lokal menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan selanjutnya merupakan rekomendasi kajian untuk bidang penelitian dan pengembangan menjalankan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab penelitian dan pengembangan. Rekomendasi kajian dengan analisis sebagai berikut:

Analisis Bibliometrik untuk Menentukan Tema Penelitian Akan Datang

1. Latar Belakang

Kebijakan publik pada dasarnya muncul sebagai respon terhadap berbagai tuntutan kebijakan, yakni klaim untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan terhadap isu publik yang disampaikan oleh para aktor seperti masyarakat, perwakilan masyarakat, legislator, maupun pejabat pemerintah (Anderson & James E, 1997). Oleh karena itu, dalam setiap tahapan proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat yang optimal. Sejalan dengan pandangan (Dunn, 2003), permasalahan dalam kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kebutuhan, nilai, atau peluang yang belum terwujud, yang kemudian dianalisis melalui penerapan prosedur analisis kebijakan untuk membangun struktur masalahnya. Selanjutnya, menurut (Michael Hill, 2017) , proses perumusan kebijakan selalu melibatkan pembahasan mengenai siapa yang merumuskan, siapa yang membuat keputusan, serta siapa yang melaksanakan kebijakan, sehingga seluruh aktor perlu terintegrasi dalam satu sistem yang utuh. Namun demikian, (Tosun, 1987), menegaskan bahwa pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks, karena dalam praktiknya sering kali terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi penetapan kebijakan publik, dan hal ini dapat berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya.

Permasalahan kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Banyak kebijakan masih disusun berdasarkan pertimbangan politis, kebiasaan administratif, atau persepsi subjektif para pengambil keputusan, bukan atas dasar temuan riset maupun data empiris yang valid. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan sering tidak tepat sasaran, kurang efektif dalam menyelesaikan masalah, serta tidak berkelanjutan. Beberapa akar persoalan yang mendasari lemahnya penerapan *evidence-based policy* di daerah antara lain adalah keterbatasan kapasitas riset dan analisis kebijakan, minimnya integrasi antara hasil penelitian dengan proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya mekanisme pemetaan pengetahuan yang sistematis. Akibatnya, hasil riset yang tersedia tidak termanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengambilan keputusan publik.

Salah satu pendekatan inovatif yang dapat diterapkan untuk memperkuat dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan adalah melalui analisis bibliometrik, yakni metode untuk memetakan dan mengkaji perkembangan penelitian sebagai dasar penentuan arah kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pengambil kebijakan mengidentifikasi isu strategis, menemukan celah penelitian, serta memahami tren dan fokus kajian yang sedang berkembang melalui visualisasi jaringan pengetahuan seperti hubungan antarpenulis, jurnal, publikasi, dan sitasi. Di sisi lain, peningkatan kapasitas penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di lingkungan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan *evidence-based policy*. Namun, proses penyusunan KTI sering menghadapi kendala, mulai dari kesulitan merumuskan ide secara sistematis, keterbatasan pemahaman metodologi, hingga minimnya akses terhadap referensi ilmiah. Dalam konteks ini, penerapan analisis bibliometrik tidak hanya membantu memperkuat dasar ilmiah kebijakan, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan ekosistem riset di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penerapan kebijakan berbasis bukti di daerah, yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas riset, rendahnya pemanfaatan hasil penelitian, serta belum tersedianya mekanisme pemetaan pengetahuan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang dapat menggambarkan bagaimana analisis bibliometrik berperan dalam memperkuat dasar ilmiah kebijakan publik di tingkat daerah. Menanggapi latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

RQ1. Bagaimana tren publikasi dalam penelitian?
RQ2. Apa saja kata kunci yang sering digunakan dalam penelitian?
RQ3. Negara dan Jurnal mana saja yang berkontribusi terhadap penelitian?
RQ4. Apa saja pertanyaan penelitian masa depan yang mungkin dan penting untuk diselidiki?

2. Literature Review

Kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling terkait yang menyebabkan masyarakat miskin terus terperangkap dalam ketidakberdayaan. Faktor-faktor yang saling terkait ini meliputi pendapatan rendah, kelemahan fisik, isolasi, keterasingan, kerentanan, serta kurangnya daya tawar politik dan daya tawar.. (Chambers, 2010). Robert Chambers dalam studinya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek materi dan pendapatan semata, melainkan merupakan keadaan multidimensional yang mencakup kerentanan (*vulnerability*), kekuasaan yang terbatas (*powerlessness*), dan pengalaman yang bersifat lokal, kompleks, serta dinamis. Sementara itu, menurut (Anderson & James E, 1997), kebijakan publik (*public policy*) adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern," yang menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat terkait untuk menangani isu-isu publik. Sejalan dengan kedua gagasan tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada pengembangan produk lokal daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan peluang ekonomi melalui peningkatan nilai tambah lokal dan daya saing produk lokal, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal, mengurangi kerentanan masyarakat, memperluas akses terhadap pasar (Azhana et al., 2024). Literatur tentang *local economic development* menunjukkan bahwa pengembangan produk lokal yang disertai peningkatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang konsisten dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan daerah.

3. Metode

Penelitian mengenai tren riset inovasi kebijakan di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut bagaimana tren publikasi terkait penelitian inovasi kebijakan yang telah dikembangkan di Indonesia. Kajian ini dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai artikel yang membahas inovasi kebijakan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis bibliometrik. Metode bibliometrik dipilih sebagai *framework* karena mampu memfasilitasi proses pemetaan pengetahuan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam bidang tersebut dengan memperhatikan konfigurasi, ketergantungan, interaksi, dan dinamika penulisan yang berkembang terkait inovasi kebijakan di Indonesia (Tupan et al., 2018).

Bibliometrik adalah *study literature*, termasuk penulis, kata kunci, sitasi, dan institusi, dalam basis data publikasi. Analisis bibliometrika dapat menganalisis sejumlah besar dokumen secara sistematis dan kuantitatif secara simultan (Maharatni et al., 2025) Analisis bibliometrik dapat menyoroti titik fokus penelitian dan mendeteksi tren penelitian dengan mengeksplorasi waktu, sumber, dan distribusi regional literatur (Supriyono et al., 2025).

Data yang digunakan dalam studi ini adalah publikasi tentang kemiskinan, pengangguran, peningkatan ekonomi dengan produk unggulan daerah yang dikategorikan dalam Scopus dari tahun 1998 hingga 2025. Pemrosesan artikel, konstruksi matriks, dan visualisasi dilakukan menggunakan VOSviewer dan R Studio, yang merangkum karakteristik artikel. Studi ini juga menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan grafik dan bagan.

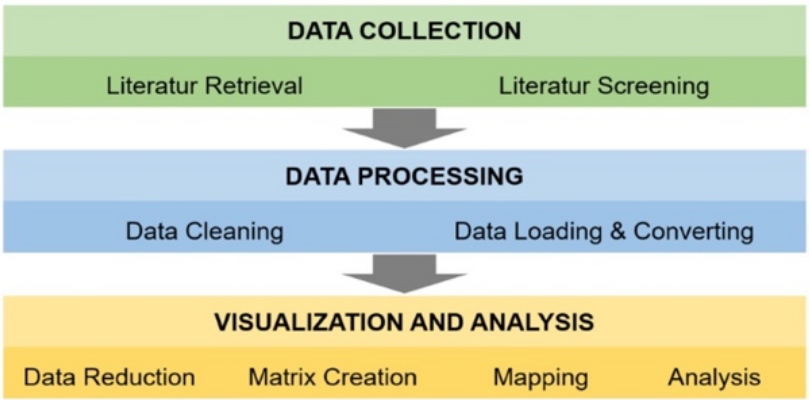

Gambar 1. Kerangka kerja penelitian analisis bibliometrik

Gambar di atas menunjukkan tahapan utama dalam proses analisis bibliometrik yang terdiri atas tiga fase besar, yaitu pengumpulan data (*data collection*), pengolahan data (*data processing*), serta visualisasi dan analisis (*visualization and analysis*). Pada tahap pengumpulan data, proses diawali dengan *literature retrieval*, yaitu kegiatan penelusuran dan pengambilan literatur dari berbagai basis data Scopus berdasarkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan *literature screening* untuk menyaring hasil penelusuran agar hanya artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian yang akan dianalisis.

Tahap berikutnya adalah pengolahan data *(data processing*) yang mencakup dua kegiatan utama: *data cleaning* dan *data loading & converting*. *Data cleaning* bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, seperti menghapus duplikasi, memperbaiki kesalahan penulisan nama penulis, atau penyamaan format kutipan. Setelah itu dilakukan *data loading & converting*, yaitu memuat dan mengonversi data ke format yang dapat diolah oleh perangkat lunak analisis bibliometrik seperti VOSviewer atau Biblioshiny.

Tahap terakhir adalah visualisasi dan analisis (visualization and analysis). Pada tahap ini dilakukan *data reduction* untuk menyederhanakan informasi agar lebih mudah dianalisis, kemudian *matrix creation* untuk menyusun hubungan antarvariabel seperti penulis, jurnal, atau kata kunci. Selanjutnya dilakukan *mapping* untuk memvisualisasikan hubungan antarunsur dalam bentuk peta jaringan (*network map*), serta *analysis* untuk menginterpretasikan hasil visualisasi tersebut. Tahapan ini membantu peneliti memahami tren, pola kolaborasi, serta struktur pengetahuan dalam bidang yang dikaji.

Gambar 2. Pencarian Publikasi Scopus

Gambar di atas menunjukkan data analisis terkait publikasi ilmiah dengan kata kunci produk lokal, kebijakan, pengentasan kemiskinan, pengangguran dalam rentang waktu 1998 hingga 2025. Terdapat total 664 penulis yang berkontribusi pada 100 dokumen, dengan satu dokumen yang ditulis oleh penulis tunggal. Dari seluruh dokumen tersebut, 23% diantaranya merupakan kolaborasi internasional, dengan rata-rata 8,71 penulis per dokumen. Kata kunci penulis tercatat sebanyak 718, dan referensi yang digunakan dalam dokumen mencapai 881. Dokumen-dokumen tersebut memiliki usia rata-rata 6,77 tahun dan memperoleh rata-rata 20,52 kutipan per dokumen. Pertumbuhan tahunan dalam publikasi ilmiah ini tercatat sebesar 8,9%.

4. Hasil dan Pembahasan

Artikel ini menyajikan temuan-temuan dari empat kategori utama yang menggambarkan lanskap penelitian terkait kemiskinan. Bagian pertama membahas tren penelitian dan kata kunci yang paling sering digunakan dalam studi-studi ini. Bagian kedua memetakan jurnal-jurnal ilmiah terkemuka yang berfungsi sebagai platform publikasi utama di bidang ini. Bagian ketiga mengidentifikasi topik-topik penelitian yang sedang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan penelitian potensial untuk studi di masa mendatang. Bagian terakhir merangkum temuan-temuan utama dan implikasinya terhadap pengembangan pengetahuan dan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan.

4.1. Tren Publikasi

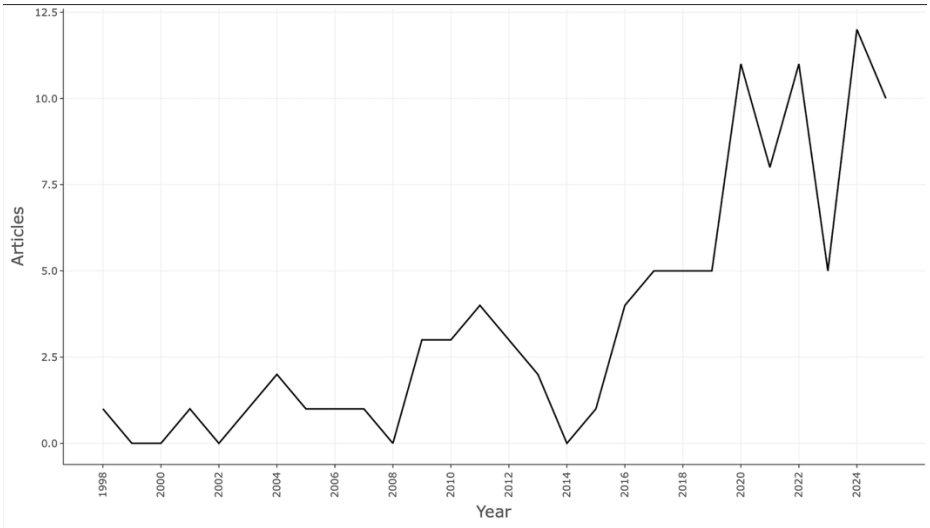

Gambar 3. Grafik Tren Jumlah Artikel

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah artikel yang diterbitkan setiap tahun dari 1998 hingga 2025. Pada awal periode, jumlah artikel yang diterbitkan cenderung rendah, dengan fluktuasi yang tidak signifikan antara 1998 hingga 2011. Namun, mulai tahun 2012, terlihat adanya lonjakan yang cukup tajam, dengan peningkatan yang stabil di tahun-tahun berikutnya, terutama pada periode 2020 hingga 2024, yang menunjukkan jumlah artikel yang lebih tinggi, dengan puncak tertinggi sekitar tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan minat dan produktivitas dalam publikasi ilmiah pada periode terakhir.

4.2. Kata kunci yang sering digunakan dalam penelitian

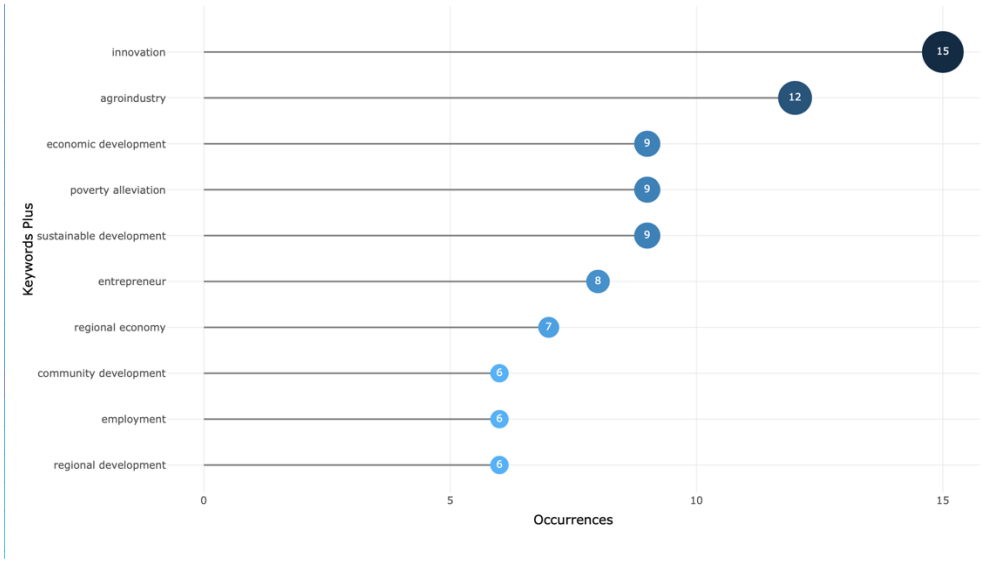

Gambar 4. Dimensi Topik Tren yang digunakan

Grafik di atas menunjukkan frekuensi kemunculan beberapa kata kunci dalam publikasi ilmiah. Kata kunci "innovation" mencatatkan jumlah tertinggi dengan 15 kemunculan, diikuti oleh "agribusiness" dengan 12 kemunculan. Beberapa kata kunci lainnya, seperti "economic development," "poverty alleviation," dan "sustainable development," masing-masing muncul 9 kali. Kata kunci seperti "entrepreneur," "regional economy," "community development," "employment," dan "regional development" muncul dengan jumlah yang lebih rendah, yakni 6 hingga 8 kali. Grafik ini memberikan gambaran tentang topik-topik utama yang banyak dibahas dalam publikasi ilmiah, dengan fokus utama pada inovasi dan sektor terkait seperti pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan,dan pembangunan regional.

Gambar 5. Kata-kata yang sering digunakan

Gambar di atas adalah representasi dalam bentuk word cloud yang menunjukkan kata-kata kunci yang sering muncul dalam publikasi terkait topik pembangunan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa publikasi ilmiah banyak membahas pengaruh inovasi dan industri pertanian terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, dengan perhatian khusus pada negara berkembang dan dampak lingkungan.

4.3. Negara dan Jurnal mana saja yang berkontribusi terhadap penelitian

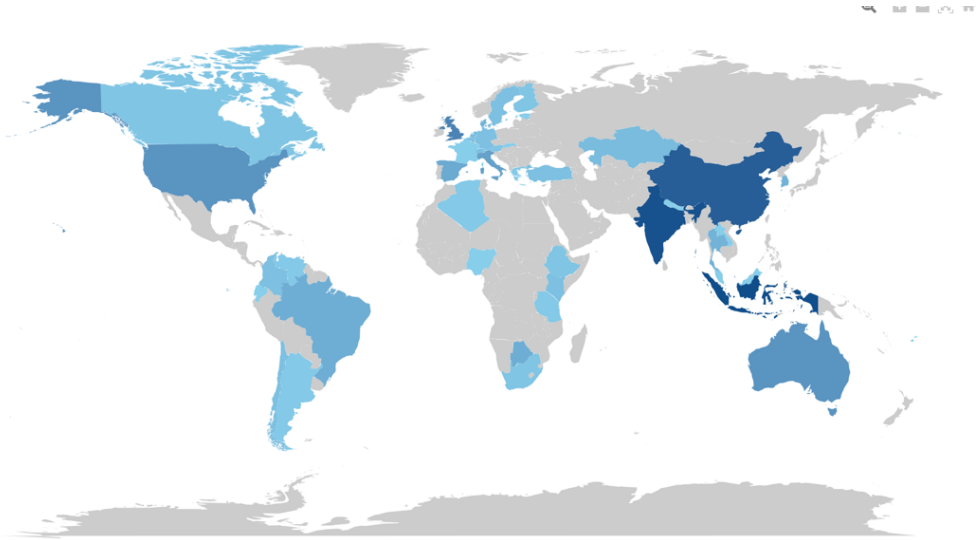

Gambar 6. Distribusi negara-negara produsen jurnal

Gambar di atas adalah peta dunia yang menunjukkan variasi intensitas atau distribusi suatu tema penelitian di berbagai negara, dengan penggunaan warna biru untuk menandai perbedaan. Negara-negara yang lebih gelap, seperti di Asia, Eropa, dan beberapa bagian Amerika, menandakan tingkat yang lebih tinggi atau lebih signifikan dari fenomena tersebut, sementara negara-negara dengan warna yang lebih terang menunjukkan intensitas yang lebih rendah. Peta ini memberikan gambaran tentang

bagaimana fenomena yang dimaksud tersebar di seluruh dunia, dengan konsentrasi yang lebih besar di beberapa wilayah, terutama di Asia dan Amerika Utara.

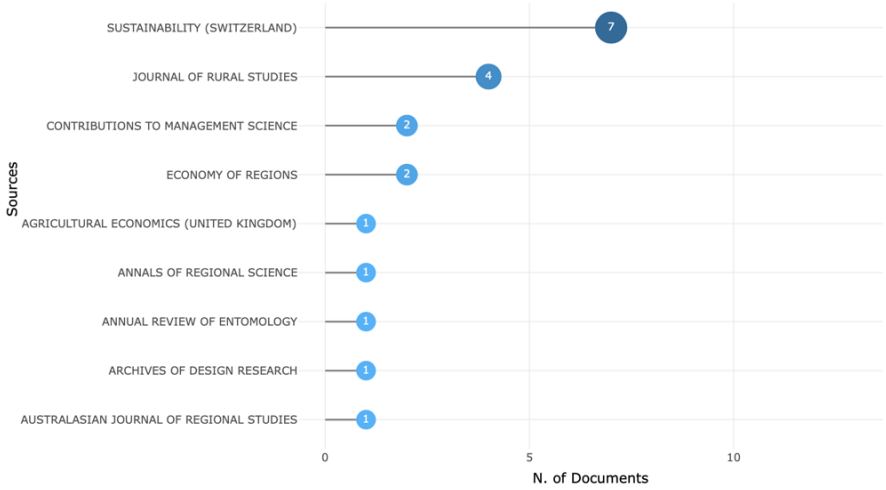

Gambar 7. Visualisasi jumlah dokumen yang diterbitkan

Gambar di atas menunjukkan distribusi jumlah dokumen yang diterbitkan dalam berbagai sumber jurnal. Jurnal "Sustainability (Switzerland)" mencatatkan jumlah dokumen terbanyak dengan 7 artikel ((Cabello et al., 2021; Ebhuoma et al., 2020; Itzkin et al., 2021; Manaf et al., 2018; Putra et al., 2020; Sumardjo et al., 2023; Ticona Machaca et al., 2024), diikuti oleh "Journal of Rural Studies" dengan 4 dokumen . Beberapa jurnal lainnya, seperti "Contributions to Management Science" dan "Economy of Regions," masing-masing memiliki 2 dokumen. Jurnal-jurnal seperti "Agricultural Economics (United Kingdom)," "Annals of Regional Science," "Annual Review of Entomology," "Archives of Design Research," dan "Australasian Journal of Regional Studies" masing-masing memiliki 1 dokumen yang diterbitkan. Grafik ini menggambarkan sumber jurnal yang paling sering digunakan dalam publikasi, dengan "Sustainability" menjadi yang dominan

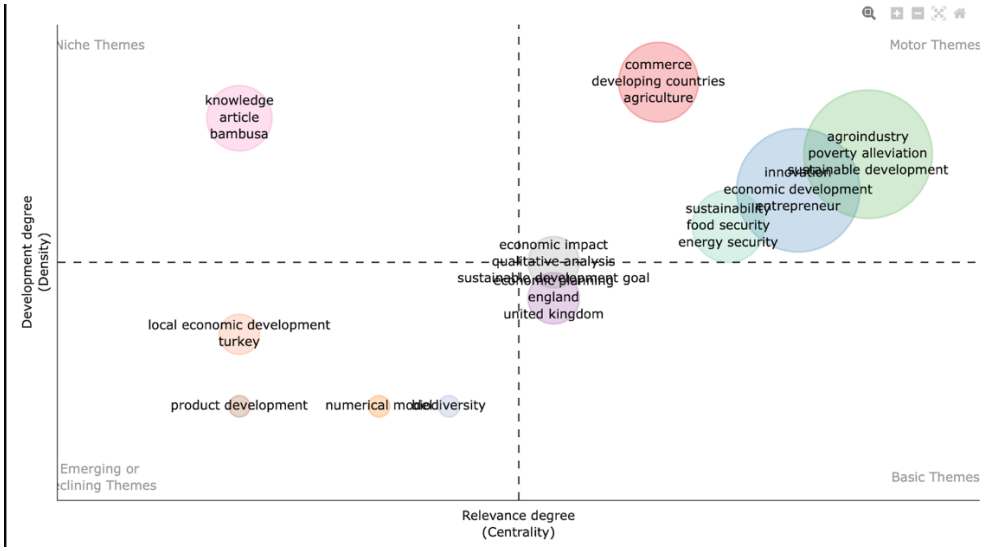

Gambar 8. Peta Tematik

Gambar di atas merupakan sebuah analisis tematik yang menggambarkan hubungan antara tema-tema yang muncul dalam publikasi berdasarkan dua parameter utama: *development degree* (tingkat perkembangan) dan *relevance degree* (tingkat relevansi). Tema-tema yang berada di kuadran kanan atas, seperti *"agroindustry," "poverty alleviation," "economic development,"* dan *"sustainable development,"* dianggap sebagai tema utama dengan tingkat perkembangan dan relevansi yang tinggi, yang berfungsi sebagai pendorong utama dalam topik-topik terkait. Di sisi kiri atas, tema seperti *"knowledge," "article,"* dan *"bambusa"* berada di kategori *niche themes*, dengan perkembangan rendah tetapi relevansi yang lebih tinggi. Kuadran bawah kiri menunjukkan tema yang menurun seperti *"product*

development," "*local economic development,"* dan *"numerical model,"* yang memiliki perkembangan dan relevansi yang lebih rendah. Peta ini memberikan wawasan mengenai dinamika tema-tema yang sedang berkembang, mendominasi, atau menurun dalam penelitian terkait.

4.4. Frekuensi Kemunculan Kata Kunci

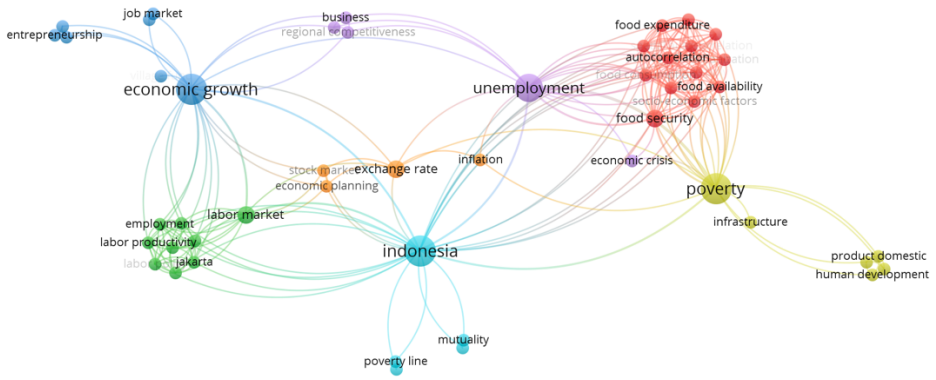

Gambar 9. Visualisasi jaringan ko-kemunculan kata kunci

Gambar di atas menunjukkan peta jaringan yang menggambarkan hubungan antara berbagai topik yang relevan dengan isu-isu sosial-ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada konsep-konsep seperti "economic growth" (pertumbuhan ekonomi), "unemployment" (pengangguran), dan "poverty" (kemiskinan). Jaringan ini menghubungkan beberapa sub-tema, seperti "job market," "employment," dan "labor market," yang berfokus pada kondisi pasar tenaga kerja, dengan "economic growth" yang mencakup faktor-faktor seperti "inflation," "economic planning," dan "exchange rate." Di sisi lain, topik "poverty" berhubungan dengan isu-isu seperti "food expenditure," "economic crisis," dan "food security." Hubungan antar-topik ini memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi saling mempengaruhi, serta bagaimana kemiskinan dan pengangguran dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

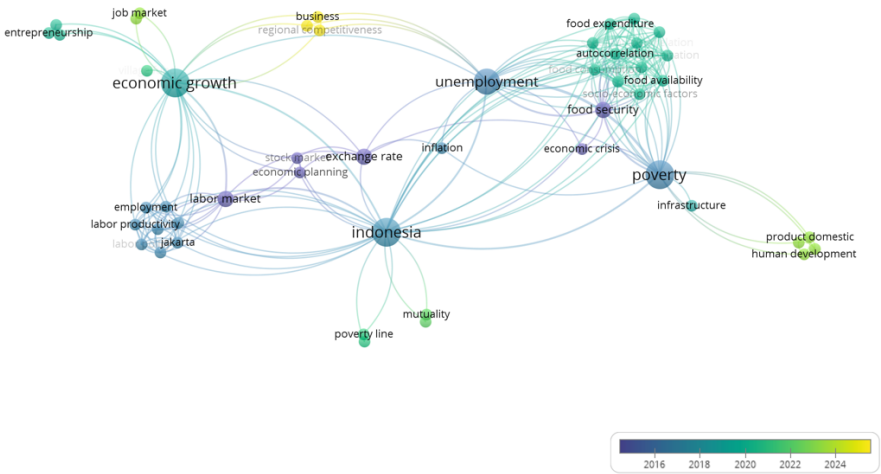

Gambar 10. Visualisasi tema penelitian setiap tahun

Gambar di atas menunjukkan peta jaringan yang menggambarkan hubungan antara berbagai topik ekonomi dan sosial di Indonesia, dengan fokus pada *"economic growth"* (pertumbuhan ekonomi), *"unemployment"* (pengangguran), dan *"poverty"* (kemiskinan). Peta ini mencakup berbagai tema terkait seperti *"job market," "labor market,"* dan *"employment,"* yang berhubungan dengan kondisi pasar tenaga kerja. Terkait dengan kemiskinan, ada koneksi dengan *"food expenditure," "economic crisis,"* dan *"food security."* Warna yang ada di peta menunjukkan perubahan waktu, dengan gradien warna yang mengarah dari tahun 2016 (hijau) ke 2024 (kuning), menunjukkan bagaimana hubungan antar topik ini berkembang dari tahun ke tahun. Peta ini memberikan gambaran dinamis mengenai

bagaimana isu-isu sosial-ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan berinteraksi dengan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seiring berjalannya waktu.

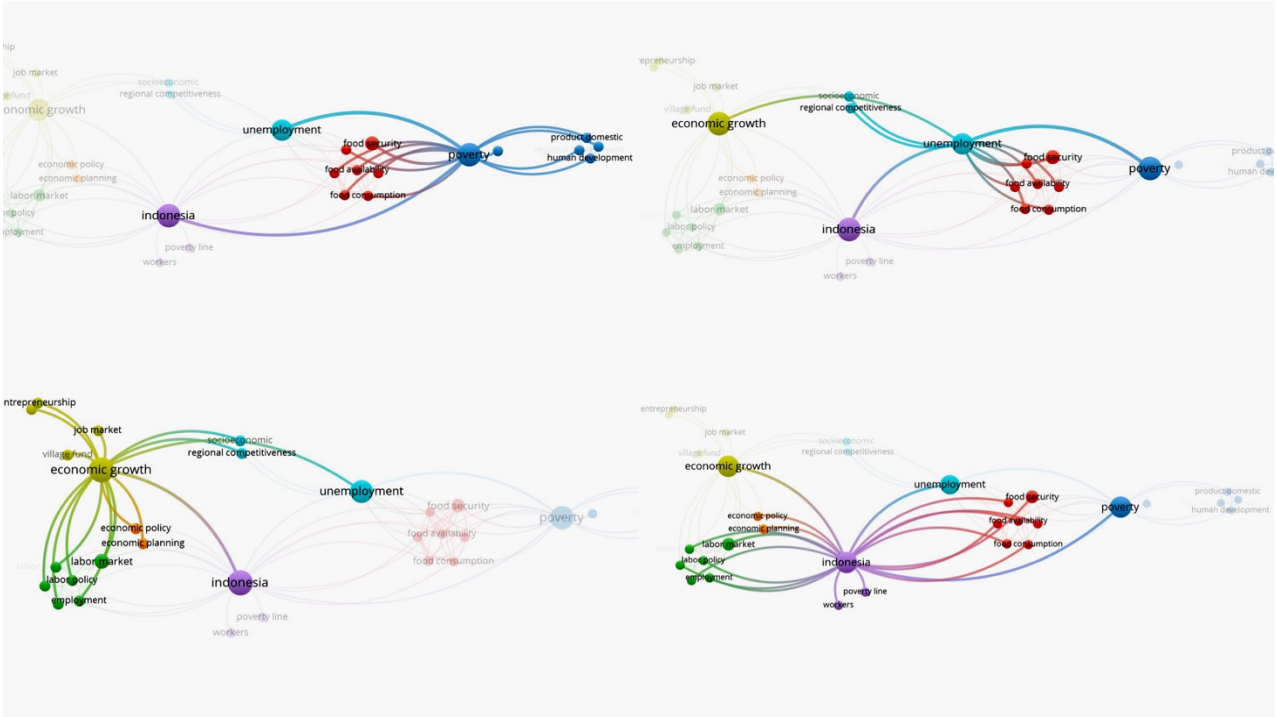

Gambar 11. Visualisasi jaringan antar kata kunci

Gambar di atas menunjukkan peta hubungan antar berbagai topik sosial-ekonomi yang relevan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Peta ini memperlihatkan keterkaitan antara *"economic growth"* (pertumbuhan ekonomi), *"unemployment"* (pengangguran), dan *"poverty"* (kemiskinan), dengan topik-topik lain seperti *"food security," "food consumption,"* dan *"economic policy."*

Hubungan antar topik ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan. Pengembangan produk unggulan daerah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan mendorong sektor-sektor tertentu untuk berkembang, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Topik *"regional competitiveness"* dan *"labor market"* juga menyoroti pentingnya meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja, serta memperkuat sektor-sektor lokal, sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memanfaatkan produk unggulan daerah, diharapkan dapat tercipta peluang ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

5. Kesimpulan

Makalah ini menyoroti beberapa tema penelitian mendatang yang berfokus pada pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengangguran, pertumbuhan

ekonomi, dan produk unggulan daerah dan solusi potensial. Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian mendatang yang mungkin dan krusial yang dapat dieksplorasi:

a. **Peningkatan Produksi Produk Unggulan Daerah** : Bagaimana strategi peningkatan kapasitas produksi dapat mendorong daya saing produk unggulan daerah di pasar domestik dan global?
b. **Studi Kelayakan Pengembangan Industri Hilir Produk Unggulan Daerah** : Faktor apa yang menentukan keberlanjutan dan profitabilitas pengembangan industri hilir di sektor unggulan daerah?
c. **Dampak Multiplier Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Pengembangan Sektor Agroindustri** : Bagaimana pengembangan agroindustri menciptakan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
d. **Analisis Kebijakan Fiskal dan Insentif Investasi untuk Mendukung Pengembangan Industri Hilir Produk Unggulan Daerah di Sektor Pangan** : Bagaimana kebijakan fiskal dapat memperkuat nilai tambah produk pangan berbasis daerah?
e. **Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Ekowisata untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah :** Apa model kolaborasi ideal antara komunitas lokal dan pelaku industri dalam menciptakan potensi unggulan berkelanjutan?
f. **Evaluasi Dampak Pengembangan Produk Lokal terhadap Perekonomian Daerah** : Faktor apa yang memengaruhi keberhasilan program pengembangan produk lokal di berbagai wilayah?
g. **Peluang ketenagakerjaan di sektor Produk Lokal dan Sektor berkelanjutan terhadap Pengentasan Kemiskinan** : Bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat miskin dalam sektor produk lokal?
h. **Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Status Kesehatan terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia:** Sejauh mana tingkat pendidikan dan status kesehatan menentukan kemiskinan multidimensi dan apakah peningkatan akses terhadap layanan dasar dapat mengurangi kemiskinan multidimensi?
i. **Kebutuhan Kompetensi dan Kesenjangan Keterampilan** : Bagaimana kesenjangan keterampilan memengaruhi kemampuan memasuki pasar kerja dan Strategi intervensi apa yang efektif memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri lokal?
j. **Digitalisasi UMKM dan Dampaknya pada Ketenagakerjaan** : Bagaimana kebijakan daerah dapat memperkuat ekosistem digital bagi UMKM agar berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru?
k. **Komprehensif Dampak Inovasi terhadap Ketenagakerjaan dan Penurunan Kemiskinan** : Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengarahkan inovasi agar memperkuat ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja hijau *(green jobs)?*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang akan memperkaya pembahasan dan pemahaman isu ini serta memberikan pada pengembangan sektor lokal dan peningkatan kompetensi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Tabel 7.8 Rekomendasi Kajian

Prioritas Permasalahan	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan						Instansi Koordinator
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pengembangan Produk Unggulan Padi	Kajian Peningkatan Produksi Pangan	x						Bapperida
	Studi Kelayakan Pengembangan Industri Hilir PUD	x						Bapperida
	Kajian Dampak Multiplier Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Pengembangan Industri Hilir Padi Organik di Pedesaan		x					Bapperida
	Studi Kelayakan Tekno-Ekonomi dan Sustainability Pengembangan Bioindustri Berbasis Limbah Pengolahan Padi untuk Mendukung Ketahanan Energi Daerah		x					Bapperida
	Kajian Adopsi Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Modern untuk Meminimalkan Kehilangan Hasil (Losses) dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Padi			x				Bapperida
	Analisis Kebijakan Fiskal dan Insentif Investasi untuk Mendukung Pengembangan Industri Hilir Produk Unggulan Daerah di Sektor Pangan				x			Bapperida
	Pengembangan Produk Unggulan Padi Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Ekowisata untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah					x		Bapperida
	Evaluasi Dampak Pengembangan PUD terhadap Perekonomian Daerah						x	Bapperida
Pengembangan Produk Unggulan Daging	Analisis Rantai Nilai dan Daya Saing PUD	x						Bapperida
	Kajian Pasar dan Potensi Komersialisasi PUD		x					Bapperida
	Strategi Branding dan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Nilai Jual dan Ekspor Produk Unggulan Daging Olahan yang Berdaya Saing Global			x				Bapperida
	Model Integrasi Peternak-Pengusaha dalam Rantai Pasok Produk Unggulan Daging untuk Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Rakyat				x			Bapperida
	Evaluasi Dampak Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi pada Rantai Pasok Produk Unggulan Daging untuk Menjaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah						x	Bapperida
Kemiskinan	Identifikasi Klaster Wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah, Pengangguran Tinggi, dan Beban Penyakit	x						Bapperida

Prioritas Permasalahan	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan						Instansi Koordinator
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kajian Peluang ketenagakerjaan di sektor PUD dan Sektor berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan	x						Bapperida
	Kajian Peluang Inovasi di Bidang Kemiskinan		x					Bapperida
	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Status Kesehatan terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia			x				Bapperida
	Efektivitas Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Pendidikan dalam Memutus Siklus Kemiskinan di Perdesaan			x				Bapperida
	Pengaruh Faktor Pendidikan dan Kesehatan sebagai Penentu Inklusi Ekonomi di Daerah Perdesaan terhadap Kualitas Hidup				x			Bapperida
	Korelasi Keikutsertaan BPJS Kesehatan, Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan Risiko Terjerumus dalam Kemiskinan pada Pekerja Informal					x		Bapperida
	Pendekatan Life-Cycle untuk Memutus Siklus Kemiskinan: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Terintegrasi dari Kesehatan Reproduksi, Gizi, dan Vokasi						x	Bapperida
Ketenagakerjaan	Dampak Akses terhadap Pendidikan Menengah dan Tinggi terhadap Transisi dari Sekolah ke Dunia Kerja dan Risiko Pengangguran						x	Bapperida
	Kajian Kebutuhan Kompetensi & Kesenjangan Keterampilan	x						Bapperida
	Kajian Efektivitas Pelatihan Vokasi & BLK	x						Bapperida
	Kajian Digitalisasi UMKM & Dampaknya pada Ketenagakerjaan		x					Bapperida
	Kajian Komprehensif Dampak Inovasi terhadap Ketenagakerjaan dan Penurunan Kemiskinan		x					Bapperida
	Kajian Komprehensif Pengaruh Ketenagakerjaan, Penurunan Kemiskinan, terhadap Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia			x				Bapperida
	Integrasi Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Memperkecil Peluang Pengangguran pada Perempuan Muda				x			Bapperida
	Digitalisasi, Inovasi, dan Kualitas Hidup: Analisis Dampak Bersama Digitalisasi UMKM dan Inovasi Sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kemiskinan Multidimensi, dan Indeks Pembangunan Manusia					x		Bapperida

Prioritas Permasalahan	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan						Instansi
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Transisi Sekolah-Kerja yang Terhambat: Kajian Komprehensif Dampak Kesenjangan Keterampilan terhadap Pengangguran Kaum Muda di Daerah Rawan Kemiskinan						x	Bapperida

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO